



PRABOWO HALAL PECAT BUDI ARIE

- TAMBANG NIKEL ANCAM RAJA AMPAT
- DISKON LISTRIK HILANG, 5 STIMULUS TERBILANG
- PROGRAM UNGGULAN HERMAN DERU RAIH APRESIASI TINGGI
- MEMBANGUN MUBA LEBIH BAIK DENGAN ASN PROFESIONAL DAN BERAKHLAK
- NEGARA HADIR UNTUK LANSIA
- KOPERASI DESA TIDAK MATIKAN BUMDES
- HAPUS DISKRIMINASI REKRUTMEN TENAGA KERJA
- 30 PROGRAM QUICK WIN PRAMONORANO SUDAH TERPENUHI
- RELASI MEGAWATI-PRABOWO MENUNGGU PDIP GABUNG ISTANA
- PEMDA BOLEH RAPAT LAGI DI HOTEL
- AMBIL PELUANG DI IKN
- KEKUATAN MERATA PEMAIN LIGA SAMA HEBATNYA



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

Network

www.infoindonesia.id



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📱
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📱

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH No. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
JUNI
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi sorotan dalam perkara terkait jabatan sebelumnya: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tak terkecuali isu reshuffle dari jabatannya sekarang.



22

INFO SUMSEL

Berbagai program unggulan yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mendapat apresiasi karena menyentuh langsung masyarakat kecil.



32

INFO DAERAH

Akhir 2025 akan menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia, khususnya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.



70

INFO NASIONAL

Kementerian Sosial menegaskan negara akan selalu hadir untuk para warganya yang sudah lanjut usia atau lansia. Dengan berbasis data tunggal, intervensi yang diberikan akan tepat sasaran.



56

INFO EKONOMI

Rencana menerapkan diskon tarif listrik mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025 ternyata batal. Namun sejumlah paket stimulus, perangsang, pergerakan ekonomi lainnya tetap jalan.



66

INFO ISTANA

Relasi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya kian erat.



87

INFO KHUSUS

Hari Raya Idul Adha, tahun ini jatuh pada Jumat, 6 juni 2025, identik dengan pengolahan hewan kurban yang kerap memerlukan santan dari kelapa. Namun, yang terakhir ini sudah langka sejak menjelang Idul Fitri, dua bulan sebelumnya. Bersama kopi dan pinang, kelapa menjadi komoditas primadona untuk menyemarakkan ekonomi dalam negeri.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

48 INFO WISATA

52 INFO OLAHRAGA

60 WAWANCARA

86 KAJI

82

INFO NASIONAL

Isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel kembali menguat dan memicu beragam perdebatan serta kecaman dari masyarakat luas.

SEMESTER

Semester I 2025 segera berlalu. Kita akan segera bertemu dengan Semester II mulai Juli hingga tahun berakhir. Peralihan semester ini menjadi momentum yang pas untuk menyusun agenda maupun menentukan kegiatan prioritas.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, kita dapat melihat lagi perjalanan selama enam bulan pertama 2025 dan mengupayakan target-target tahun ini tercapai atau bahkan melampauinya. Di bidang perekonomian misalnya, pemerintah terus berupaya mencapai target pertumbuhan mendekati lima persen atau melampauinya.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk mengatasi tantangan dan mendorong Indonesia keluar dari middle income trap dan berada di posisi negara dengan pendapatan lebih tinggi melalui strategi yang mencakup investasi infrastruktur, reformasi pendidikan, stimulasi investasi, dan pengembangan sektor industri dan teknologi. Ringkasnya, menjadi negara maju.

Postur APBN 2025 dirancang dengan target penerimaan Rp2.996,9 triliun dengan besaran belanja Rp3.613,1 triliun atau terdapat defisit anggaran Rp616,2 triliun. APBN 2025 menargetkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan produktivitas ekonomi. Investasi dalam infrastruktur akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses pasar.

Investasi tak kalah penting adalah dalam proyek infrastruktur terintegrasi. Proyek infrastruktur terintegrasi, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan, bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi dan memperlancar aliran barang dan jasa. Proyek-proyek terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Lebih dari itu, pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Mei 2025. Dalam KEM PPKF 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Sedangkan DPR menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program pelayanan publik, serta memastikan kebijakan fiskal tidak sekadar memangkas belanja, tetapi tetap memacu pertumbuhan yang inklusif dan adil.

Nah, keseimbangan itu sebenarnya sudah relevan untuk Semester II 2025. Kita berharap dan siap berusaha bersama-sama mengupayakan Indonesia Maju. Waktu terasa kian mendesak. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



MENTERI BUDI ARIE DALAM SOROTAN

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi sorotan dalam perkara terkait jabatan sebelumnya: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tak terkecuali isu reshuffle dari jabatannya sekarang.



Hingga menjelang sebulan setelah namanya muncul dalam dakwaan di sidang yang menyidangkan perkara perlindungan situs judi online, Menteri Koperasi Budi Arie masih menjalankan tugasnya menyiapkan pengembangan Koperasi Merah Putih. Namun perkara situs judi online itu juga mengiringinya.

Salah satunya adalah pelaporan oleh sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri.

"Laporannya dugaan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP tentang fitnah yang disampaikan oleh terlapor, yaitu Budi Arie Setiadi selaku mantan Menkominfo," kata kader PDIP Wiradarma Harefa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025..

Hal yang dilaporkan terkait dengan pernyataan oleh seseorang yang diduga Budi Arie bersama seorang wartawan dalam rekaman suara yang kini viral. Dalam rekaman itu, terduga Budi Arie menyebut nama PDIP serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebagai otak pembingkaian atau framing kasus judi online (judol) terhadap dirinya.

Wira mengemukakan pernyataan yang diduga berasal dari Budi Arie tersebut merupakan fitnah kepada PDIP. "Kami ini sebagai kader PDIP merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDIP dan Bapak Budi Gunawan yang main ini semua," katanya.

Oleh sebab itu Wira bersama sejumlah kader PDIP lainnya melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri agar kebenaran terungkap. "Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan apakah dia menyampaikan itu dengan dasar apa, dia harus mengungkapkan. Dengan dasar apa dia menyampaikan menuduh PDIP sebagai otak di belakang ini semua," ujarnya.

Adapun bukti yang dibawa dalam pelaporan ini adalah rekaman suara serta tangkapan layar pemberitaan dari

media sosial. Antara lain, tayangan TikTok, Instagram, hingga YouTube.

Tambahan pula, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan, Sumatera melalui Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara, pun menyampaikan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi atas dugaan pencemaran nama baik dan

yang mencoreng kewibawaan partai telah kita hadapi dengan mengambil tindakan hukum. Namun, kami mengajak kita semua sebagai kader partai, untuk tidak emosional, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis. "Tetap jaga kekondusifan dan kita mendorong pihak keamanan untuk menindaklanjuti laporan kita," tutur Hasyim yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara. Sementara itu, Kepala BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan

bencian (Hate Speech) tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diduga dilakukan oleh Budi Arie Setiadi yang menjabat Menteri Koperasi Republik Indonesia," ujar Kepala BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan.

Turut hadir dalam pengaduan masyarakat ke Polrestabes Medan, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Bendahara PDI Perjuangan Medan Boydo H.K, SH, M.Kn, Wakil Sekretaris Riana, SH, MH, Wakil Ketua



ujaran kebencian.

"Kita sebagai kader PDI Perjuangan merupakan perwakilan DPC PDI Perjuangan Kota Medan melalui BBHAR Kota Medan, melaporkan ke Polrestabes Medan oknum Menteri yang diduga melakukan pencemaran nama baik partai, yang menuding PDI Perjuangan terkait dengan judi online dan tanpa disertai bukti-bukti konkrit. Kita buat laporan ke Polrestabes Medan sebagai upaya menjaga marwah partai," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim Wijaya, Selasa, 3 Juni 2025

Hasyim menegaskan, tindakan

Rion Arios, SH, MH bersama Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Tumpal U Napitupulu, SH, MH menegaskan bahwa yang dilaporkan ialah Budi Arie Setiadi.

"Atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait dengan tindak pidana dugaan pencemaran nama baik dan ujaran ke-

Dr. Hj. Fitriani Manurung, M.Pd, Wakil Ketua Fuad Akbar, S.Sos, M.Sos, Sekretariat Bayu Rini, Sekretaris BSPN Cabang PDI Perjuangan Medan Budi Susanto, SH, dan Pengurus PAC Inda Tobing.

Hasyim mengemukakan, pada bulan Mei 2025 ini masyarakat Indonesia, keluarga besar serta kader PDI Perjuangan se - Indonesia dikejutkan dengan pernyataan pencemaran nama baik PDI Perjuangan dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi, yang sudah tersebar di media sosial Facebook, Tiktok, dan lain-lain.

• INFO UTAMA

Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam dakwaan kasus dugaan perlindungan situs judol oleh sejumlah oknum pegawai Kemenkominfo. Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Terdakwa dalam kasus tersebut meliputi Zulkarnaen Apriliantony (teman Budi Arie), Adhi Kismanto (pegawai Kemenkominfo), Alwin Jabarti Kiemas (Direktur Utama PT Djelas Tandatangani Bersama), dan Muhrijan alias Agus (utusan direktur Kemenkominfo).

rian Komunikasi dan Digital (Komdigi), membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi. "Ini saya ingin meluruskan, supaya di media juga jangan aneh-aneh nih. Pak Budi Arie tidak menerima apapun dari perjudian," kata Apriliantony atau Tony dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.

Tony mengatakan hal itu untuk menanggapi keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan pada sidang tersebut. Dia menegaskan dirinya bukan berperan sebagai sosok yang mengum-

kan bahwa institusinya membuka peluang untuk memanggil kembali Budi Arie terkait dengan kasus judi online atau daring.

"Yang jelas pernah kami periksa, dan tentunya mungkin akan kami konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk," ujar Kapolri di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Jenderal Pol. Sigit mengatakan bahwa Polri tetap mengikuti proses persidangan kasus dugaan perlindungan situs judol oleh sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital,



Menurut dakwaan JPU, awalnya Muhrijan menawarkan komisi Rp3 juta per situs judol kepada Zulkarnaen. Setelah negosiasi, disepakati tarif Rp8 juta per situs dengan pembagian komisi sebanyak 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto.

"Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga," kata jaksa.

Toh terdakwa Zulkarnaen Apriliantony yang berstatus pegawai Kement-

pulkan uang dari setoran-setoran hasil 'penjagaan' situs judol itu. "Saya bukan pengumpul uang di sini, saya penerima uang di sini," ujarnya.

Menurut dia, Budi Arie tidak tahu menahu kasus tersebut dan pihaknya siap bertanggung jawab dunia akhirat. "Dan dia (Budi Arie) tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalankan ini, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa pertanggung jawabkan, dunia akhirat," tegasnya.

Mengenai perkembangan yang terjadi dalam sidang, kepolisian juga ikut menyimakinya. Bahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan

Komdigi). "Tentunya kami mengikuti proses sidang, dan nanti petunjuk dari hakim seperti apa," katanya.

Memang Budi Arie sempat diperiksa oleh Polri di Gedung Bareskrim Polri pada tanggal 19 Desember 2024. Terkait pemeriksaan ini, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengemukakan, hingga lima bulan pasca pemeriksaan pada tahun lalu itu, belum ada tanda-tanda penetapan tersangka terhadap Budi Arie. "Polri semestinya segera menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai tersangka kasus dugaan judol," kata Hari dalam pernyataan resmi, Minggu, 8

Juni 2025.

Hari mengingatkan agar Polri tidak bermain mata dengan Budi Arie yang juga merupakan Ketua Umum Projo, lantaran hingga kini belum ada penetapan tersangka terhadapnya.

Ia menilai bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat, mengingat Budi Arie telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 19 Desember 2024. Selain itu, dalam surat dakwaan terhadap para terdakwa eks pegawai Kominfo, yakni Zulkarnaen dan kawan-kawan, sejumlah saksi fakta juga menyebut nama Budi Arie.

"Namun, sudah lima bulan pasca pemeriksaan belum ada tanda-tanda penetapan tersangka. Tentu ini menambah kecurigaan publik. Apalagi nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan terdakwa kasus dugaan judi online yang melibatkan Zulkarnaen Apriliantony dan kawan-kawan," papar Hari.

Hari turut menyinggung slogan Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menurutnya sekadar kiasan jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut. Menurut dia, status Budi Arie yang tetap belum jelas berpotensi menimbulkan sentimen negatif di tengah masyarakat.

"Ini pertarungan lembaga Polri memeriksa dan membongkar kasus judi online. Apalagi Polri dengan slogan Presisinya akan bisa diartikan dengan kepanjangan 'Pro REzim Sistem Judi Sistem online', jika kasus Budi Arie masih mengambang dan belum dijadikan tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Polhukam saat Budi Arie menjadi Menkominfo, mengemukakan akan mundur jika berada dalam posisi Budi Arie saat ini. Kalau saya yang begitu gak kuat menghadapi masyarakatkan mundur saja kalau saya. Tapi orang kan beda-beda, ada yang takut mundur, ada yang memang mukanya tebal, ada macam-macam," ungkapnya dalam saluran media sosial YouTube Mahfud MD Official dikutip pada Selasa, 3 Juni 2025.

Mahfud juga menyarankan Presiden Prabowo tegas, sebab hingga saat ini Budi Arie masih aktif menjadi menteri.

Menurut Mahfud MD, saat ini Prabowo yang masih terdiam memiliki banyak arti.

"Kita tidak tahu ya apakah Pak Prabowo membiarkan ini berjalan secara alamiah atau mempersiapkan dulu situasi, kondisi lingkungannya agar berjalan atau apa gitu," ucap Mahfud MD.

Sedangkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan

liau," ujarnya.

Juri tidak secara langsung menjawab apakah ada evaluasi khusus terhadap sejumlah menteri yang menjadi sorotan publik, seperti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait narasi "lingkar pinggang", hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang sempat disebut dalam laporan kepolisian.

"Bukan soal sorotan. Presiden bek-



bahwa segala keputusan terkait posisi menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Kalau soal reshuffle, tanyakan ke Bapak Presiden. Itu hak prerogatif beliau," ujarnya. di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025 menanggapi isu perombakan Kabinet Merah Putih (reshuffle) yang semakin menguat belakangan ini.

"Kalau soal reshuffle, tanyakan ke Bapak Presiden. Itu hak prerogatif be-

erja dibantu para menteri dan wakil menteri. Pengangkatan dan pemberhentian adalah hak Presiden. Beliau tentu punya ukuran dan catatan sendiri soal kinerja mereka," jelasnya.

Saat ditanya apakah evaluasi dilakukan secara rutin, Juri menegaskan bahwa Presiden tentu memantau kerja para pembantunya, meski tidak selalu diumumkan ke publik. "Ya, itu nggak perlu dijawab. Sudah tahu kita lah. Presiden pasti melihat," ujarnya. • Editor: GE



JUDI ONLINE DAN BUDI ARIE

Mengetahui praktik perlindungan terhadap situs judi online boleh ditelusuri. Namun terlibat di dalamnya masih perlu pembuktian hukum.

Keterlibatan Budi Arie diduga bermula sejak Oktober 2023. Saat itu, ia memerintahkan Zulkarnaen untuk mencari seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto.

"Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Adhi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online," sebagaimana materi tertulis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2025.

Para terdakwa dalam sidang itu adalah Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, Terdakwa III Alwin Jabarti Kiemas, dan Terdakwa IV Muhrijan Alias Agus.

Budi Arie juga menawarkan Adhi Kismanto yang lulusan SMK untuk

mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kominfo. Dalam proses seleksi tersebut, Adhi dinyatakan tak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana.

Namun, Adhi tetap diterima bekerja di Kominfo karena ada atensi Budi Arie. Adhi ditugaskan mencari link atau website judi online yang bakal dilaporkan Kepala Tim Take Down Riko Rasota Rahmada untuk diblokir.

Pada Januari 2024, PNS Kominfo Deden Imadudin Soleh menyampaikan kepada Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama, Alwin Jabarti Kiemas bahwa kantornya sedang patroli mandiri situs judi online yang dilakukan oleh Adhi. Atas hal tersebut, Alwin memberikan uang koordinasi Rp 280 juta kepada Deden.

Ternyata praktik penjagaan situs judi online diketahui pula oleh Muhrijan. Dia pun melakukan pertemuan dengan Deden dan mengancam akan melaporkan praktik tersebut kepada



Budi Arie. "Dalam pertemuan tersebut Muhrijan meminta uang sejumlah Rp 1,5 miliar dan dan selanjutnya saksi Denden mengirimkan uang sejumlah Rp 100 juta secara bertahap sebanyak dua kali," kata jaksa.

Muhrijan yang mengaku utusan dari Direktur Kemenkominfo bertemu dengan Adhi di salah satu kafe di Jakarta Selatan. Dia meminta praktik penjagaan situs judi online tetap dilanjutkan dengan menawarkan bagian Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar dari total seluruh situs judi online.

Atas kesepakatan tersebut, Adhi menanyakan kepada Muhrijan berapa bagian yang akan didapatkan Zulkarnaen untuk penjagaan situs judi online. Muhrijan pun menawarkan Rp 3 juta per website judi online. Namun, nominal tersebut langsung ditolak oleh Zulkarnaen.

"Muhrijan menjawab hanya bisa menawarkan sebesar itu karena Denden Imadudin meminta bagian sangat tinggi. Kemudian akhirnya Zulkarnaen menyetujui penjagaan website judi online agar tidak diblokir oleh Kemenkominfo dilakukan kembali," ungkap jaksa.

Selanjutnya pada April 2024, setelah praktik penjagaan situs di lantai 3 kantor Kominfo dihentikan, Zulkarnaen dan Adhi menemui Budi Arie di rumah dinas, Widya Chandra. Mereka meminta izin untuk memindahkan praktik ke lantai 8, dan Budi Arie menyetujuinya.

Praktik ini kembali aktif pada Mei 2024. Terdakwa Muhrijan alias Agus menerima uang sebesar Rp48,75 miliar dari pengamanan sekitar 3.900 situs judi online. Pembagian dana tersebut menggunakan kode seperti "Bagi PM" (bagian Menteri), "CHF" (gabungan bagian untuk Zulkarnaen dan Menteri), serta "Bagi Kawan" (untuk para terdakwa lainnya).

Dalam pertemuan di sebuah kafe bernama Pergrams, Zulkarnaen dan Adhi bertemu dengan Muhrijan di salah satu kafe wilayah Jaksel. Pertemuan tersebut membahas jatah penjagaan situs judi online. "Sebesar Rp 8 juta per website serta pembagian untuk Adhi sebesar 20 persen, Zulkarnaen sebesar 30 persen dan untuk Budi Arie sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga," kata jaksa.

Zulkarnaen juga menyatakan, dalam sebuah pertemuan bahwa Budi Arie mengetahui praktik penjagaan situs judi online. "Pada pertemuan tersebut, Zulkarnaen menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui oleh Budi Arie Setia. Namun Zulkarnaen sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan karena Zulkarnaen merupakan teman dekat Budi Arie," jelas dakwaan.

Pada Mei 2024, Muhrijan menerima 3.900 situs judi untuk dilindungi dan mengantongi Rp 6 miliar dari Muchlis Nasution di Jakarta Utara. Total uang dari penjagaan situs judi mencapai Rp 48,7 miliar. Uang itu kemudian dibagikan dengan sistem kode untuk sejumlah pihak, termasuk untuk Budi Arie.

Kode kode menggunakan inisial antara lain D untuk saksi Denden Imadudin Soleh, S untuk saksi Syamsul Arifin, R untuk Riko Rasota Rahmada, PM kode bagian untuk Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Ada pula kode Kawan untuk Zulkarnaen Apriilianyony, Adhi Kismanto Alwin Jabarti Kiemas dan Muhrijan alias Agus: AD untuk Adhi Kismanto, AG untuk Muhri-

• INFO UTAMA

jan alias Agus, AL untuk Alwin Jabarti Kiemas, dan CHF untuk Zulkarnaen Apriliantony ditambah bagian untuk Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.

Budi Arie pun sudah membantah narasi yang menyebut dia menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol) yang dilakukan sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian

omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada” ujar Budi Arie.

Justru ketika itu, sambungnya, ia menggencarkan pemberantasan situs judol. “Boleh dicek jejak digitalnya,” kata dia lagi.



Komunikasi dan Digital). “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Budi Arie dalam pernyataan tertulis, Senin 19 Mei 2025

Dia mengatakan narasi yang menyebut dirinya mendapat 50 persen uang dari hasil perlindungan situs judol merupakan kongkalikong di antara para tersangka, bukan inisiatif atau permintaan dirinya sendiri. “Jadi itu

la pun siap membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam praktik perlindungan situs judol itu melalui proses hukum. Menurut dia, ada tiga poin penting yang dapat membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan situs judol seperti narasi yang beredar.

“Intinya, pertama mereka (para tersangka) tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka

tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum,” ujar Budi Arie.

“Jadi sekali lagi, itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku,” lanjut dia.

Kedua, ia mengaku tidak tahu menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Ia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. “Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan,” kata dia.

Budi Arie berharap publik dapat melihat kasus ini secara jernih agar tidak larut di dalam narasi jahat terhadap dirinya. Ia juga berharap penegak hukum bekerja dengan lurus dan profesional sehingga mampu menuntaskan perkara itu.

Sedangkan di hadapan media, Budi Arie membantah keras keterlibatan dalam praktik pengamanan situs judi online. Ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah yang diorkestrasi pihak tertentu. “Inikan lagu lama kaset rusak. Kan pertama kali saya tahu saya cuma ketawa ngakak, makin enggak masuk akal nih fitnahnya, karena saya enggak tahu soal 50 persen itu,” ujar Budi Arie dalam sebuah tayangan digital, Kamis, 22 Mei 2025.

Ia balik menuding ada pihak yang menjual namanya dan menegaskan tidak pernah meminta atau ditawarkan bagian keuntungan. “Saya enggak tahu bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah gak mereka nawarin, pernah gak saya minta, pernah gak saya minta ‘eh mana punya saya 50 persen’? Tanya tuh mereka, pasti enggak, baik langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Budi juga mengatakan saat diperiksa di Bareskrim Polri, tidak ada pertanyaan soal jatah 50 persen tersebut. “Enggak (persentase 50 persen), pernah menerima atau janji, saya bilang enggak pernah,” katanya.

Menurutnya, dakwaan tersebut adalah bagian dari framing politik. “Mau mem-framing bahwa judi online ini gembongnya saya, padahal saya orang yang paling serius memberan-

tas judi online. Inikan jadi tebalik-balik nih," ucapnya.

Budi bahkan menyindir ketua umum partai politik yang tak menyebutkan namanya. "Dibanding ketua umum partai, ngomong judi online juga enggak, ngerti judi online enggak, gimana tuh. Ketum partai, kita nyebutnya partai mitra judol, jangan dibalik-balik," katanya.

Sedangkan dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, sejumlah saksi mengungkapkan peran empat terdakwa kasus situs judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam

inggu atau lebih sesuai kesepakatan.

Saksi lainnya dari Polda Metro Jaya, Yekus Elo Kelvin menambahkan bahwa kelompok ini memberikan keyakinan kepada pemilik situs judi online (judol) terjamin tidak terblokir dengan memberikan sejumlah uang. "Mereka memberikan jaminan kepada pemilik situs judol agar percaya dan tidak terblokir. Apabila telat memberikan uang bulanan hingga akhirnya terblokir," katanya.

Keempat terdakwa yang hadir dalam sidang tersebut, yakni wiraswasta Zulkarnaen Apriliantony (Tony), pegawai Kemenkominfo Adhi Kis-

dari seribu situs judi online. Mantan Komisaris BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) itu disebut-sebut memiliki peran yang cukup strategis dalam kasus judi online. Dia diduga menjadi penghubung bandar judi online dengan oknum pegawai di Kementerian Komdigi.

Tony juga menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Direktur II Tim Pemenangan Nasional untuk pasangan calon Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden 2024. Namun dalam perkara judi online, perannya justru sebagai penghubung Menteri Budi Arie. Tony ditangkap



sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tony koordinator, Adhi Kismanto yang mengumpulkan website dalam daftar pemblokiran," kata salah satu anggota Polda Metro Jaya Abdul Goffar dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Menurut dia, Alwin sebagai koordinator yang mengumpulkan duit dan Muhrijan yang mengalirkan dana ke sejumlah pihak.

Goffar mengatakan, nantinya para pemilik situs judol diminta untuk memberikan setoran agar tidak terblokir dengan tenggat waktu sem-

manto, pegawai Kemenkominfo, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama Alwin Jabarti Kiemas dan utusan direktur Kemenkominfo Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), peran keempatnya disebutkan, yakni Zulkarnaen Apriliantony atau disapa Tony sebagai penghubung dengan Menteri Kominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Selain dikenal sebagai seorang tokoh penting dalam sektor ekonomi kreatif dan kampanye politik, Tony kini menghadapi tuduhan serius terkait skandal yang melibatkan lebih

bersama dengan 11 pegawai Kementerian Komdigi atas kasus membekingi dan melindungi 1.000 situs judol (judi online).

Namun dalam sidang pengadilan ia membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi. "Ini saya ingin meluruskan, supaya di media juga jangan aneh-aneh nih. Pak Budi Arie tidak menerima apapun dari perjudian," kata Apriliantony atau Tony dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025. • Editor: GE

PEMBERANTASAN JUDI ONLINE MASIH MENANTANG

Perkara judi online di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang masih dalam proses persidangan adalah peningkatan upaya pemberantasan oleh lembaga yang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Nama kominfo tercoreng oleh perkara pemblokiran judi online (judol) yang praktisnya justru melindunginya.

Kini Kementerian Kominfo berubah menjadi Kementerian Komdigi dengan ranah pemblokiran tetap menjadi kewenangannya.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana pun mengapresiasi Kementerian Komdigi juga Kepolisian Republik Indonesia untuk ihwal pemberantasan ini. Bersama PPATK, Kementerian Komdigi dan Polri merupakan tiga pilar penting untuk memberantas judol yang masih marak.

"Ibu Menteri (Menteri Komdigi Meutya Hafid) makin galak lagi dengan situs-situsnya, Pak Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) makin kuat lagi. Itu akan menekan sampai 58,21 persen," ujar

Ivan dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.

PPATK, ujarnya, memperkirakan perputaran dana judol pada 2025 dapat mencapai Rp150,36 triliun. Ivan menjelaskan bahwa perkiraan tersebut berdasarkan parameter data perputaran judol pada Januari-Maret atau Quarter (Triwulan) 1 2025 yang mencapai Rp47,97 triliun.

Sedangkan penguatan intervensi pemerintah untuk mengurangi jumlah deposit judi online di tengah masyarakat, sambung Ivan, dapat dilakukan hingga 80 persen. "Dengan yang existing (ada) kemarin sudah sangat kuat, ditambah lagi tekanan tambahan. Itu kami prediksi akan menekan sampai Rp150 triliun," ungkapnya

Dengan pola intervensi yang telah



dilakukan hingga saat ini, sambung Ivan, maka pemerintah dapat menekan 50 persen akses masyarakat untuk bermain judol, atau membuat jumlah deposit sebatas Rp28,98 triliun.

"Ketika yang sudah kami lakukan sekarang diteruskan, dia akan menekan sampai Rp223 triliun. Ketika yang sudah kami lakukan diperkuat lagi, dia akan menekan sampai Rp150 triliun," katanya.

Sebaliknya bila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap judol. Terlebih, kata dia, di tengah kondisi mudahnya akses masyarakat terhadap teknologi finansial atau fintech.

"Ada potensi bahwa judi online ini akan bergerak dengan bantuan fintech secara masif naik sampai Rp1.100 triliun. Ini catatannya jika pemerintah tidak menekan balik," ujarnya.

Ivan mengungkapkan, jika tanpa bantuan fintech dan pemerintah tidak mengintervensi, maka perputaran dana judol pada 2025 bisa mencapai Rp481,22 triliun.

Di acara yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengakui judi online atau daring (judol) menjadi bentuk kejahatan siber yang paling banyak terjadi sepanjang 2024. Data itu dihimpun oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. "Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah," ujar Kapolri.

Dalam presentasi visual yang disampaikan Kapolri tampak jumlah kasus judol yang ditangani Polri pada tahun 2023 tercatat hanya sebanyak 275 kasus.

"Tadi Pak Ivan (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana) sampaikan bahwa kalau kita tidak hati-hati akan ada prediksi kenaikan (perputaran dana judol.) Rp1.200 triliun. Artinya, angka itu adalah prediksi yang kemudian harus kita tekan," ungkapnya sebagai tanggapan atas peningkatan kasus dan potensi membengkaknya perputaran uang dalam aktivitas judol.

Kapolri juga menyebut bahwa penipuan online menempati posisi kedua dalam daftar kejahatan siber paling banyak selama 2024, dengan jumlah kasus mencapai 1.437. Ia menjelaskan

bahwa pesatnya pertumbuhan dunia maya menjadi salah satu penyebab dominannya dua jenis kejahatan siber tersebut.

Dalam menghadapi kondisi itu, Polri menerapkan langkah-langkah pencegahan melalui penyebaran konten edukatif serta himbauan di berbagai platform, disertai patroli siber guna mendeteksi konten bermuatan negatif.

"Kemudian pada saat ditemukan, kami bekerja sama dengan Kement-

juga sudah membentuk Direktorat Siber di delapan polda, dan mudah-mudahan bisa segera kami bekali dengan kemampuan yang sama, sehingga kemudian bisa memberikan pelayanan yang baik," ujarnya.

Sedangkan Ivan menjelaskan, lembaganya telah menghentikan sementara transaksi 15.407 rekening terkait judi online atau daring (judol) per 31 Desember 2024. "Sudah menghentikan 15.407 rekening di 28 bank, dan



rian Komdigi (Komunikasi dan Digital) untuk melakukan pemblokiran. Mulai dari masalah pornografi, perjudian, kemudian penipuan, hoaks, dan ujaran kebencian, pengancaman, dan seterusnya, ada 169.686 situs yang kami ajukan (untuk diblokir, red.)," jelasnya lebih lanjut.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Polri telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai unit yang bertugas menangani insiden peretasan. "Kami

satu perusahaan efek. Saldo di dalam rekening Rp107 miliar," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa hingga tanggal tersebut, PPA TK telah menyampaikan 56 hasil analisis mengenai perputaran dana judol kepada penyidik Polri. "Perputaran dananya di dalam hasil analisis ini, perputaran dana ya, bukan saldo, itu Rp134 triliun. Masif sekali," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan bahwa selain rekening yang sementara ditahan transaksinya oleh PPA TK,

• INFO UTAMA

pihak Bareskrim Polri turut membantu menghentikan perputaran dana judul untuk sisanya.

Ivan mengungkapkan pula bahwa deposit judul pada Triwulan I Januari-Maret atau Q1 2025 lebih rendah dibandingkan Q1 2024. Ia menyebut jumlah deposit pada Q1 2025 mencapai Rp6,2 triliun, atau minus 38 persen dibandingkan Q1 2024. "Sekali lagi, data ini bukan data fabrikasi. Ini adalah data yang diberikan oleh industri keuangan," katanya.

Nah, bagaimana dengan Kementerian Komdigi? Di acara Promensisko ini (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta PPATK dan Polri sebagai penegak

wa Kementerian Komdigi saat ini sudah aktif menggunakan kecerdasan artificial dalam menangani konten-konten negatif dan kejahatan siber di ruang digital khususnya dalam memblokir akses judi online yang jelas-jelas meresahkan dan merugikan masyarakat. Penggunaan kecerdasan artificial dalam menganalisis kejahatan membuat penanganan judi online menjadi lebih cepat dan efektif sehingga penyebarannya bisa ditekan di masyarakat.

Hal serupa, menurut Bu Menkomdigi, juga harus dilakukan oleh PPATK dan Polri yang aktif dalam penanganan pengentasan judi online yang sedang

AI dalam penanganan kejahatan siber, Meutya menyebutkan pihaknya juga secara aktif melakukan literasi digital bagi masyarakat dan mengenalkan kejahatan siber sebagai musuh bersama layaknya kejahatan dunia nyata.

Ia juga mengapresiasi PPATK dan Polri yang secara sigap selalu melaporkan keterbaruan data soal penanganan judi online baik terkait nilai transaksi hingga penegakan hukum yang telah dilakukan sehingga masyarakat juga dapat melihat dampak buruk kejahatan siber bagi kehidupan masyarakat.

"Literasi digital adalah fondasi karena masyarakatnya pun harus kemudian juga merasa bahwa ini adalah musuh kita bersama bukan musuh pemerintah saja, bukan musuh Polri, bukan musuh PPATK, tapi musuh bersama," ungkap



hukum memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) untuk menangani kejahatan siber di Indonesia. Menurut Meutya, pemanfaatan AI oleh pemerintah untuk menangani kejahatan siber diperlukan karena saat ini pelaku kejahatan siber juga telah fasih memanfaatkan AI untuk melancarkan aksi-aksi yang merugikan masyarakat tidak hanya menargetkan masyarakat Indonesia tapi juga global.

"Teknologi ini setiap hari berubah, teknologi AI ini, jadi bagaimana kami dari Kementerian, Bapak Kapolri sebagai Penegak Hukum, PPATK dalam memantau, itu selalu bisa menggunakan teknologi tercanggih kalau memang kita mau dua tiga langkah ke depan," kata Bu Menkomdigi.

Menteri Meutya menjelaskan bah-

marak tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. "Karena di kami juga memantau perkembangan AI ini mungkin kami boleh mengingatkan satu dengan lainnya bahwa kita mau tidak mau harus menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam melakukan pengejaran-pengejaran terhadap kejahatan-kejahatan di dunia maya," kata Meutya.

Harapannya dengan pemanfaatan AI dalam menganalisis kejahatan siber yang juga menggunakan teknologi canggih, maka nantinya penegakan hukum untuk kejahatan-kejahatan itu bisa lebih efektif ditangani dalam ranah hukum.

Selain meminta instansi pemerintah lainnya untuk bisa aktif menggunakan



Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah.

Meutya.

Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memandang, penanganan judi online perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistemik sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas-lembaga yang betul-betul kuat. "Upaya-upaya ini tentu tidak bisa isolated. Tidak bisa misalnya hanya Komdigi dengan kita (OJK), kemudian kita tutup (rekening terindikasi judi online) dan kemudian kita kembangkan (proses enhanced due diligence). Tapi juga memang harus masif," kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Dian mengatakan, pada satu sisi OJK bersama pemerintah daerah dan perbankan juga melakukan edukasi publik dan kampanye secara besar-besaran untuk mencegah masyarakat terlibat dalam aktivitas judi online. Se-

dangkan di sisi lainnya, kata dia, OJK juga sudah memulai pertemuan dengan direktur kepatuhan dari bank-bank untuk menyusun pendekatan yang lebih sistemik dan menyeluruh dalam pemberantasan judi online.

Ia mencontohkan bagaimana penggunaan parameter untuk mengidentifikasi rekening terindikasi judi online yang masih disempurnakan. Meski begitu, perbankan tetap aktif melakukan patroli siber, analisis nasabah, serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan termasuk berkaitan dengan rekening dormant.

Pada prinsipnya, kata Dian, rekening

yang akan datang," kata Dian.

Sejauh ini, OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 17 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judi online, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). OJK juga melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan *enhanced due diligence*.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan

"Bahkan, ada juga yang memanfaatkan skema ekspor impor fiktif untuk menyamarkan arus dana," sambungnya.

Ia menyatakan bahwa berbagai modus tersebut dirancang agar lolos dari pengawasan sistem keuangan formal, sekaligus tetap menarik minat masyarakat yang kurang waspada. Untuk menanggulangi maraknya judi online, Friderica menyampaikan bahwa pihaknya telah memblokir sekitar 14 ribu rekening terindikasi terkait aktivitas judi online.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya terus memperketat penga-



nasabah baik pasif (dormant) maupun aktif memang bisa diblokir apabila terdapat indikasi tindak pidana yakni *suspicious transaction* dalam istilah PPATK atau *illegal activities* dalam istilah OJK.

Di tengah upaya memberantas judi online yang terus diperkuat, Dian juga mengatakan bahwa pemangku kepentingan tentunya akan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia. "Ini yang nanti kita lihat regulasi apa yang paling ideal. Tetapi kita memastikan terus, jangan sampai ada *loophole* lagi, kira-kira bagian-bagian mana yang harus kita coba *capture* untuk bisa memperbaiki pemberantasan judi online di masa

Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, masyarakat masih banyak yang tertipu oleh praktik judi online karena pelaku terus memperbarui modus operasinya dengan cara yang semakin canggih.

"Beberapa modus baru yang ditemukan antara lain penyamaran situs judol sebagai platform edukatif seperti situs dongeng anak-anak, penggunaan deposit pulsa untuk menyamarkan transaksi, hingga penyalahgunaan rekening dormant (tidak aktif) dan jasa *money changer* (penukaran uang) sebagai saluran pencucian uang," ujarnya di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

awasan terhadap transaksi mencurigakan, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). OJK juga terus mendorong literasi digital dan edukasi publik agar masyarakat lebih paham mengenai bahaya dan jebakan judi online.

"Upaya perlindungan ini bertujuan tidak hanya menghentikan aliran dana ke platform ilegal, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih kritis, cerdas secara finansial, dan tahan terhadap bujuk rayu perjudian daring," tandasnya. • Editor: GE

SETELAH 27 TAHUN REFORMASI

Gerakan Reformasi telah gagal mewujudkan cita-cita yang diusungnya karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru semakin marak di era reformasi.

Kondisi nasional hari ini adalah buah dari proses reformasi sistem politik di Tanah Air yang terjadi sejak Mei 1998. Era reformasi membawa tema menghapus masalah besar di Indonesia: KKN yang sebelumnya merajalela.

Namun, perkembangan yang ada menunjukkan, setelah 27 tahun era reformasi, KKN di Indonesia semakin meluas ke semua cabang kekuasaan negara. Mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, di pusat ataupun di daerah. Selain itu, di partai politik sebagai pilar sistem demokrasi serta di dunia usaha, baik BUMN, swasta, maupun koperasi.

Di lingkungan legislatif yang merupakan lembaga bagi para politisi dalam menciptakan aturan bermasyarakat dan bernegara, selama 2004-2023 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindak 344 anggotanya.

Baik itu DPR maupun DPRD. Bahkan ada ketua DPR yang dibloskan ke penjara karena kasus mark-up anggaran, mengatur tender proyek e-KTP.

Semua ada "ongkosnya"

Berembus kabar luas bahwa dalam menyusun berbagai undang-undang dan mengubah pasal dalam UU selalu ada "ongkos"-nya. Uang untuk kepentingan kelompok tertentu yang tidak kecil itu mengalir ke partai dan fraksi serta anggota dewan. Sementara proyek-proyek besar sudah dikavling-kavling sejak dalam proses penganggaran. Pemenangnya sudah ditentukan sebelum terselenggaranya tender.

Di lingkungan eksekutif tingkat nasional, hingga 2023, ada 38 kepala lembaga dan menteri yang kena penindakan KPK dalam kasus korupsi. Antara lain tiga menteri di era Megawati Soekarnoputri, lima menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan enam menteri di era Joko Widodo. Pejabat eselon I-IV yang terjerat pidana korupsi mencapai 363 orang.

Sementara di lingkungan eksekutif tingkat daerah, dalam kurun 2002-2023, KPK telah menangkap 23 gubernur/wakil gubernur, 151 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Di satu provinsi, Riau, pernah tiga gubernurnya berurutan terjerat kasus korupsi.

Mulai dari gubernur Riau periode 1998-2003 dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran. Penerusnya, gubernur Riau periode 2003-2013 tersandung kasus korupsi PON Riau dan perizinan kehutanan. Selanjutnya, gubernur Riau periode 2013-2018 terjaring OTT KPK atas kasus suap alih fungsi lahan.

Provinsi lain, Kalimantan Selatan menyumbang enam kepala



**OLEH: SISWONO YUDO HUSODO
KETUA PEMBINA YAYASAN
UNIVERSITAS PANCASILA**

daerahnya. Dua gubernur dan empat bupati dijerat kasus korupsi oleh KPK dan Kejaksaan Agung di kurun 2002-2024.

BPK adalah lembaga negara independen di bidang pengawasan. Tak terbayangkan pimpinan BPK yang tugasnya mengawasi keuangan negara menerima suap dari pejabat lembaga kementerian yang diperiksa Rp40 miliar. Ternyata belakangan diketahui, penetapan opini Wajar Tanpa Syarat (WTP) yang dikenakan pada instansi negara ada harganya. Sungguh luar biasa.

Ada anggota BPK ditangkap kejaksaan karena menerima suap dalam penanganan kasus BTS 4 G di Kominfo; orang yang harusnya mengawasi pelanggaran justru terlibat pelanggaran.

Di lingkungan eksekutif, kolusi yang berhubungan dengan korupsi meluas di pusat dan daerah. Setiap kali pergantian pejabat, ada rombongan baru yang dekat dengan pejabat yang baru. Dalam banyak kasus, kompetensi dan aturan diabaikan guna memuluskan upaya korupsi.

Korupsi ini bagaikan gunung es di laut, yang tertangkap sekitar 10 persen. Bagian terbesar tidak terbongkar karena tidak ketahuan atau karena kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dari lingkungan eksekutif juga ada masalah kebocoran yang ditengarai mencapai ratusan triliun tiap tahunnya. Praktik suap untuk kepentingan bisnis terhadap aparat negara cukup umum terjadi. Menurut catatan Indef, sebagian besar suap pengusaha masuk ke polisi (48 persen), bea cukai (41 persen), dan imigrasi (34 persen).

Kebocoran juga cukup besar di BUMN. Pembentukan Kementerian BUMN tidak berhasil memperbaiki performa BUMN dan korupsi tetap menjadi masalah besar yang menyebabkan kehancuran BUMN. Banyak BUMN yang merugi karena salah arus.

BUMN PT Timah Tbk, yang ketika semua usaha pertambangan timah di dunia sedang menikmati hasil yang baik, malah membukukan kerugian Rp450 miliar pada 2023. BUMN Garam yang di zaman Belanda adalah perusahaan garam terbesar di Asia dengan alat-alat modern di masa itu sudah puluhan tahun merugi terus. Porsinya dalam penyediaan garam nasional sangat kecil.

Garuda Indonesia, satu dari sedikit maskapai di dunia yang punya pasar domestik yang sangat besar, baru meraih untung sewaktu menjual pesawat bekas BUMN transportasi udara yang lain. Merpati bahkan sudah tutup.

BUMN Karya, umumnya dalam keadaan "Senin-Kamis". Ketika perusahaan-perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit untung besar, PTPN rugi terus. Perhutani adalah perusahaan kehutanan kayu jati terbesar di dunia, tetapi rugi terus.

Mengagetkan mendengar BUMN farmasi, Kimia Farma, melaporkan kerugian ketika semua industri farmasi dunia sedang bagus-bagusnya. Padahal, negara terus menyuntikkan modal yang tak kecil. Di sisi lain, gaji dan tantiem komisaris dan direksi sangat memadai.

Untuk lingkungan lembaga yudikatif, dalam kurun 15 tahun terakhir, KPK telah melakukan penindakan terhadap 31 hakim. Ada 11 jaksa yang terjerat kasus korupsi. Kejaksan selama ini menjalankan fungsi yudikatif, tetapi secara struktural berada di eksekutif karena bagian dari pemerintahan.

Ketua Mahkamah Konstitusi juga ada yang terjerat kasus korupsi. Publik juga dikejutkan dengan berita adanya pejabat di Mahkamah Agung terungkap menyimpan uang Rp1 triliun di rumahnya. KPK juga menangkap 19 pengacara. Belum lagi kasus-kasus di kepolisian, seperti kapolda yang kedapatan menjual narkoba yang sudah jadi barang sitaan.

Terus meluas

Uraian di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa wilayah korupsi di Indonesia terus meluas ke semua sektor kekuasaan negara. Dapat dikatakan gerakan reformasi telah gagal mewujudkan cita-cita yang diusungnya karena KKN justru semakin marak di era reformasi.

Keadaan ini tentu yang utama karena andil para pemimpin. Rakyat juga punya andil dari penyimpangan atas cita-cita itu karena berkembangnya demokrasi transaksional.

Kian meluasnya korupsi ini membuat sebagian kalangan menjadi skeptis dengan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi dengan melihat bahwa selama era reformasi, perekonomian nasional tetap terkendali dengan indikator-indikator yang relatif baik.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata 4-5 persen per tahun, cukup tinggi dalam ukuran dunia. PDB meningkat dari USD95 miliar di 1998 menjadi USD1,3 triliun di 2023. Pendapatan per kapita meningkat dari USD459,19 di 1998 menjadi USD4.960 pada 2024. Bayangkan kalau di Indonesia tak ada korupsi. Pemberantasan korupsi harus menjadi program prioritas Presiden Prabowo agar rakyat Indonesia bisa lebih cepat sejahtera.

Revisi sistem politik

Melihat pengalaman selama ini, pemberantasan korupsi sepertinya tak akan pernah efektif selama belum ada revisi atas sistem politik kita yang membuat demokrasi berkembang ke arah yang salah menjadi transaksional terbuka.

Yaitu, pemilu proporsional terbuka di pemilu legislatif dan pilkada langsung gubernur, bupati, dan wali kota. Juga pembiayaan partai yang tak transparan, serta UU tentang KPK dan hukuman yang tidak menjerakan bagi koruptor.

Inilah hulu masalah dari meluasnya korupsi di lingkungan legislatif dan eksekutif. Parpol adalah pilar sistem demokrasi. Pembiayaan partai di negara yang wilayahnya amat luas dengan

jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia ini sangat besar dan mahal, sehingga ikut mendorong korupsi para politisi untuk membiayai operasionalnya.

Di sisi lain, tuntutan untuk meraih kekuasaan dalam sistem politik elektoral proporsional terbuka yang ada sekarang bisa membuat partai tutup mata terhadap korupsi karena keperluan logistik kegiatan politik luar biasa besarnya.

Ada bupati yang masuk penjara karena kasus korupsi. Di pilkada berikutnya, istrinya maju sebagai calon dengan dukungan koalisi parpol dan dapat memenangi pemilihan karena memiliki logistik sangat besar yang diduga dari hasil korupsi suaminya.

Diceritakan oleh banyak caleg terpilih DPR, untuk bisa menang harus punya logistik minimal Rp10 miliar, yang tentu setelah terpilih akan cari jalan untuk pengembaliannya. Ada politisi koruptor, keluar penjara jadi pimpinan partai, yang berarti ikut mewarnai kebijakan negara. Tak ada lagi sanksi sosial bagi para koruptor.

Praktik korupsi tumbuh subur akibat sistem politik transaksional dan berbiaya tinggi. Akibatnya, lembaga kekuasaan politik jadi sarana merampok kekayaan negara dan publik.

Sebagai suatu bangsa, kita perlu introspeksi atas kian maraknya korupsi ini dan mengambil langkah-langkah efektif, terutama melalui pendidikan di sekolah, sejak PAUD, dan juga di setiap keluarga agar sebagai suatu bangsa kita menjadikan kejujuran dan asas kepatutan sebagai suatu nilai luhur. Dalam setiap penempatan jabatan, kejujuran dan kepatutan

juga harus jadi syarat utama.

Diperlukan hadirnya peraturan perundangan yang memberi hukuman sangat berat hingga hukuman mati kepada koruptor untuk membuat efek jera, serta KPK yang benar-benar independen.

Diharapkan Presiden Prabowo membuat legasi, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, terutama harus dimulai dari lingkungan aparat penegak hukum. Seluruh instansi penegak hukum harus bersih lebih dulu karena tak mungkin membersihkan ruangan kotor dengan sapu yang kotor.

Saya yakin tak sedikit yang berbakat untuk mendekati integritas mantan Kapolri Hoegeng di kepolisian. Tak sedikit di kejaksaan yang mendekati integritas mantan Jaksa Agung Burhanuddin Lopa. Demikian juga di lingkungan MA, ada hakim-hakim yang jujur.

Presiden Prabowo dapat menugaskan yang terbaik, berintegritas, jujur, dan amanah memimpin di instansi kepolisian, kejaksaan dan MA, untuk membersihkan jajaran institusi masing-masing dan dimulai dari atas. Semoga. ●





PROGRAM UNGGULAN HERMAN DERU RAIH APRESIASI TINGGI

Berbagai program unggulan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mendapat apresiasi karena menyentuh langsung masyarakat kecil. Atas terobosan yang dilakukan tersebut Konsulat Amerika Serikat untuk Sumatera Selatan, Mr. Bernard Uadan, mengapresiasi program kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang yang dinilai berdampak langsung kepada rakyat.

"Kami sangat mengapresiasi program Pak Gubernur. Ini luar biasa karena langsung menyentuh masyarakat," ujar Bernard Uadan didampingi Wakil Konsul Politik dan Ekonomi, Suraj Mungara, saat melakukan silaturahmi sekaligus mendengarkan paparan program prioritas dan tantangan pembangunan dari Gubernur Herman Deru di Ruang Tamu Gubernur Sumsel.

Selain itu, Bernard juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Sumsel terkait Gerakan Sum-sel Mandiri Pangan (GSMP) dan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 98 persen.

Menurutnya, capaian tersebut men-

unjukkan komitmen nyata Pemprov Sumsel dalam memberikan perlindungan kesehatan dan meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Ia juga menanggapi positif informasi terkait persoalan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang disampaikan Gubernur. Bernard menyebut, pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah pusat di Jakarta.

"Terkait informasi illegal drilling, saya sangat mengapresiasi penjelasan Pak Gubernur. Kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan semoga Sumsel semakin maju. Saya berharap kedepan kita bisa menghasilkan manfaat lebih besar untuk Sumsel," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Herman Deru memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Sumsel, antara lain GSMP, UHC, program pencetakan 100.000 wirausahawan muda atau Sultan Muda, pembangunan Pelabuhan Samudera, pengembangan wisata kesehatan (health tourism), serta penanganan persoalan pengeboran minyak ilegal.

Pada kesempatan itu, Herman Deru menegaskan bahwa di periode keduanya sebagai gubernur, ia menargetkan pembentukan 100.000 pengusaha muda di Sumsel.

"Di periode kedua ini, saya menargetkan membentuk 100.000 Sultan Muda. Tapi tentu ini tidak mudah karena kebanyakan masyarakat kita masih

lebih memilih menjadi pekerja dibanding berwirausaha. Ini yang perlu diubah dari segi mindset," ujarnya.

Terkait pembangunan Pelabuhan Samudera, Herman Deru menyampaikan bahwa langkah tersebut penting untuk mendukung perekonomian Sumsel yang kaya akan komoditas seperti kopi, sawit, karet, dan padi.

"Luas Sumsel sekitar tiga kali lipat Jawa Barat, tapi belum memiliki pelabuhan samudera. Ini yang sedang saya perjuangkan, karena pelabuhan akan memangkas biaya distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani," jelasnya.

Di sektor kesehatan, ia menyampaikan visinya menjadikan Sumsel sebagai destinasi wisata kesehatan (health tourism) agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat.

"Saya bercita-cita Sumsel menjadi tempat wisata kesehatan. Saat ini, setiap rumah sakit di Sumsel diarahkan memiliki layanan spesialis masing-masing. Jika memungkinkan, kami membuka peluang kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, untuk pembangunan rumah sakit di sini," tuturnya.

Di akhir pertemuan, Herman Deru berharap audiensi tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan di Sumsel dan membuka jalan bagi masuknya investasi asing.

"Harapan saya, hasil pertemuan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat dan kementerian terkait, sekaligus menjadi jembatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumsel," tuturnya.

Apresiasi Langkah Strategis Pemprov

Pujian dan apresiasi juga diberikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sukawinatan, Sukabangun.

Tinjauan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi dan kinerja TPA, serta membahas strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif di wilayah Sumatera Selatan.

Hanif mengungkapkan, TPA Sukawinatan menerima timbunan sampah hingga 1.200 ton per hari—angka yang tergolong besar untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkot Palembang yang menaikkan alokasi anggaran penanganan sampah dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi Rp17 miliar.

"Ini langkah ambisius dari Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dalam penanganan sampah," ujarnya.

Hanif menegaskan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan berbasis sumber, di mana pihak yang menghasilkan sampah juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya.

"Pengelolaan sampah tak bisa terus menjadi beban pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi," tambahnya.

Ke depan, Hanif menyebut pihaknya akan merancang solusi penanganan sampah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 melalui Rencana Pembangunan Jangka

Nasional (RPJN). Salah satunya dengan membangun Material Recovery Facility (MRF), yakni fasilitas daur ulang yang menggabungkan berbagai teknik pengolahan seperti pemilahan, 3R (reduce, reuse, recycle), dan komposting.

"Tadi sudah dihitung oleh Pak Gubernur jumlah yang harus disiapkan. Targetnya tahun ini kita kejar agar mencapai 51,2 persen," jelasnya.

Ia juga berharap kepala daerah, termasuk gubernur dan wali kota, turut mendukung desain kebijakan ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

Hanif menambahkan, ke depan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebaiknya dikelola secara entrepreneurship, bukan sepenuhnya ditangani pemerintah daerah, guna menciptakan nilai ekonomi dari sampah. •ADV



OPINI WTP 11 KALI BERUNTUN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir.

Opini WTP disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov Sumsel.

"Alhamdulillah hari ini kita menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024, yang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya. Terima kasih atas capaian ini. Ini adalah hasil kerja seluruh perangkat, termasuk dukungan dari legislatif," ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam sambutannya.

Herman Deru menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif jajaran Pemprov Sumsel dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

"Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi simbol kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkomitmen menjadikan Sumsel lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

"Laporan keuangan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung program-program strategis, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelayanan publik yang berkualitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumsel selalu ber-

pedoman pada regulasi yang berlaku dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

"Kami memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai prinsip

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas," terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral



dalam menjalankan amanah rakyat.

“Rekomendasi dari BPK dalam laporan ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan standar tata kelola keuangan dan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin BPK setiap tahun atau awal semester I.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024,” jelasnya.

Ia pun memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Sumsel dalam mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.

“Ini adalah pencapaian luar biasa. Kami harap dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi

Sementara mempertahankan status WTP ini Pemprov Sumsel mendukung penuh terhadap implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah.

“Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah merupakan area strategis yang sangat rentan terhadap penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Untuk itu, kami mendukung penuh program MCSP yang diinisiasi oleh KPK,” ujar Sekda Edward Chandra saat mengikuti rapat koordinasi (Rakor) virtual Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Edward menambahkan, pencegahan korupsi memerlukan komitmen



dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini harus dibarengi dengan pembangunan sistem yang andal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

“Pengelolaan pengadaan barang dan jasa mencakup tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Ini menjadi fondasi pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel harus ditegakkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dari perencanaan hingga penghapusan aset perlu menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan nilai ekonomis, serta menjamin

kepastian nilai.

“Paradigma baru pengelolaan barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari aset tersebut,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Edward menyampaikan apresiasi atas inisiasi KPK menyelenggarakan rapat koordinasi ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Edward menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk menjadi penyelenggara pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Untuk itu, kami memohon kepada KPK agar terus memberikan arahan, pendampingan, dan pembinaan dalam upaya pencegahan korupsi,” pungkasnya. ● ADV



RESMIKAN 3.077 PPPK TAHAP I

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, meresmikan sebanyak 3.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Peresmian dilakukan di The Sultan Convention Center Palembang.

Pengangkatan PPPK tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 6070/KPTS/BKD.1/2025. Dalam surat tersebut ditetapkan bahwa para pegawai mulai diangkat secara resmi terhitung sejak 1 Mei 2025.

Pada kesempatan itu, Gubernur Herman Deru secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada dua perwakilan PPPK. Masing-masing adalah pegawai tertua berusia 57 tahun 4 bulan dan pegawai termuda berusia 24 tahun.

Gubernur menyampaikan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian dan penguatan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumsel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel,

H. Edward Candra, dalam laporannya menjelaskan rincian formasi PPPK yang diresmikan. Dari total 3.077 pegawai, terdapat 56 tenaga buruh, 117 tenaga kesehatan, dan 2.804 tenaga teknis.

Edward juga mengungkapkan bahwa dengan pengangkatan tahap I ini, jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel kini mencapai 11.170 orang. Sebelumnya, jumlah PPPK tercatat sebanyak 8.095 orang.

Selain pengangkatan tahap I, proses seleksi PPPK tahap II untuk 2.998 formasi saat ini sedang diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Provinsi Sumsel juga masih memiliki 4.208 pelamar dari kategori R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi.

PPPK tertua yang dilantik adalah Ibrahim dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Litbangda) Provinsi Sumsel, yang lahir pada tahun 1967. Ia menjadi simbol dedikasi panjang dalam pengabdian kepada negara.

Sementara itu, PPPK termuda adalah Yurinda Fidayanti kelahiran 2001 yang bertugas sebagai tenaga administrasi di SMAN 1 Sembawa, Provinsi Sumsel. Kehadirannya mencerminkan semangat baru dalam membangun birokrasi yang lebih segar dan responsif.

Harus Inovatif, Bertanggung Jawab, dan Paham Hirarki

Herman Deru menegaskan pentingnya sikap inovatif dan pemahaman terhadap hirarki bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam menjalankan tugas.

Gubernur menekankan empat

point utama yang harus dimiliki setiap PPPK, yakni rasa syukur, pemahaman terhadap hirarki, rasa tanggung jawab, dan jiwa inovatif. Keempat hal tersebut dinilai sebagai pondasi penting dalam membentuk ASN yang profesional.

"Sebagai ASN, kalian harus tahu medan kerja, memahami hirarki jabatan dan golongan, serta memiliki tanggung jawab karena kita adalah pelayan masyarakat yang dituntut bekerja cepat dan tepat," ujar Herman Deru di hadapan ribuan PPPK yang dilantik.

Ia juga mengingatkan agar para PPPK tetap rendah hati dan tidak bersikap arogan usai dilantik. Menurutnya, masih banyak calon PPPK lain yang menantikan kepastian status kepegawaianya.

"Saya minta kalian tetap rendah hati, karena masih ada ribuan rekan kalian yang belum mendapat formasi. Jangan merasa lebih dari yang lain," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan harapannya agar para PPPK dapat menjadi motor penggerak perubahan birokrasi menuju arah yang lebih efisien, profesional, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Upayakan Skema Pensiun

Gubernur Herman Deru mengungkapkan Pemerintah Provinsi tengah mengupayakan skema dana pensiun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Taspen.

Ia menyebutkan bahwa kehadiran PT Taspen dalam kegiatan itu merupakan bagian dari langkah koordinasi yang sedang dijalin untuk membahas skema dana pensiun bagi PPPK.

"Saya sudah berbicara dengan PT Taspen bagaimana agar PPPK juga bisa mendapatkan uang pensiun. Ini sedang diupayakan dan diformulasikan skemanya," ujar Herman Deru dalam sambutannya.

Menurutnya, meskipun status PPPK berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pegawai tetap, namun mereka tetap berhak

mendapatkan perhatian dan jaminan kesejahteraan jangka panjang.

Ia menambahkan bahwa skema pensiun tersebut penting sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dan pengabdian para PPPK yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Selain itu, Herman Deru juga mene-

kankan pentingnya inovasi dari setiap individu PPPK. Ia meminta agar mereka tidak sekadar menjalankan tugas, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif melalui ide-ide baru.

"Jangan asal bekerja. Setiap individu PPPK harus menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik," tegasnya.

• ADV



GARDA DEPAN EKONOMI RAKYAT

Sumatera Selatan siap menjadi garda terdepan ekonomi rakyat di Indonesia melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Tekad ini tercermin dari peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih desa/kelurahan se-Sumsel yang dihadiri tiga menteri sekaligus.

Kegiatan tersebut digelar oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Gubernur Herman Deru mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan merupakan solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sumsel sangat siap menjalankan misi besar ini agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Saya sepakat jika kepala desa atau lurah menjadi ketua badan pengawas koperasi, terutama bila berasal dari putra daerah," ujarnya.

Ia berharap kehadiran koperasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta soko guru perekonomian nasional.

Deru juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas diluncurkannya program ini di Sumsel. Dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, sebanyak 2.965 atau sekitar 91% telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus), dan 1.822 desa telah membentuk koperasi.

Adapun daerah yang telah 100% membentuk koperasi Merah Putih antara lain Kabupaten PALI, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Muara Enim.

Sementara itu, beberapa daerah lainnya masih dalam proses, seperti Kabupaten Lahat (92%), Empat Lawang (90%), Banyuasin (78%), OKU Selatan (66%), Pagaralam (54%), dan OKU (54%).

Gubernur juga menyampaikan bahwa Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih telah dibentuk berdasarkan Inpres dan Keppres.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dana pinjaman sebesar Rp3 miliar yang akan diberikan ke koperasi agar tidak disalahgunakan.

"Setiap desa nantinya akan memiliki agen elpiji, penyewaan alsintan, hingga agen sembako dengan harga grosir. Maka kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana," tegasnya.

9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Zulkifli juga menjabarkan struktur Satgas di tingkat provinsi, yaitu Gubernur sebagai ketua, Sekda sebagai wakil ketua, kepala OPD koperasi sebagai sekretaris, dan pejabat pratama bidang koperasi sebagai anggota.

Unit usaha koperasi Merah Putih meliputi kantor koperasi, agen sembako, simpan pinjam elektronik, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen pupuk, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin,



Sementara itu, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan kini menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp250 triliun untuk koperasi Merah Putih, Rp300 triliun untuk KUR, dan Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis," jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa beras dan jagung saat ini mengalami surplus. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.

Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Keppres Nomor

logistik desa (bekerja sama dengan PT Pos), hingga agen perbankan (BNI/BRILink).

"Plafon yang diberikan untuk masing-masing koperasi adalah sebesar Rp3 miliar. Hingga kini, sudah lebih dari 52 ribu desa yang menyelenggarakan musdessus," ungkap Zulkifli.

Acara peluncuran juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, serta kepala desa se-Sumsel.

Tinjau Pembentukan Koperasi Merah Putih

Sebelumnya Gubernur H. Herman Deru mendampingi tiga menteri Kabinet

Merah Putih kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah desa dan kelurahan.

“Koperasi ini dibentuk dengan pendekatan berbasis usaha, bukan pembagian dana hibah. Plafon pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan usaha, maksimal hingga Rp3 miliar,” jelas Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan.

Ia menyebutkan, sejumlah unit usaha koperasi yang dirancang antara lain agen pupuk, pangkalan LPG, warung sembako, layanan BRILink, serta kolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bulog untuk penyaluran bantuan sosial dan logistik. Suku bunga pinjaman saat ini sebesar 3 persen, namun pemerintah sedang mengupayakan agar dapat ditekan hingga 0 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas pengurus koperasi dalam menjalankan roda organisasi. Ia juga mengapresiasi semangat warga Talang Keramat dalam menggali potensi lokal seperti perikanan dan tambak.

“Silakan disepakati melalui rapat anggota unit usaha apa yang akan dikembangkan. Biaya akta notaris bisa dibantu melalui APBD sekitar Rp2,5 juta. Namun perlu diingat, setiap pinjaman harus diperhitungkan secara matang agar benar-benar bermanfaat bagi anggota,” tegas Bima Arya.

Mengakhiri sambutannya, Wamenagri mengingatkan agar seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan dan terus berkomitmen menghadapi tantangan

Kawal Legalitas Koperasi Merah Putih

Gubernur Herman Deru juga meminta Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Selatan untuk mendukung proses hukum dan administrasi terkait pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Sumsel.

Permintaan tersebut disampaikan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan.

“Para notaris adalah bagian penting dari anatomi pemerintahan Sumatera Selatan. Karena itu, INI Sumsel diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi aspek hukum dan administrasi pembentukan Koperasi Merah Putih agar prosesnya berjalan lancar dan efektif,” ujar Herman Deru saat membuka kegiatan Upgrading dan Konferensi Wilayah (Konferwil) INI.

Gubernur juga menghimbau agar para notaris terus mengikuti perkembangan

bentuk di Sumsel, karena pada 12 Juli mendatang, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan Koperasi Merah Putih bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa notaris memiliki peran penting dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menjaga daerah tetap kondusif dan bebas konflik.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada ketua dan pengurus INI Sumsel periode sebelumnya atas kerja sama dan kontribusi mereka. Ia mengungkapkan



zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan. Ia mengingatkan agar organisasi maupun kantor notaris tidak berjalan secara autopilot.

“Apalagi saat ini kita sedang gencar membentuk Koperasi Merah Putih. Awal Juni, seluruh koperasi sudah harus ter-

bahwa organisasi tidak akan berjalan baik jika dikelola secara autopilot. •

“Melalui Konferwil ini, saatnya memilih ketua baru. Saya berharap proses pemilihan berjalan damai, tanpa konflik maupun gugatan internal organisasi,” ujarnya. •

TINGKATKAN SEMANGAT BERKURBAN DAN SILATURAHMI

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur (Wagub) H. Cik Ujang melaksanakan Shalat Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi berjamaah dengan masyarakat di Halaman Griya Agung, Palembang, Jumat (6/6/2025).

Gubernur Herman Deru mengumandangkan takbir seraya mengajak seluruh umat muslim untuk memaknai Idul Adha sebagai momen mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd," ujar Herman Deru mengawali sambutan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Shalat Idul Adha di Griya Agung dilakukan agar lebih efisien mengingat bertepatan dengan hari Jumat. Selain itu, momen tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Sumsel.

"Kita manfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi. Setelah shalat, masyarakat bisa langsung berkumpul bersama keluarga masing-masing," ujarnya.

Herman Deru juga menyampaikan doa dan harapan bagi para jamaah haji asal Sumsel dan Indonesia yang tengah menjalankan rukun haji di Tanah Suci. Ia berharap para jamaah diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam

menjalankan ibadah.

"Saudara-saudari kita yang sedang berhaji di Tanah Suci, mari kita doakan bersama agar mereka senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadahnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban pada tahun ini menunjukkan tren positif. Hal ini, menurutnya, menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk saling berbagi, sekaligus menjadi tolok ukur membaiknya kondisi ekonomi.

"Qurban adalah bentuk kepedulian dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Semangat berbagi ini harus terus kita pupuk agar kesenjangan sosial semakin menyempit," tegasnya.

Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Provinsi Sumsel, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H. Minal aidin wal faidzin, mohon



maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Sementara itu, dalam khotbah yang disampaikan oleh Dr. H. Abdul Kher, umat Islam diajak untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mengambil hikmah dari perjuangan para jamaah haji.

“Di saat jutaan umat Islam berkumpul di Arafah dan Muzdalifah, kita di sini turut merasakan semangat pengorbanan dan ketulusan. Idul Adha adalah momen spiritual yang harus dimaknai dengan ibadah dan kepedulian,” ujarnya.

Ia menambahkan, ibadah qurban bukan hanya sekedar ritual tahunan, melainkan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang harus dilandasi keikhlasan dan dilakukan secara konsisten. “Amal saleh, termasuk berkorban, sebaiknya dilakukan tanpa menunda dan harus menjadi bagian dari keseharian kita,” pungkasnya.

Tinjau Pemetongan Hewan Kurban

Usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Darussalam, Komplek Perumahan Sukabangun Indah 3, Palembang dan open house Gubernur Herman Deru langsung melanjutkan agenda dengan meninjau pelaksanaan pemetongan hewan kurban di sejumlah lokasi di Kota Palembang.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap jalannya ibadah kurban di tengah masyarakat.

Peninjauan dilakukan di beberapa masjid besar, seperti Masjid Agung Jayo Wikramo di Jalan Jenderal Sudirman, Masjid Baiturrahman Dharma Wanita di Jalan Radial, serta Masjid Raya Taqwa yang terletak di Jalan Telaga, kawasan Bukit Kecil.

Dalam kunjungannya, Gubernur disambut hangat oleh para pengurus masjid dan panitia kurban. Ia tampak berdialog langsung dengan masyarakat dan memastikan proses pemetongan berjalan sesuai syariat Islam.

Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Qurban yang telah bekerja keras demi kelancaran pelaksanaan ibadah kurban tahunan ini.

Ia menilai, tertibnya kegiatan pemetongan hewan menjadi cerminan budaya gotong royong masyarakat Sum-

sel.

Ia juga berharap agar pendistribusian daging Qurban dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Menurutnya, semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha harus menjadi momen-

tum memperkuat solidaritas sosial.

“Semoga daging qurban ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini bukan sekedar ritual, tapi juga bentuk nyata kepedulian kita kepada sesama,” ujar Herman Deru. ●





AMBIL PELUANG DI IKN

Akhir 2025 akan menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia, khususnya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan proyek-proyek strategis IKN.

Wapres Gibran tiba di Bandara IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara pada Rabu, 28 Mei 2025, tepat pukul 14.09 WITA. Kunjungan kerja Wapres Gibran yang pertama kali ke IKN ini untuk meninjau berbagai proyek infrastruktur strategis di kawasan ibu kota baru negara Indonesia, pengganti DKI Jakarta.

Setibanya di Bandara IKN, Wapres Gibran didampingi Rudy Mas'ud dan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan jalan tol KM 58 menuju KIPP di IKN. Berlanjut kunjungan ke RS Abdi Waluyo serta Universitas Guna Dharma, dan berakhir meninjau proyek ASN Tower.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Republik Indonesia," kata Rudy.

Sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto segera berkantor di IKN pada tahun 2028, seiring rampungnya pembangunan kawasan IKN.

Rudy menyebut, di antara proyek-proyek IKN yang akan rampung di akhir tahun ini adalah pembangunan Istana Wakil Presiden untuk tahap I.

"Rumah Wapres (Istana Wapres), kantor dan fasilitas lainnya selesai di Desember ini," kata Rudy saat mengunjungi Tower ASN IKN.

Istana Wapres berkonsep Huma Betang Umai atau Rumah Panjang Ibu (bahasa Dayak), memiliki luas lahan 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi senilai Rp1,457 triliun.

"Kacanya sudah akan dipasang. Hampir rampung. Ka-

canya anti peluru," jelas Rudy setengah bercanda.

Fasilitas IKN lainnya yang akan rampung di akhir 2025 ini adalah jalan tol dan rumah sakit, gedung legislatif, dan kantor OIKN.

"Tahun ini akan banyak kejutan di IKN," ujar Harum.

Harum, sapaan Rudy, berharap penyelesaian pembangunan Istana Wapres akan memacu percepatan pembangunan fasilitas IKN lainnya.

"Insya Allah, dua tahun ke depan IKN sudah siap dan Bapak Presiden Prabowo tahun 2028 bisa berkantor di sini," kata Harum.

K e m - b a n g - k a n U s a h a

**H a r -
u m** menyatakan, pengembangan IKN terus berlangsung hingga saat ini di Benua Etam. Untuk itu, **P e m -**

prov Kaltim mengajak seluruh pengembang properti atau perumahan, khususnya yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, agar turut serta mengembangkan usahanya, sehingga turut juga berdampak pada pembangunan IKN.

Harum menjelaskan, melalui pengembangan pembangunan IKN saat ini, diharapkan dapat menguji atau menantang seluruh pengusaha atau entrepreneur untuk menjadikan kesempatan emas dalam mengembangkan usaha pembangunan perumahan di Kaltim.

"Menurut hemat saya, ini kesempatan bagi entrepreneur di Kaltim, terutama pengusaha perumahan atau properti yang tergabung di REI dapat mengembangkan usaha di Kaltim.

Karena itu, pemprov meminta dan mengajak semua pengembang properti turut mendukung pengembangan pembangunan di daerah, dengan harapan IKN juga bisa maju," pesan Harum saat memberikan arahan kepada ratusan pengusaha properti yang tergabung di REI di Odah Etam Kantor Gubernur



Kaltim, 23 Mei 2025.

Apalagi, sambung Harum, Presiden Prabowo Subianto sudah menjelaskan, ke depan pusat pemerintahan juga diarahkan ke IKN. Bahkan, saat ini pengembangan IKN sedang pada proses pembangunan infrastruktur eksekutif dan yudikatif.

Harum juga menyarankan agar para pengusaha bisa menginap di IKN. Apalagi, akses menuju IKN juga tidak terlalu jauh, baik dari Balikpapan

Menurut Harum, ke depan Kaltim terus berupaya membangun infrastruktur dasar yang memadai. Tak terkecuali terhadap konektivitas antara kabupaten dan kota se Kaltim dengan IKN.

"Jadi, prinsipnya jika para pengusaha turut membangun di Kaltim, maka kemudahan banyak didapatkan, khususnya fasilitas yang diperlukan para pengusaha," pesannya.

Harum juga berharap, berkembangnya IKN mampu mendorong per-

Harum.

Peluang usaha di IKN, menurut Harum, wajib ditangkap karena pengembangan IKN telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

"Saya menyarankan para pengusaha menginap semalam di IKN agar mengetahui keindahan IKN," ujarnya.

Harum juga menyarankan, jika para pengusaha ingin ke IKN agar melewati Jembatan Pulau Balang. Karena saat ini Jembatan Pulau Balang sudah



maupun dari Samboja, Tenggarong, hingga Jembatan Pulau Balang.

"Yang jelas Kaltim memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Begitu juga Otorita IKN berupaya memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi.

Selanjutnya, harapan saya, ketika Pemprov Kaltim siap membangun sejumlah infrastruktur di daerah, masa anggota REI tak mendukung," ujar Harum.



tumbuhan ekonomi Benua Etam. Pengembangan IKN pun diharapkan didukung penuh seluruh pihak, tak terkecuali para pengusaha Kaltim.

"Kaltim merupakan etalase Indonesia.

Kenapa demikian, karena di Kaltim ada Ibu Kota Nusantara. Karena itu, inilah kesempatan para pengusaha untuk mengambil kesempatan dan menangkap peluang di IKN," ungkap

terkoneksi dengan baik.

"Jadi, kalau kita melintasi Jembatan Pulau Balang menuju jantung IKN, kira-kira kalau kita jalan seperti di Francisco," ungkapnya.

Hingga saat ini Pemprov Kaltim terus mendukung pembangunan IKN, dengan harapan pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kaltim.

"Yakinlah, IKN dilengkapi infrastruktur yang memadai. Mulai jalan tol, jembatan dan bandara. Apalagi, akses IKN juga didukung tiga bandara, yakni Bandara di Balikpapan, Samarinda juga IKN," tegasnya. ●

KONTROVERSI DEDI MULYADI MASUK SEKOLAH 6.30 PAGI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi mengumumkan kebijakan baru terkait jam masuk sekolah. Mulai tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai Juli mendatang, seluruh jenjang pendidikan di Jawa Barat akan memulai kegiatan belajar mengajar lebih awal, yaitu pukul 06.30 WIB.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/Disdik, yang ditandatangani Gubernur Dedi Mulyadi pada 28 Mei 2025.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, serta mendukung pembentukan karakter siswa berlandaskan nilai-nilai Pancasila Waluya: CagEUR (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).

Kebijakan jam masuk pukul 06.30 WIB berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain mengatur waktu masuk, surat edaran tersebut juga merinci penggunaan waktu siswa di luar sekolah. Setelah jam pulang sekolah, siswa diimbau memanfaatkan waktu hingga pukul 17.30 WIB untuk kegiatan produktif seperti membantu orang tua, aktivitas sosial, keagamaan, serta pengembangan minat dan bakat.

Selanjutnya, dari pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, siswa dianjurkan fokus pada kegiatan keagamaan dan belajar di rumah. Untuk hari Sabtu dan Minggu, Pemprov mendorong pelibatan keluarga dalam pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan orang tua atau wali.

"Saya sampaikan bahwa di tahun ajaran baru 2025/2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimu-

lai pukul 06.30," ujar Gubernur Dedi Mulyadi melalui akun media sosial resminya @dedimulyadi71 pada Rabu 4 Juni 2025.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB akan diserahkan pelaksanaannya kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing satuan pendidikan.

"Yang penting standarnya pukul 06.30 WIB. Nantinya, teknis penerapannya akan diatur oleh kepala UPT masing-masing sekolah," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi geografis dan distribusi wilayah sekolah. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan ini agar sesuai



dengan karakteristik daerah masing-masing.

"Kita akan lihat berdasarkan kondisi dan distribusi wilayah. Gubernur menetapkan ketentuan umum, selanjutnya kepala UPT menyusun ketentuan khusus sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mencontohkan bahwa di daerah pegunungan, jarak antara permukiman dengan sekolah jenjang SD dan SMP biasanya relatif dekat. Namun, untuk tingkat SMA bisa berbeda, tergantung kondisi wilayah.

"Kultur wilayah sangat mempengaruhi. Di pegunungan, ke SD atau SMP biasanya lebih dekat. Kalau ke SMA bisa lebih jauh, itu nanti dihitung dan disesuaikan," tambah Dedi.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada regulasi nasional yang berlaku.

"Sudah ada ketentuan dari kementerian tentang durasi dan hari sekolah. Kami harap semua pihak mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan secara nasional," kata Mu'ti.

Senada, Ketua Komisi X DPR RI,

Hetifah Sjaifudian, meminta agar Pemprov Jabar mengevaluasi potensi dampak negatif dari kebijakan ini.

"Kalau sebagai uji coba tidak masalah, tetapi mohon dicermati dan dievaluasi. Jangan sampai mudaratnya lebih besar dari manfaatnya," ujar Hetifah.

Sementara Dewan Kehormatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen pendidikan.

"Butuh kesiapan orang tua, guru, sekolah, siswa, bahkan transportasi publik. Semuanya harus disiapkan sebelum diterapkan," jelasnya.

Heru mencontohkan bagaimana Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melakukan kajian akademik, survei publik, dan sosialisasi sebelum merumuskan kebijakan serupa.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Cecep Darmawan menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah sesuatu yang bermasalah secara prinsip.

"Ini hanya soal perubahan kebiasaan. Justru bagus karena pagi hari adalah waktu optimal untuk menyerap pelajaran. Pemerintah kabupaten/kota juga harus siap, karena SD dan SMP adalah kewenangan mereka," ujarnya. •





3.229 KOPERASI MERAH PUTIH SUDAH SAH DI JAWA TIMUR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui koordinasi intensif dengan Kanwil Kemenkumham Jatim, Pemkot/Pemkab se-Jatim, serta Ikatan Notaris Indonesia.

Hingga 2 Juni 2025, sebanyak 8.459 dari 8.494 desa/kelurahan (99,59%) telah menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, sebanyak 3.299 koperasi di Jawa Timur telah resmi memperoleh SK pengesahan.

Jumlah ini mewakili 24,13 persen dari total nasional 13.669 koperasi yang telah disahkan menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi se-Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar

Parawansa, yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, tetap memantau langsung perkembangan program prioritas seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Rumah MBR.

Ia optimistis pembentukan koperasi di seluruh desa/kelurahan akan rampung sebelum 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

"Alhamdulillah, capaian Jatim hingga 2 Juni adalah yang tertinggi secara nasional. Kami menargetkan seluruh desa dan kelurahan memiliki koperasi berbadan hukum sebagai motor penggerak ekonomi lokal," ujar Khofifah.

Jawa Timur melampaui provinsi lain dalam hal pengesahan koperasi, seperti Jawa Tengah (1.828 koperasi), Aceh (897 koperasi), dan Jawa Barat (867 koperasi).

Empat daerah tercatat telah mencapai 100 persen pengesahan koperasi: Kabupaten Nganjuk (27 Mei), Ponorogo (30 Mei), Sidoarjo (1 Juni), dan Kota Mojokerto.

"Capaian ini hasil kerja keras seluruh pihak Pemkab/Pemkot, Kanwil Kemenkumham Jatim, dan para notaris. Kami akan memberikan pendampingan menyeluruh untuk penguatan kelembagaan, manajerial, hingga digitalisasi



koperasi," tambahnya.

Langkah percepatan dilakukan melalui fasilitasi pemberkasan bersama dan penandatanganan akta antara pengurus koperasi dan notaris.

KPP Pratama di daerah juga mendukung proses pembuatan NPWP pengurus sebagai syarat pemilik manfaat (BO).

Setelah koperasi resmi berbadan hukum, Dinas Koperasi dan UKM Jatim bersama Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP akan mendampingi proses penyusunan model bisnis koperasi.

Khoffah juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah membuka peluang pembiayaan akta notaris KDKMP melalui dana BTT, sesuai SE Kemendagri No. 500.3/2438/SJ. Ia mendorong Pemkab/Pemkot menggunakan APBD untuk mendukung pembentukan badan hukum koperasi.

Melalui Sekdaprov Jatim Adhy Karsono, jumlah fasilitasi akta koperasi ditingkatkan dari 1.600 menjadi 3.000 akta sebagai bentuk komitmen penuh percepatan program KDKMP di Jawa Timur.

Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menyatakan,

akselerasi Khoffah terhadap KMP di Jatim merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi.

Menurutnya, Khoffah berupaya agar geliat ekonomi tidak hanya dirasakan masyarakat menengah ke atas.

"Ibu Khoffah melihat program ini sebagai langkah positif dalam mengalihkan perputaran ekonomi yang selama ini terpusat di atas agar bisa dinikmati masyarakat lapisan bawah secara lebih merata," tutur Gigih.

Oleh sebab itu, Gigih menilai, dengan Jatim menjadi provinsi pengesahan KMP terbanyak di Tanah Air, hal itu menunjukkan kerja nyata Khoffah.

Ia juga menilai, komitmen Khoffah membawa Jatim selalu unggul dari provinsi lain, termasuk dengan program pemerintah pusat yakni KMP.

"Melalui pencapaian ini, Khoffah ingin menjadikan Jawa Timur sebagai contoh keberhasilan KMP di tingkat nasional," ujar Gigih. •



100 HARI KERJA BOBBY NASUTION FOKUS 5 PROGRAM PRIORITAS

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama Wakil Gubernur Surya, telah resmi menyelesaikan 100 hari masa kerja mereka sejak dilantik.

Meskipun tidak merancang program khusus untuk periode 100 hari pertama, Bobby menegaskan bahwa sejumlah kebijakan dan program strategis sudah mulai dijalankan dan menunjukkan arah yang sesuai dengan visi pemerintahan mereka.

Bobby Nasution menyatakan bahwa pendekatan yang diambil oleh pemerintahannya tidak terfokus pada pencapaian jangka pendek semata, melainkan pada fondasi program jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan.

"Kami tidak membuat program kerja khusus hanya untuk 100 hari. Fokus kami adalah memastikan bahwa program-program besar yang dirancang benar-benar berjalan sesuai jalurnya (on the track). Dari evaluasi awal ini, Alhamdulillah, sebagian besar sudah on the track dan tinggal penyempurnaan ke depan," ujar Bobby.

Salah satu gebrakan yang sedang dipersiapkan adalah reformasi sistem pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Bobby mengusulkan perubahan waktu belajar menjadi hanya lima hari dalam sepekan, yakni dari Senin hingga Jumat. Langkah ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2025–2026.

"Hari Sabtu akan diliburkan bagi seluruh siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Ini untuk memberikan waktu lebih kepada siswa agar bisa berkegiatan bersama keluarga. Peran orangtua sangat penting, teru-



tama dalam mendampingi anak-anak di usia remaja," jelasnya.

Tak hanya itu, Bobby juga mengumumkan bahwa Pemprov Sumut akan menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA dan SMK Negeri di seluruh provinsi mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025.

"Sekolah gratis ini tidak bisa dimulai pertengahan tahun ajaran karena ban-

yak yang sudah membayar di awal. Tapi mulai tahun ajaran baru nanti, seluruh SMA dan SMK Negeri di Sumut akan bebas pungutan," tegasnya.

Lima Program Prioritas dan Satu Program Khusus

Sejak awal masa jabatannya, Bobby dan Surya telah menetapkan lima program prioritas yang menjadi fokus uta-

ma pembangunan di Sumatera Utara:

1. Kesehatan - Menuju Cakupan Kesehatan Semesta (UHC):

Target besar dicanangkan agar seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Universal Health Coverage dalam waktu dua tahun. Ini berarti seluruh penduduk Sumut akan dijamin dalam sistem layanan kesehatan nasional.

2. Infrastruktur - Pembangunan yang Merata dan Ramah Lingkungan:

Pemerintah provinsi berkomitmen membangun infrastruktur yang tidak hanya merata dan terhubung antar-daerah, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

3. Ekonomi - Sumut sebagai Pusat Bioindustri dan Pariwisata Global:

Sumut diarahkan menjadi episentrum bioindustri nasional dan destinasi wisata global. Strategi ini akan melibatkan pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi dan promosi kawasan wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Tapanuli.

4. Pendidikan - Pemerataan Akses Teknologi:

Dalam waktu dua tahun, seluruh sekolah di Sumut ditargetkan akan terhubung dengan jaringan listrik dan internet. Ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan dan pemerataan akses pembelajaran daring.

5. Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Digital:

Meskipun belum disebut secara detail dalam wawancara, sumber dari Pemprov menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan berbasis teknologi juga masuk dalam prioritas Bobby-Surya.

Program Khusus untuk Daerah Tertinggal

Selain lima program utama, Bobby juga meluncurkan satu program khusus yang dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal.

“Empat dari tujuh daerah tertinggal di

Pulau Sumatera berada di Kepulauan Nias. Ini menjadi perhatian serius kami. Kami ingin paling tidak mengurangi jumlah daerah tertinggal, dan bila mungkin, menghapuskan seluruh status ketertinggalan tersebut dalam masa jabatan kami,” tegas Bobby saat Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin 3 Maret 2025.

Program ini mencakup intervensi lintas sektor seperti pengembangan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik), pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal di wilayah-wilayah tertinggal.

“Karena 100 hari kerja kepala daerah sudah menjadi tren penilaian bagi masyarakat untuk hari kerja selanjutnya. Maka, harus ada optimisme yang melekat pada kerja-kerja 100 hari tersebut. Untuk Gubernur, Bobby Nasution, Saya menilai, Mantap masa 100 hari kerja yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Salah satu kerja 100 hari Bobby Nasution sebagai Gubsu yang dinilai “Mantap,” oleh Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli, tersebut adalah tentang kepedulian dan perhatian yang menjadikan Nias sebagai prioritas diawal



Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), H. M. Nezar Djoeli, S.T., menyampaikan pujian yang konkret atas 100 hari kerja Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) periode 2025-2030.

Menurut H. M. Nezar Djoeli, S.T., masa 100 hari kerja memang harus diisi dengan prestasi, karya nyata dan keteladanan.

kepemimpinannya.

“Saya sebut mantap, bukan tanpa alasan yang mendukung, salah satunya adalah kepedulian terhadap pembangunan kepulauan Nias dengan kota dan kabupaten yang ada disana. Itu sudah mantap, Bobby Nasution, berani hadir dan deklarasikan kepedulian dirinya sebagai Gubsu untuk memprioritaskan pembangunan Nias,” ulasnya. ●

MEMBANGUN MUBA LEBIH BAIK DENGAN ASN PROFESIONAL DAN BERAKHLAK

Setelah sekian lama bekerja dan mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, ribuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) akhir resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muba.

Dimana Bupati Muba HM Toha SH melantik dan mengambil sumpah 2.838 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 151 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Muba. Acara pelantikan ini berlangsung di Halaman Griya Bumi Serasan Sekate Rumah Dinas Bupati Muba.

Bupati Muba HM.Toha menyampaikan bahwa pengangkatan tenaga kontrak menjadi PPPK ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong dan menopang perekonomian di Bumi Serasan Sekate.

"Sekarang mendapatkan gaji atau pendapatan yang layak, saya yakin dengan pengangkatan saudara-saudara menjadi ASN PPPK dan CPNS perekonomian di Muba semakin

lebih baik, dan tentunya Muba bisa maju lebih cepat, dan saya berharap seluruh ASN yang telah dilantik hari ini menjadi ASN yang bekerja profesional berakhlak dan menjadi pionir anti korupsi dan melayani dengan tulus untuk kesejahteraan warga musibanyuasin" kata Bupati Toha.

Sementara Wakil Bupati Kyai Rohman juga meminta agar PPPK dan CPNS yang telah dilantik dapat meningkatkan kinerja sebagai abdi negara dan melayani masyarakat dengan baik.

"Terus komitmen menjadi bagian untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Muba ini semakin baik," tegasnya.

Sekretaris Daerah Muba Dr Apriyadi MSi merinci bahwa dari 2.838 PPPK dan 151 CPNS yang dilantik, diantaranya meliputi



2.505 orang dengan Jabatan Teknis.

Ada 185 orang dengan Jabatan Fungsional Kesehatan, 148 orang dengan Jabatan Fungsional Guru, 44 orang dengan Jabatan Fungsional Kesehatan (CPNS).

Kemudian ada 107 orang dengan Jabatan Fungsional Teknis (CPNS).

Beberapa PPPK yang baru dilantik mengaku senang dan bahagia karena pengabdian mereka selama menjadi TKK dihargai dengan diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Hal ini tentu menambah semangat



Terus komitmen menjadi bagian untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Muba ini semakin baik.

mereka untuk bekerja lebih baik lagi di Pemkab Muba.

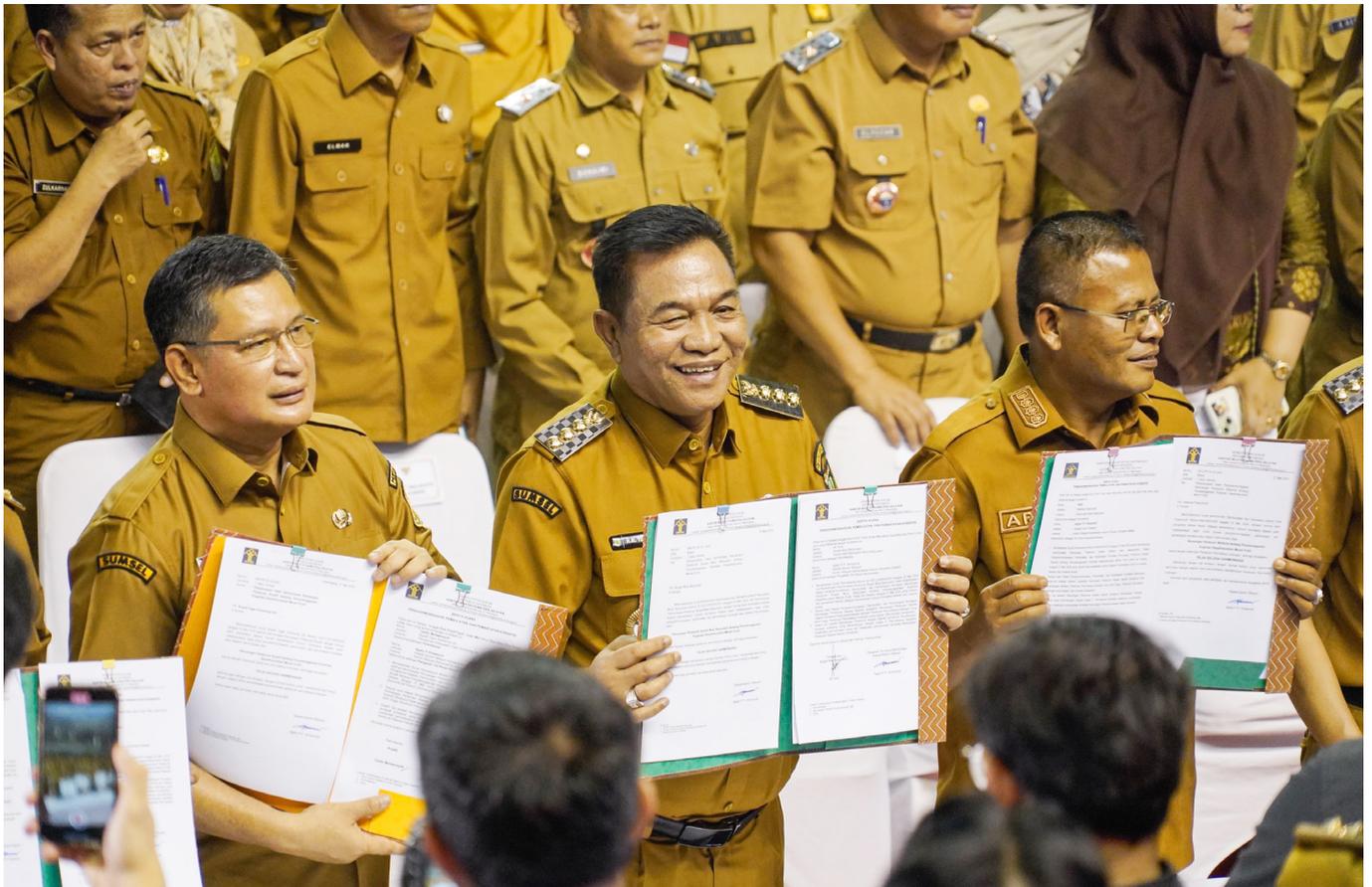
Seperti dikatakan Respanila dan Yuli, tenaga kontrak yang diangkat menjadi PPPK di Dinas Kominfo Muba, mengaku sangat senang dan bahagia telah dilantik menjadi ASN PPPK di Dinas Kominfo Pemkab Muba.

"Kami sangat senang, kini status kepegawaian sudah jelas. Saya bersama rekan-rekan lainnya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kepala Dinas Kominfo Herryandi Sinulingga yang selama ini sangat mensupport dan mendorong kami tenaga kontrak untuk mengikuti rangkaian tes seleksi PPPK," ucapnya.

Sementara M Raka Dewangga, salah satu PPPK yang dilantik di instansi Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Muba, mengaku sangat senang telah dilantik dan diambil sumpah yang disaksikan langsung Bupati Muba HM Toha SH.

"Saya dan keluarga sangat senang kini telah resmi menjadi ASN PPPK, saya berterima kasih kepada pak Bupati Toha wakil bupati Kyai Rohman dan Sekda Muba Apriyadi ucapnya. ●





SIAP DUKUNG PROGRAM STRANAS MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional atau Stranas melalui peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dimana Kabupaten Muba dibawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wabup Rohman sukses membentuk Koperasi Merah Putih dengan 100 persen untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Atas raihan tersebut, Pemkab Muba

meraih apresiasi tinggi Gubernur Herman Deru, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi tinggi kepada Provinsi Sumatera Selatan atas antusiasme dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ia menekankan pentingnya pembentukan koperasi sebelum mendapatkan pinjaman dari APBN.

"Kita bentuk dulu koperasinya, baru bisa dikasih pinjaman," ujar Zulkifli.

Gubernur Herman Deru juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Sumsel.

Ia mengungkapkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumsel telah mencapai 89 persen, dan salah satunya Kabupaten Muba telah mencapai 100 persen.

"Terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Pangan atas perhatian khususnya untuk Sumatera Selatan," ungkap Deru.

Bupati Muba, HM Toha, menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam pembentukan koperasi Merah Putih.

Ia menyatakan bahwa kehadiran koperasi di setiap desa sangat penting untuk memperkuat struktur ekonomi lokal.

"Muba sangat mendukung, dan langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat pembentukan koperasi dan struktur ekonomi di tingkat desa dan kelurahan," tegas Bupati Toha.

Dari total 242 desa dan kelurahan di Musi Banyuasin, Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk 100 persen, dengan rincian 229 koperasi di desa dan 13 koperasi di kelurahan dari 15 kecamatan yang ada.

Dengan pencapaian ini, diharapkan koperasi dapat menjadi sarana pem-

berdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mandiri kedepannya pungkasnya.

Dorong Ekonomi Kerakyatan

Pemkab Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha dan Wakil Bupati Rohman terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ekonomi desa. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Komitmen ini diwujudkan Pemkab Muba melalui kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang dibuka secara resmi Wakil Bupati Muba Rohman, mewakili Bupati HM Toha, dan dihadiri staf khusus pendamping wilayah IV pembentukan



Kita bentuk dulu koperasinya, baru bisa dikasih pinjaman.

koperasi Desa merah putih Kementan RI prof Ir Ambar, Kepala OPD.

Wabup Rohman menekankan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan pilar utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan.

“Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kabupaten Muba, dengan 229 desa dan 13 kelurahan, siap menjadi garda terdepan dalam merealisasikan kebijakan ini,” tegasnya.

Saat ini, Muba telah memiliki 421 koperasi aktif yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemkab Muba didorong untuk mempercepat pendirian koperasi-koperasi baru yang lebih relevan dengan tantangan dan peluang lokal.

Wabup Rohman menyebutkan bahwa koperasi Merah Putih memiliki lima potensi strategis diantaranya Mengoptimalkan potensi lokal dan sumber daya manusia, Menyediakan akses permodalan bagi masyarakat.

Kemudian membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan warga desa, dan menjadi solusi konkret atas kesenjangan ekonomi dan kemiskinan ekstrem. “Dengan semangat gotong royong

nilai-nilai kearifan lokal,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wabup berharap koperasi yang dibentuk ke depan dapat dikelola secara profesional, inklusif, dan penuh tanggung jawab. “Mari kita jadikan koperasi sebagai wadah berkarya, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan desa menuju Muba yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Muba Zulkarnain



dan prinsip kekeluargaan, koperasi akan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi desa yang tangguh dan mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh perangkat desa untuk melek teknologi.

“Di era digital, koperasi harus bertransformasi. Manfaatkan teknologi untuk mengelola usaha secara transparan dan efisien, namun tetap berpijak pada

menjelaskan bahwa pelaksanaan debut bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pedoman percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih agar tercapai secara efektif.

“Target pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah putih Kabupaten Muba sebanyak 242 koperasi dengan batas waktu berakhir paling lambat bulan Juni 2025,” untkapnya. ●



KOMITMEN BERSAMA TANGANI KARHUTBUNLAH

Bupati Musi Banyuasin HM Toha memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunlah). Apel ini digelar dalam upaya memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2025 dan potensi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan, di Lapangan Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate.

Dalam amanatnya, Bupati Toha menegaskan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas, seperti yang terjadi pada tahun 2024 dengan luas kebakaran mencapai 4.036 hektar atau menyumbang 26% dari total Karhutbunlah di Sumatera Selatan.

Guna memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian, Bupati Toha menyampaikan tujuh arahan strategis

yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan,

Antara lain Sinkronisasi Satgas Provinsi dan Kabupaten, Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi antara Satuan Tugas (Satgas) penanganan Karhutbunlah di tingkat provinsi dan kabupaten.

Hal ini penting mengingat asap dari kebakaran di satu wilayah bisa berdampak hingga ke kabupaten tetangga bahkan lintas provinsi seperti Jambi.

Kemudian Pembagian Tugas Pengendalian, seluruh stakeholder dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan

harus terlibat aktif. Tugas pengendalian Karhutbunlah harus terbagi habis dan dikoordinasikan secara menyeluruh agar penanganan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Selanjutnya Penegakan Sanksi Tegas, Bupati mengingatkan perlunya pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran pascapanen yang masih banyak dilakukan petani. Penegakan hukum ini menjadi bagian penting dari pencegahan dini.

Optimalisasi Alat Pertanian, alat produksi pertanian yang sudah ada di

kelompok tani diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk membantu pemadaman kebakaran kecil di awal kejadian sebelum api meluas.

Penguatan Regu Pemadam Perusahaan, Bupati menekankan agar perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri memperkuat sarana, prasarana, serta personil regu pemadam kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

Pengaktifan Posko Kebakaran, posko-posko kebakaran, baik yang dikelola perusahaan maupun kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api, diminta segera diaktifkan. Keberadaan posko ini menjadi titik penting pemantauan dan respon cepat.

Terakhir Pemanfaatan Dana Desa, arahan terakhir menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Desa untuk pengendalian Karhutbunlah, baik dalam pengadaan peralatan maupun mendukung operasional di lapangan.

Program "Satu Desa Satu Pompa" juga

sebagaimana dilaporkan BMKG wilayah Muba, BPBD dan seluruh OPD berkomitmen memperkuat sistem deteksi dini, edukasi masyarakat, serta sinergi lintas sektor agar bencana Karhutbunlah dapat dicegah dan dikendalikan secara efektif.

Kepala BPBD Muba, Phati Ridwan juga mengingatkan bahwa Karhutla di Muba terjadi hampir setiap tahun, terutama

akibat kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara dibakar.

"Harapan kita, Muba tidak menjadi daerah dengan bencana Karhutbunlah terbesar di Sumsel. Tugas ini adalah kerja bersama," tegasnya. Ia juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung penanganan awal apabila titik api ditemukan di wilayah desa. • ADV



Karhutbunlah bukan hanya ancaman lokal, tetapi juga berdampak global.

direncanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan di tingkat lokal

Bupati Toha berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dan bergotong royong untuk menekan angka kebakaran sekecil mungkin, bahkan jika mungkin, hingga nol kejadian.

"Karhutbunlah bukan hanya ancaman lokal, tetapi juga berdampak global. Perlu komitmen, kerja keras, dan keseriusan semua elemen agar bencana ini tidak terulang lagi. Kehadiran kita hari ini adalah bentuk nyata keseriusan tersebut," tegasnya.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan juga penyerahan bantuan hibah berupa, kendaraan roda dua, dan paket peralatan Mesin Pompa Ministriker atau pompa apung, yang diserahkan Bupati Muba kepada Kodim 0401 Muba, Polres Muba, Kejari Muba, dan BPBD Muba.

Dengan meningkatnya suhu udara

36 PROGRAM QUICK WIN PRAMONO-RANO SUDAH TERPENUHI

Gubernur DKI Jakarta. Pramono Anung menyatakan, hasil evaluasi 100 hari masa pemerintahannya dengan Wakil Gubernur Rano Karno dari 40 program quick win yang dicanangkan, sebanyak 90,3 persen atau 36 program telah terpenuhi 100 persen.

Pramono juga meminta jajarannya untuk segera menuntaskan dan menyelesaikan program-program Quick Wins yang belum tercapai hingga masa 100 hari berakhir.

"Tolong diselesaikan, karena kebermanfaatannya akan dirasakan langsung oleh seluruh warga Jakarta," ujar Pramono.

Adapun 40 Quick Wins tersebut mencakup 567 rencana aksi, yang terdiri atas 41 rencana aksi di bidang pemerintahan. 74 di bidang perekonomian dan keuan-

gan, 400 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup serta 52 di bidang kesejahteraan rakyat.

Selama 100 hari kerja, Pramono-Rano telah melakukan 33 peresmian atau peluncuran program, di antaranya Launching Jakarta Path to Top 20 Global City, Launching Job Fair. Peresmian IPA Buaran III.

Peluncuran Transjabodetabek, Pembukaan Taman Anak Sejahtera, Peresmian Pompa Sunter C, Launching Gratis Transportasi bagi 15 Golongan Masyarakat, Peresmian Rusun Jagakarsa, Relaunching SIRUKIM, Launching Aktivasi 24 Jam Taman Kota hingga Home Service Warga Jakarta (Pasukan Putih).

Pramono menyebutkan, beberapa program yang belum terselesaikan, di antaranya mundurnya pengoperasian fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan yang mengalami kendala karena kondisi di lapangan hingga pengembangan RSUD Internasional Cakung.

"Kemudian perahu transportasi ke Pulau Seribu yang sebenarnya sudah dipersiapkan, tapi saya minta di bulan ini

untuk bisa diresmikan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 4 Juni 2025.

Pramono berharap, apa yang menjadi janji dan keinginan politiknya tersebut bisa terpenuhi. Sedangkan terkait kebutuhan dasar bagi masyarakat, terutama siswa, relatif telah terpenuhi.

Karena itu, dia mengapresiasi kerja keras dan dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan program-program tersebut.

Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan adanya anggapan yang menilai kinerja 100 harinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kurang memuaskan dibandingkan kepala daerah lain.

"Tanggapannya enggak puas banget juga enggak apa-apa. Jadi, saya dan Bang Doel (Wagub Rano) tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu," ujar Pramono Anung.

Pramono mengatakan alih-alih memikirkan pendapat kurang puas pada kinerjanya, dia memilih berkonsentrasi mewujudkan janji-janji bersama Rano semasa kampanye.

"Kami konsentrasi kerja untuk bisa



mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang ini. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi,” kata dia.

Dia mengatakan bukan sosok anti-kritik dan justru menganggap kritik sebagai pil sehat. Ini juga berlaku pada pihak yang mengkritik wacana pulau khusus untuk kucing di Kepulauan Seribu.

“Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang mengkaji itu, belum diputuskan,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah mereka dalam periode 100 hari kepemimpinian.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa. Sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen) pada urutan kelima dan keenam.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengapresiasi, capaian Pramono Anung dan Rano Karno dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

“Meskipun waktu yang singkat telah berhasil merealisasikan sebagian besar dari 40 program percepatan yang dijanjikan,” ujarnya, Kamis 5 Juni 2025.

Sejumlah program yang diapresiasi di antaranya perluasan KJP Plus bagi 707.622 siswa dan KJMU bagi 16.979 mahasiswa, serta pemutihan 1.315 ijazah siswa yang sempat ditahan pihak sekolah.

Ima juga memuji kemajuan sektor transportasi, seperti perluasan layanan Transjabodetabek, pembangunan MRT dan LRT, serta pembukaan taman kota 24 jam sebagai ruang publik baru bagi warga.

Menurutnya, komitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan transportasi massal terintegrasi sangat penting untuk mengatasi kemacetan.

Ima mengatakan, program pelatihan Mobile Training Unit (MTU) yang telah melatih 960 warga, serta langkah-langkah memperluas akses air bersih melalui pembagian toren air dan Kartu Air Sehat juga patut didukung.

Dia menambahkan, layanan publik

berbasis digital lewat pembaruan aplikasi JAKI dengan 11 fitur baru merupakan upaya konkret membangun Jakarta sebagai kota global.

“Tapi jangan berpuas diri. Fondasi awal sudah bagus, namun tantangan ke depan masih banyak,” pesannya.

Ima juga mengajak warga Jakarta untuk terus mendukung dan mengawasi jalannya program pembangunan demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan berkeadilan. ●



Pramono-Rano telah melakukan 33 peresmian atau peluncuran program, di antaranya:

- ▶ Launching Jakarta Path to Top 20 Global City,
- ▶ Launching Job Fair,
- ▶ Peresmian IPA Buaran III,
- ▶ Peluncuran Transjabodetabek,
- ▶ Pembukaan Taman Anak Sejahtera,
- ▶ Peresmian Pompa Sunter C,
- ▶ Launching Gratis Transportasi bagi 15 Golongan Masyarakat,
- ▶ Peresmian Rusun Jagakarsa,
- ▶ Relaunching SIRUKIM,
- ▶ Launching Aktivasi 24 Jam Taman Kota,
- ▶ hingga Home Service Warga Jakarta (Pasukan Putih).



KEINDAHAN ALAM AIR TERJUN SEKAR LANGIT YANG MELEGENDA DI MAGELANG

Air Terjun Sekar Langit adalah destinasi wisata alam yang menawan di lereng Gunung Telomoyo, tepatnya di Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan dikelilingi oleh hutan bambu yang asri, menciptakan suasana sejuk dan damai.

Pesona Air Terjun ini tak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kisah mistis yang menyelimutinya.

Destinasi ini sekarang telah menjadi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati alam sekaligus merasakan nuansa legenda yang kental.

Dengan ketinggian sekitar 25 meter, Air Terjun Sekar Langit menyuguhkan panorama yang memesona. Aliran airnya tidak pernah surut, bahkan di musim kemarau meskipun debit air memang lebih kecil dibandingkan musim hujan.

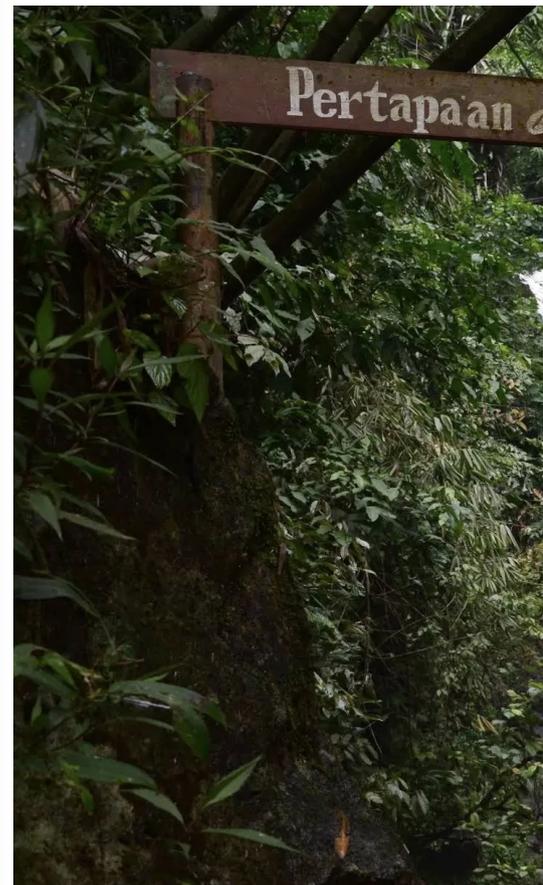
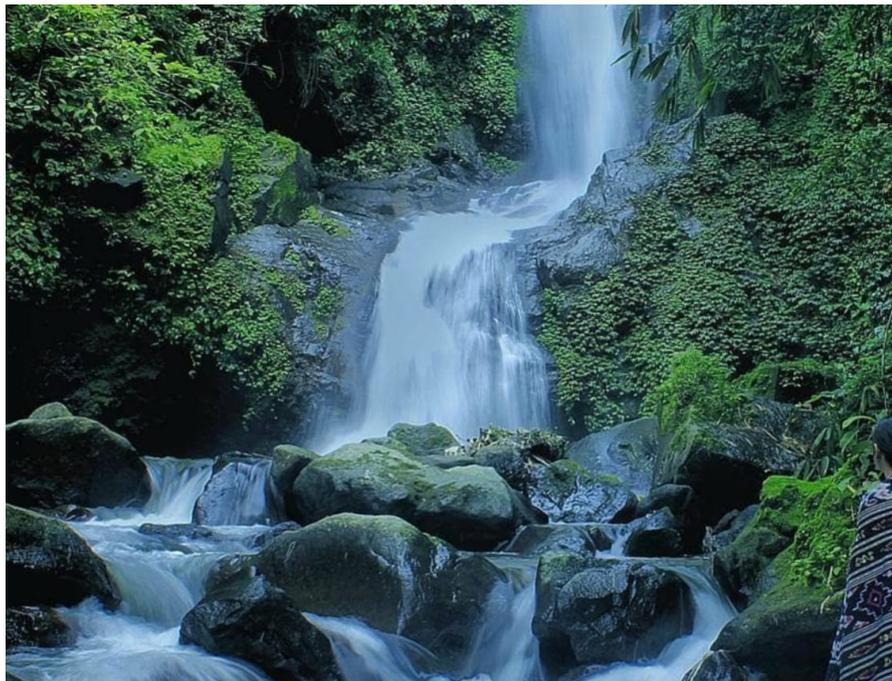
Udara yang sejuk, suara gemuruh air, serta rimbunnya pepohonan menciptakan suasana alami yang menenangkan.

Jalur menuju air terjun ini juga cukup ramah untuk wisatawan. Dari pintu masuk, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 600 meter atau sekitar 10 menit untuk sampai ke lokasi.

Di sepanjang perjalanan, barisan pohon bambu yang menjulang tinggi mempercantik jalur trekking dan memberikan kesan sejuk alami.

Salah satu spot menarik di jalur ini adalah Jembatan Asmara yang berwarna-warni dan sering dijadikan tempat berfoto oleh pengunjung.

Air Terjun Sekar Langit kini semakin



• INFO WISATA



ramah bagi wisatawan, termasuk pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadikan tempat ini sebagai destinasi rekreasi. Di kawasan ini telah tersedia beberapa fasilitas, seperti: area parkir, kamar mandi umum, bumi perkemahan untuk para pecinta alam dan warung makan serta tempat istirahat sederhana.

Daya tarik utama yang membedakan Air Terjun Sekar Langit dari destinasi serupa adalah cerita rakyat yang melekat kuat pada tempat ini: Legenda Jaka Tarub dan Nawangwulan.

Konon, tujuh bidadari turun dari kahyangan untuk mandi di air terjun ini. Seorang pemuda bernama Jaka Tarub mencuri selendang salah satu bidadari bernama Nawangwulan, sehingga Nawangwulan tidak dapat kembali ke kahyangan.

Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Nawangsih (atau Nawangsari). Namun, pada akhirnya Nawangwulan menemukan kembali selendangnya dan kembali ke kahyangan. Dalam kisah yang beredar di masyarakat, Nawangwulan akan turun ke bumi dalam wujud angsa emas saat merindukan putrinya.

Air Terjun Sekar Langit juga memiliki nilai sejarah dalam dunia perfilman Indonesia. Beberapa produksi film dan sinetron pernah mengambil latar di lokasi ini, di antaranya: Film "Yohana Gadis Rimba" (1983) dan Sinetron legendaris "Tutur Tinular" (1992)

Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa air di Air Terjun Sekar Langit memiliki khasiat tertentu. Di antaranya, digunakan untuk ritual tapa kungkum atau mandi yang dipercaya dapat membuat awet muda dan memudahkan jodoh, terutama bagi perempuan.

Jika kamu yang menyukai wisata alam dengan sentuhan legenda, Air Terjun Sekar Langit adalah destinasi yang layak dikunjungi. Keindahan alamnya, nuansa mistis yang mengiringi, serta akses yang cukup mudah menjadikan tempat ini ideal untuk wisata keluarga, kegiatan sekolah, maupun eksplorasi pribadi.

Jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan momen, dan tetap menjaga kebersihan agar keindahan Air Terjun Sekar Langit tetap lestari untuk generasi mendatang. •



KULINER LEZAT DAN LEGENDARIS

Magelang tak hanya dikenal sebagai kota berhawa sejuk dan dekat dengan Candi Borobudur, tetapi juga sebagai surga kuliner yang memanjakan lidah.

Jika kamu sedang berada di Magelang, jangan lewatkan deretan tempat makan dan sarapan legendaris yang menyajikan menu khas penuh cita rasa.

Dari bubur, gudeg hingga soto ayam hangat, rekomendasi lokasi sarapan dan kuliner pagi terbaik di Magelang yang bisa jadi awal hari menyenangkanmu.

6 Tempat Makan dan Sarapan Terbaik di Magelang

1. Soto Ayam Pak Trimo

Kuliner ini berada di Jalan Sriwijaya

No.107, Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Salah satu tempat makan legendaris di Magelang untuk sarapan adalah Soto Ayam Pak Trimo.

Kelezatan soto ini terletak pada kuah kaldunya yang gurih dan kaya rempah, hasil dari proses memasak tradisional menggunakan tungku arang. Isian soto terdiri dari nasi, bihun, taube, suwiran ayam, perkedel singkong, dan potongan tahu bacem komponen khas soto Magelang yang membedakannya dari soto daerah lain.

Selain soto, pengunjung dapat menikmati berbagai lauk tambahan seperti sate ayam manis, sate uritan, tempe goreng, dan kerupuk. Sate ayam manis dan tempe goreng menjadi favorit yang sering disebut mampu meningkatkan kenikmatan soto ke level berikutnya.

Meskipun lokasinya tersembunyi di dalam gang sempit, warung ini selalu ramai pengunjung. Suasana yang seder-

hana dan nyaman, dengan meja-meja besar yang cocok untuk rombongan, menambah daya tarik tersendiri. Warung buka setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 11.00 WIB, kecuali hari Senin.

2. Kuliner Jendralan

Kuliner ini berada di Jalan Jendralan No.1, Kemirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

Kuliner Jendralan di Magelang memiliki daya tarik yang khas dan kelezatan yang unik, menjadikannya salah satu pilihan favorit bagi pencinta kuliner tradisional Jawa Tengah. Berikut adalah deskripsi mengenai kelezatan dan daya tarik kuliner ini.

Kuliner Jendralan menghadirkan cita rasa khas Jawa yang kental dengan sentuhan manis dan gurih. Bumbu rempah tradisional yang meresap sempurna ke dalam masakan menciptakan sensasi rasa yang mendalam dan memanjakan lidah.

Umumnya terdiri dari olahan daging



(seperti ayam atau sapi) yang dimasak hingga empuk, berpadu dengan kuah kental atau sambal khas. Tekstur daging yang lembut dan mudah dikunyah menambah kenikmatan saat disantap.

Perpaduan santan, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan serai menghasilkan aroma sedap yang menggoda selera sejak suapan pertama. Ini membuatnya bukan sekadar makanan, tetapi juga pengalaman sensori.

3. Bubur Gudeg Kodim

Bubur ini berada di Jalan Ahmad

Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang

Kupat tahu adalah ikon kuliner Magelang, dan salah satu yang paling terkenal adalah Kupat Tahu Pojok.

Tahu goreng yang lembut, ketupat yang kenyal, dan siraman bumbu kacang yang gurih-manis menjadikan menu ini cocok disantap pagi hari.

Tempat ini selalu ramai pengunjung, jadi sebaiknya datang lebih awal agar antrian tidak terlalu panjang.

5. Rumah Makan Tip Top

Rumah makan ini berada di Jalan Pe-

nasi goreng, sop buntut, hingga roti bakar.

Tempat ini cocok untuk kamu yang ingin sarapan dalam suasana tenang dan nostalgia. Interiornya juga menambah kesan vintage yang unik.

6. Warung Makan Senerek Bu Atmo

Warung Makan Senerek Bu Atmo di terletak di Jalan Mataram No.6, Panjang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang

Kalau kamu ingin merasakan kuliner khas Magelang, jangan lewatkan Se-



Yani No.1, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang (Dekat Kodim 0705/Magelang)

Kalau biasanya gudeg identik dengan nasi, di sini kamu bisa menikmati varian unik berupa bubur gudeg.

Tekstur bubur yang lembut dipadu gudeg manis, sambal krecek pedas, dan telur bacem menciptakan sensasi sarapan yang khas dan memuaskan. Tempat ini sudah jadi favorit warga lokal sejak lama.

4. Kupat Tahu Pojok Magelang

Kupat Tahu Pojok Magelang ini terdapat di Jalan Tentara Pelajar No.14,



muda No.109, Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang

Tip Top adalah tempat makan klasik yang sudah ada sejak zaman Belanda. Menu sarapannya beragam, mulai dari

nerek Bu Atmo yang berlokasi di Jl. Mataram No.6, Panjang.

Senerek adalah sup kacang merah dengan potongan daging, wortel, dan kentang yang disajikan bersama nasi putih hangat. Warung ini buka pagi hari dan jadi langganan para pekerja serta wisatawan.

Berkunjung ke Magelang tak lengkap tanpa mencoba tempat makan yang menyajikan sarapan khas penuh cita rasa. Keenam tempat di atas bukan hanya menawarkan menu lezat, tetapi juga atmosfer lokal yang autentik dan hangat. ●



KEKUATAN MERATA, PEMAIN LIGA SAMA HEBATNYA

Saat menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara mengejutkan menurunkan Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya dalam sebelas pertama plus Rizki Ridho.

Keputusan ini cukup mengejutkan dan sempat menjadi pertanyaan apakah mereka mampu menunjukkan penampilan yang seimbang dengan pemain yang berkarir di Eropa seperti Thom Haye, Jay Idzes atau Calvin Verdonk.

Namun nyatanya, di lapangan berbicara semua pemain Liga 1 tampil sangat baik, minim membuat kesalahan, dan bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora. Beckham Putra dan Sananta juga bermain cukup baik sesuai fungsinya masing-masing.

Applaus untuk tim kepelatihan utamanya Patrick Kluivert yang mempercayakan talenta dari Liga Indonesia untuk berjuang menuju mimpi Piala Dunia. Hal ini juga jadi pembuktian para pemain-pemain tersebut bahwa mereka juga mampu bersaing.

Bukan hanya keempat pemain ini saja, Patrick Kluivert juga memasukkan Stefano Lilipaly, Ramadhan Sananta, dan Beckham Putra.

Sekali lagi hasilnya luar biasa. Permainan pemain Liga Indonesia sudah merata dan sama baiknya. Tekanan yang diberi-

kan Tiongkok bisa dinetralkan dengan baik.

"Buat saya yang paling penting adalah pemain bisa menunjukkan kualitas. Kalau begitu (berkualitas) mereka akan punya peluang main, mau naturalisasi atau lokal tidak ada bedanya," kata Patrick Kluivert.

"Tidak ada yang berbeda, semuanya berdasarkan kemampuan pemain. Apalagi saya merasa pencampuran pemain lokal dan diaspora membuat tim semakin kuat"

"Soal pemain naturalisasi, mereka tidak dijamin selalu main. Mereka juga harus bersaing dengan pemain lokal," katanya.

Di sisi lain Patrick Kluivert juga mendapatkan sorotan karena berani mencadangkan pemain kelas dunia seperti Kevin Diks dan Mees Hilgers karena lebih memilih memainkan pemain lokal.

Menanggapi hal tersebut, Kluivert menegaskan ia sangat menolak adanya diskursus pemain lokal dan naturalisasi di skuad Garuda. Bagi pelatih asal Belanda itu, pemain berkualitas akan mendapatkan kesempatan main lebih besar.

Kembali Tampil Baik

Selain Beckham Putra beberapa pemain Liga Indonesia yang cukup mendapat sorotan adalah Ricky Kambuaya. Pemain ini sudah lama tidak dapat kesempatan tampil sebagai Starter, meski sering dipanggil masuk skuad ke Timnas.

Waktu lawan Bahrain Maret lalu, dia kembali bermain dan masuk di menit 75'. Mainnya cuma sebentar, tapi langsung kasih banyak ancaman dan buktikan kalau dia masih punya kualitas buat bantu tim.

Namun saat melawan China, Ricky Kambuaya malah langsung dipercaya jadi starter, bermain kreatif umpan drib-



blenya dan berhasil bikin peluang yang akhirnya berujung penalti buat Timnas Indonesia.

Pemain lainnya adalah Egy Maulana Vikri yang sudah lama tidak bermain di Timnas Indonesia. Sehingga juga tak memperlakukan Ole Romeny memakai nomor punggung 10 yang sempat dikenakannya.

Egy kembali turun laga bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan China 1-0 dalam laga Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia di GBK, Kamis (5/6). Sebelumnya, ia terakhir kali main saat ditahan 1-1 Arab Saudi di Jeddah pada September lalu.

Kala itu, Egy masih memakai jersey nomor 10, tetapi kini ia berganti ke nomor 7. Adapun nomor 10 dipakai Ole Romeny.

"Karena itu [Romeny pakai nomor 10] kesepakatan bersama. Jadi, sudah bicara satu sama lain. Jadi, ya sudah," ujar Egy.

"Karena dia Ole Romeny juga cetak gol juga kemarin. Sebenarnya tidak penting juga [soal nomor punggung], tidak ada permasalahan tentang itu. Yang terpenting Indonesia menang, semuanya senang. Jadi, kerja sama tim yang penting," tandasnya.

Sementara untuk posisi kiper, dari empat nama yang dibawa Patrick Kluivert



yakni Nadeo Argawinata, Ernando Ari Sutaryadi, Emil Audero Mulyadi, dan Maarten Paes, sang pelatih sepertinya lebih mempercayakan kepada dua orang saja.

Maarten Paes yang tak tergantikan di bawah mistar gawang Indonesia dan sudah bermain sebanyak 8 kali namun harus absen dalam laga kontra Tiongkok karena akumulasi kartu.

Untungnya, Indonesia punya kiper lain yang sama hebatnya dalam diri Emil Audero. Ia membuktikan kualitasnya di awal babak kedua, sepakan keras pemain Tiongkok ke pojok kanan bawah mampu ditepis oleh Audero.

Nadeo dan Ari bukannya tidak tampil apik namun soal kepercayaan menjadi kunci penting bagi pelatih.

Patut dicatat, Indonesia sangat digdaya di GBK pada ronde ketiga ini. Di antara semua peserta, hanya Jepang saja yang mampu membobol gawang Indonesia saat berlaga di Jakarta.

Sisanya, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok pulang dengan tangan kosong. Australia cukup beruntung bisa kembali dengan raihan 1 point, sebab laga berakhir dengan 0-0. Selama itu pula Maarten Paes menjadi penjaga gawang yang belum tergantikan saat ini.

Jadi Pemain Tak Tergantikan

Ada catatan menarik dari laga kualifikasi melawan China yakni Patrick Kluivert, selalu memainkan kedua pemain ini dan tidak tergantikan yaitu Jay Idzes dan Calvin Verdonk

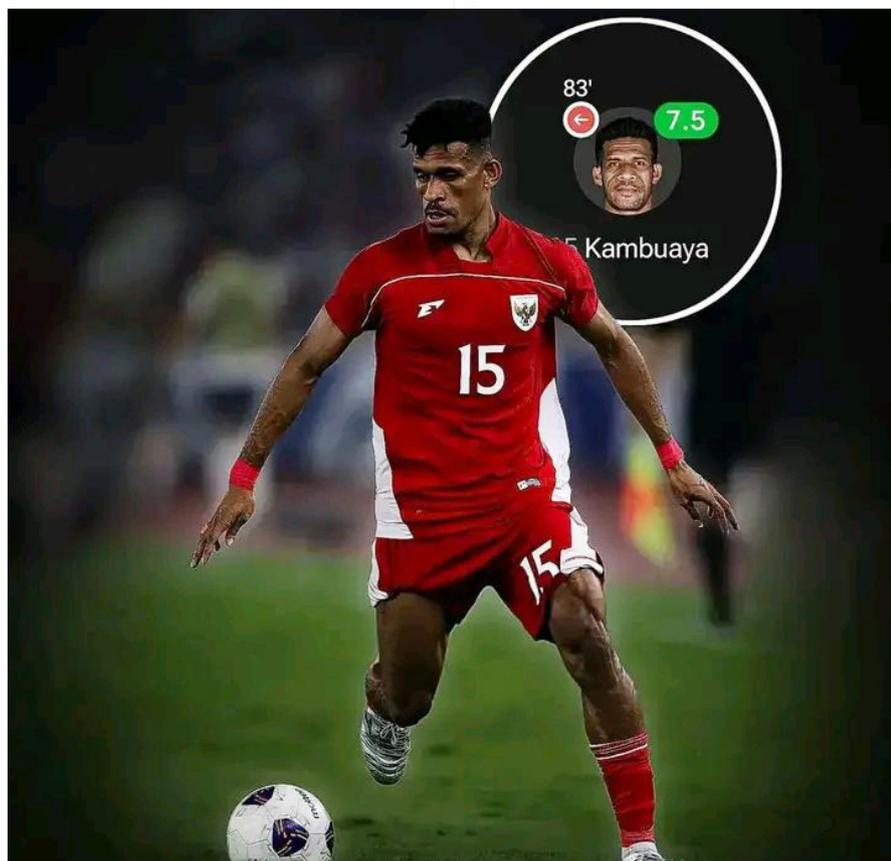
Keduanya selalu tampil konsisten dan menjadi andalan Timnas Indonesia selama ini

Selain kedua pemain ini, Patrick Kluivert juga selalu memasang Ole Romeny dan Thom Hays sebagai starter namun sering diganti di babak kedua.

Sedangkan Justin Hubner dan Rizky Ridho juga selalu jadi andalan Patrick Kluivert di lini belakang dalam 2 laga terakhir Timnas Indonesia.

Rizki Ridho (24), Jay Idzes (25), dan Justin Hubner (21) kembali catatkan cleansheet malam tadi, dan membuat 7 dari 8 cleansheet sejak mereka diturunkan bersamaan sebagai trio bek tengah.

Bahkan penampilan mengesankan ketiganya membuat Mees Hilgers (25), pemain dengan nilai pasar termahal Timnas harus ada di bangku cadangan. •



INDONESIA DIKASIH PAHAM JEPANG

Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tidak beruntung di hadapan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 0-6 dari tuan rumah Jepang menunjukkan kemampuan Timnas Indonesia masih harus ditingkatkan agar lolos ke Final Piala Dunia 2026.

Pertandingan melawan Jepang memang sudah tidak menentukan untuk Indonesia, karena sudah dipastikan lolos ke Round 4. Namun kebobolan hingga enam gol menunjukkan kalau kualitas pemain asuhan Patrick Kluivert menjadi pertanyaan mampukah Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 seperti target pelatih.

Total Timnas Indonesia kebobolan 10-0 dari Jepang selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah 0-4 saat di Gelora

Bung Karno (GBK) dan terbantai 0-6 saat tandang ke Jepang. Beruntung Jay Idzes dan kawan-kawan tetap lolos ke round 4 sehingga tetap berpeluang menembus final meski hal itu tidak mudah.

Kekalahan ini juga menunjukkan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan Patrick Kluivert jika Ingin lolos Piala Dunia 2026. Terutama soal kesiapan pemain dan kurangnya waktu bersama antara Patrick Kluivert dan timnya dengan para pemain sendiri.

Hasilnya, Timnas Indonesia terkesan kurang siap saat laga tandang. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang seakan menyadarkan suporter Timnas Indonesia untuk bersikap realistis saja.

Dari 6 gol tercipta, ada lima pemain Jepang yang memberikan kontribusinya menjebol gawang Emil Audero.

Timnas Indonesia sendiri sudah kebobolan sejak di menit ke 15 dan 45+6. Kemudian Kubo (19), Morishita (55), Machino (58), dan Hosoya (80).

Kita tahu Jepang memang kuat karena menjadi negara langganan lolos final Piala Dunia 2026. Namun dari statistik ini seakan Indonesia sama sekali tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan

perlawanan (menghadapi tim pelapis Jepang).

Catatan besar untuk Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya, dua kekalahan sangat telak di Australia dan Jepang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.

Kemenangan tipis atas Bahrain dan China di GBK juga masih membuat kekhawatiran, karena dengan skuad Timnas Indonesia saat ini harusnya kita bisa berbuat lebih banyak ketika menghadapi Bahrain dan China.

Round 4 tinggal empat bulan lagi, evaluasi besar harus dilakukan jika ingin Indonesia berada di jalur untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026.

Kalah Segalanya dari Jepang

Beberapa jam jelang kick-off, PSSI resmi nama-nama 23 pemain yang masuk skuad final untuk melawan Jepang. Berbeda dengan laga lawan China, tidak ada nama Ramadhan Sananta dan Rizky Ridho.

Rizky Ridho merasakan hamstring di kakinya saat latihan yang membuat dokter timnas Indonesia terus memantau keadaannya. Pada akhirnya, Rizky Ridho resmi diputuskan tak masuk ke daftar 23 pemain.



Hilangnya sosok Rizky Ridho membuat pertahanan Timnas Indonesia seperti kehilangan ruh. Trio Mees Hilgers, Jay Idzes, dan Justin Hubner terlihat kurang tenang dan sehingga tak mampu bersatu pada menghalangi serangan Timnas Jepang.

Sementara 5 pemain lain juga tidak didaftarkan ke skuad yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Reza Arya, Nadeo Argawinata dan Ivar Jenner yang kena akumulasi kartu.

Hasil statistik menunjukkan, Jepang tidak hanya tampil dominan tapi juga menyerang total. Dimana Jepang menguasai 71 persen pertandingan sementara Timnas Indonesia hanya 29 persen saja.

Tidak ada peluang emas yang dida-

On (23/MF), dan Yakob Sayuri (27/RWF)

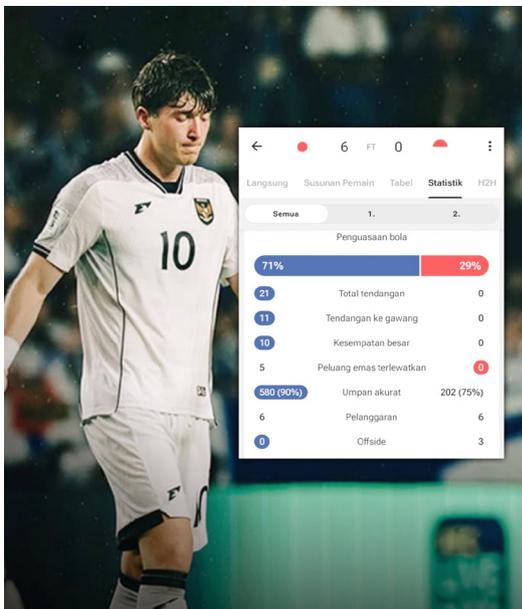
Jika diantara kelima pemain ini ada yang mendapat kartu kuning, maka ia akan absen di pertandingan pertama Round 4. Namun jika kelima pemain ini bebas kartu kuning, maka seluruh kartu kuning sebelumnya akan dihapuskan, dan bisa bermain di semua match Round 4.

Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan untuk mengistirahatkan kelimanya, ditambah pertandingan lawan Jepang tidak begitu berpengaruh dalam persaingan di Klasemen.

PSSI sendiri sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama tiga negara pesaing lainnya yakni China, Uni Emirat Arab dan Iraq.

Dimana sesuai regulasi yang tertera, bahwa host round 4 ditunjuk langsung oleh AFC dengan kesepakatan langsung dari seluruh peserta. Sementara baik Arab Saudi dan Qatar tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah seperti permintaan AFC.

Selagi belum ada keputusan resmi AFC, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berupaya ikut mendaftarkan Indonesia



pat, tidak ada tendangan ke arah gawang namun murni bertahan saja.

Kiper Emil Audero yang kembali dipercaya Patrick Kluivert melawan Jepang tak berdaya menghadapi serangan beruntun.

Kekalahan ini juga membuat peringkat Timnas Indonesia di federasi sepakbola dunia atau FIFA mengalami penurunan kembali dari peringkat 117 menjadi 119 dunia. Namun kekalahan telak ini bisa jadi imbas dari diistirahatkannya lima pemain inti agar bisa dimainkan di round keempat.

Saat ini ada 5 pemain Indonesia yang sudah mengantongi kartu kuning yakni Jay Idzes (24/CB), Calvin Verdonk (28/LB), Kevin Diks (28/RB), Nathan Tjoe A



Ajukan Tawaran Tuan Rumah

Meski sempat beredar kalau negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar akan ditunjuk ditunjuk AFC sebagai tuan rumah Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 namun terkait kebenaran ini masih belum dipastikan. Baik federasi sepakbola Asia atau AFC atau FIFA hingga kini belum mengumumkan lokasi bidding host round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.

sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kita juga sudah izin, tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesneg ada Pak Setkab untuk juga bidding sebagai tuan rumah (Kualifikasi Piala Dunia Round 4). Siapa tahu kita masih bisa," ujar Erick Thohir.

"Walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat sebagai tuan rumah. Kita coba lah. Ini kesempatan," ungkapnya. ●



DISKON LISTRIK HILANG, 5 STIMULUS TERBILANG

Rencana menerapkan diskon tarif listrik mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025 ternyata batal. Namun sejumlah paket stimulus, perangsang, pergerakan ekonomi lainnya tetap jalan.

hwal diskon tarif listrik itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 24 Mei 2025. Intinya, diskon tarif listrik sebesar 50 persen menasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Jadi, masih ada stimulus ekonomi lainnya.

“Stimulus ini diharapkan bisa men-

pertama diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025. Ketiga, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima



orong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain diskon tarif listrik, Pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lain, yakni

ma Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.

Keempat, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer. Kemudian stimulus kelima, Pemerintah bakal memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

Sejumlah stimulus tersebut tengah

difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni. Airlangga berharap insentif yang diberikan akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendorong pergerakan masyarakat dalam negeri selama masa liburan sekolah sehingga diharapkan dapat terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe-giarso mengemukakan paket stimulus ekonomi itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bidang perekonomian. "Stimulus ekonomi kuartal II 2025 tersebut telah dibahas secara

giarso di Jakarta, Selasa.

la merinci, diskon tarif listrik ini menasar sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dan mengadopsi skema yang sama dengan program serupa pada Januari-Februari 2025 lalu.

Kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik. Pelaksanaan program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan PLN.

Perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dalam Rakortas menyampaikan bahwa kebijakan ini akan segera dilaporkan kepada Menteri ESDM dan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama Kementerian Keuangan dan PLN,

masyarakat yang membutuhkan, tapi competitiveness untuk ekonomi juga kan bagus nanti," ujar Erick di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

la mengemukakan, diskon tarif tersebut sudah didiskusikan bersama PT PLN (Persero). Menurut dia, penugasan ini merupakan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Toh Erick menegaskan, keputusan pemberian diskon hanya untuk pelanggan listrik dengan daya di bawah 1.300 VA sudah melalui berbagai pertimbangan. "Rencananya seperti itu (5 Juni), tapi kita tunggu nanti keputusannya," ungkap Erick.

Memang ada persoalan lain terkait diskon tarif listrik yang pernah diterap-



mendalam pada Rakortas tingkat menteri pada hari Jumat, 23 Mei 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan/perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe-

termasuk penerbitan Keputusan Menteri ESDM.

Di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan diskon tarif listrik mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Bagus kan untuk mendorong pertumbuhan, kita perlu competitiveness. Diskon tarif listrik tentu membantu

kan pada Januari-Februari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui, diskon listrik yang menjadi kontributor utama deflasi Februari 2025 merupakan program yang didesain untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pada Februari 2025 terjadi deflasi 0,09 persen (year-on-year/yoY), sebagian besar dipengaruhi oleh program diskon tarif listrik 50 persen pada Januari dan

Februari 2025. "Diskon tarif listrik yang diberikan akan mengakibatkan angka inflasi yang rendah dalam beberapa bulan ke depan. Program ini merupakan bagian dari serangkaian paket kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Febrio di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

deflasi berulang pada Juli 2025.

Salah satu pengertian deflasi adalah penurunan harga dalam suatu kawasan ekonomi akibat permintaan barang turun sedangkan produksi meningkat. Jadi, untuk menghindari deflasi mengarah ke resesi, yang diperlukan adalah stimulus untuk mendorong belanja

capai Rp 24,4 triliun.

"Lima Stimulus ini diharapkan penyebarannya bisa lebih merata, peningkatan daya belinya diharapkan bisa jauh lebih luas, dan perputaran ekonominya diharapkan jauh lebih terasa," katanya di Kantor PCO, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025. Ia berharap adanya stimulus ini ekonomi dalam negeri dapat berputar dalam 2 bulan mendatang, karena peningkatan daya beli di dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan batalnya kebijakan itu karena keterlambatan dalam proses penganggaran. Sehingga kebijakan yang dijalankan digantikan menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang jumlahnya ditambah.

Sementara Kementerian ESDM mengaku tidak dilibatkan untuk memberikan masukan dalam proses rencana kebijakan itu. "Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu," ungkap Menteri ESDM Bahlil usai ditemui di acara Pembukaan Human Capital Summit 2025: Accelerating the Workforce Transformation for Downstream Growth and Energy Transition in Indonesia, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menanggapi hal itu, Hasan Nasbi menanggapi ringkas saja. "Lebih baik dikonfirmasi ke kedua kementerian yang bersangkutan," ujarnya.

Toh Bu Menkeu menegaskan stimulus lain di luar diskon tarif listrik tetap diberlakukan pada Juni-Juli 2025. Sudah jelas format dan arahnya untuk mendorong belanja masyarakat terutama konsumsi rumah tangga.

Ia mengemukakan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun yang terdiri dari Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 mendekati lima persen.

"Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati lima persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat



Boleh dibilang, diskon tarif listrik memang bisa menjaga, namun belum cukup untuk mendorong daya beli terhadap produk dan jasa lainnya, Terlebih Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi terjadi dua bulan berturut-turut pada Mei dan Juni 2025. Jika deflasi berlangsung tiga bulan berturut-turut, ekonom biasanya menyebut tanda-tanda resesi (kelesuan ekonomi) telah terjadi. Maka sangat perlu mencegah

barang dan jasa agar ekonomi secara keseluruhan bergairah untuk tumbuh.

Alhasil, pemerintah memastikan pembatalan diskon tarif listrik 50 persen pada Juni-Juli 2025 ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menerbitkan lima insentif untuk stimulus ekonomi. Nilainya men-

kondisi global,” kata Bu Menkeu usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.

Menkeu memaparkan paket stimulus ekonomi tersebut terdiri dari lima kebijakan. Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp940 miliar.

“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka, dis-



Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun.

kon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” ujar Menkeu.

Kedua, pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025. Anggaran yang dibutuhkan untuk insentif ini sebesar Rp650 miliar.

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Menkeu.

Ketiga, pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg

per bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama bulan Juni-Juli 2025 dan disalurkan satu kali di bulan Juni 2025. “Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujar Bendahara Negara ini.

Keempat, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Fasilitas tersebut juga diberikan kepada

rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” ujar Menkeu.

Tanggapan dari sisi kalangan bisnis swasta justru mengharapkan peningkatan belanja pemerintah baik APBN maupun APBD. “Setelah stimulus ekonomi dan berlanjutnya deflasi, peningkatan belanja pemerintah di paruh kedua tahun 2025 adalah kunci,” ungkap Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhru Fulvian di Jakarta, Kamis, 5 Juni



288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama. Bantuan subsidi upah akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun

Kelima, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar.

“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja,” kata Bu Menkeu.

Menkeu berharap seluruh stimulus tersebut dapat menjaga konsumsi

2025.

Menurut dia, stimulus ekonomi sebesar Rp24 triliun yang mencakup sektor transportasi, subsidi upah, bantuan sosial dan diskon iuran, tetap belum memadai tanpa belanja pemerintah yang mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan. “Kami sangat mengharapkan belanja pemerintah mencapai full throttle di paruh kedua tahun 2025,” ujarnya.

Apapun, pembatalan diskon tarif listrik lebih disebabkan oleh pertimbangan untuk meningkatkan gairah ekonomi masyarakat di tingkat rumah tangga hingga perorangan. Sedangkan isu-isu menyangkut elite politik pengambil kebijakan adalah dampak yang berada di ranah berbeda namun memang tak terhindarkan. ●



HJ BERLIANA BERMAWI HOMESCHOOLING HINGGA HAJI FURODA

Data Pokok Pendidikan menunjukkan jumlah sekolah (di) rumah -homeschooling, yang dikategorikan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia berjumlah lebih dari 10 ribu dengan jumlah peserta didik melampaui 1,7 juta orang. Info Indonesia menemui pengelola salah satu pegiatnya: Hj Berliana Bermawi. Simak saja selengkapnya:

Sekolah (di) rumah, padanan bahasa untuk homeschooling, secara formal sudah berkembang lebih dari 10 tahun. Salah satu perkembangan mutakhir di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagaimana pilihan Pusat Studi Islam Alquran dan As-sunnah (Pusdinash). Maka jadilah Homeschooling+ Pusdinash (HS+P).

Homeschooling+ Pusdinash terintegrasi dengan jaringan bisnis syariah lainnya. Selain dengan Pusdinash sebagai lembaga induknya, HS+P pun memiliki jejaring, antara lain Fatuha Tour & Travel Jakarta, spesialis Haji dan umrah, juga bersama Samaya Living yang membidangi pengembangan usaha keperluan sehari-hari (daily needs) khususnya bagi muslim dan muslimah sebagaimana tagline "Muslim Daily Needs, Blessings in Every Step".

"Homeschooling+ ini yang paling muda, baru mulai pada tahun ajaran 2024-2025," ungkap pengelola Pusdinash Hj Berliana Bermawi yang juga Direktur Pengelola Fatuha Tour and Travel Jakarta. Menurut

dia, salah satu terobosan Homeschooling+ adalah penyelenggaraan pendidikan secara online melalui jaringan internet dengan menggabungkan pelajaran umum sebagaimana kurikulum pendidikan nasional sesuai dengan jenjangnya plus ilmu agama (diniyah) yang meliputi aqidah, syariah, akhlak, juga program tahfiz (menghafal) teks Alquran secara lengkap hingga 30 juz.

Porsi pendidikan umum dan diniyah di HS+P relatif seimbang. Pelajaran umum mencakup 55 persen, dan sisanya, 45 persen, pelajaran diniyah. Persentase ilmu diniyah dibandingkan dengan ilmu umum yang dipelajari di HS+P, tampak sedikit lebih kecil dari sisi jam belajarnya. Namun dari bobot, semua ilmu umum akan melekat dengan ilmu diniyah.

Untuk itu, Berliana menjelaskan, HS+P megerahkan 17 tenaga pendidik termasuk seorang kepala sekolah. "Tambahan pula, ada enam tahfiz (penghafal Quran) dan satu tim admin beranggotakan lima orang," ungkapnya.

Tim Admin tak kalah penting dengan 23 tenaga pendidik dan tahfiz karena

terkait dengan pemanfaatan TIK. Tugas tim admin ini antara lain mengelola pendataan siswa dan pengajar, menyiapkan link zoom yang stabil, juga memastikan pengumuman-pengumuman dan informasi penting tersampaikan kepada pihak-pihak terkait. Ringkasnya, tim admin berurusan dengan kelancaran penyelenggaraan HS+P termasuk mengelola anggaran keuangannya.

Ia menjelaskan, dengan terobosan itu, Homeschooling+ Pusdinash dapat menjangkau peserta didik yang terpisah oleh jarak. "Murid kami ada yang tinggal di Papua, Malang, Bali, dan bahkan di Malaysia," sambung Berliana.

Meski sebagian besar waktu belajar-mengajar berlangsung secara online, pada masa-masa mendekati ujian kesetaraan di setiap akhir jenjang, ilmu umum



akan diperkuat agar siswa dibekali maksimal dalam menghadapi ujian. "Salah satunya dengan proses belajar-mengajar secara tatap muka (offline) terpusat di tempat yang sudah kami sediakan," kata Berliana.

Berikut wawancara **Hj Elis Sukma** dari *Info Indonesia* dengan **Berliana Bermawi** di kantornya, kawasan Jalan H Samali, Pancoran, Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2025:

Homeschooling+ merupakan pengembangan dari Pusdinash. Pusdinashnya sendiri bagaimana?

Pusdinash kita fokus di online sampai saat ini. Kami menyelenggarakan

kursus kursus bahasa Arab, tajwid dan tahfiz Quran, Islamic studies. Ada juga senior school untuk yang lansia (lanjut usia) dan bimbel (bimbingan belajar) matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran umum yang diujikan termasuk sains: fisika, kimia, biologi. Semua online. Tapi, kami adakan juga kegiatan offline seperti special case misalnya anak ini hanya bisa konsentrasi kalau offline, atau sudah kelas 6 SD mau ujian. Nah yang begitu kami izinkan untuk offline, tatap muka, tapi harus di kantor kami harus di sini belajarnya. Bukan tenaga pengajarnya yang keluar.

Ada peluang pengembangan ke sekolah formal?

Ke depannya, insya Allah, jika sudah punya center sendiri, mungkin saja kami



akan adakan sekolah offline atau formal. Termasuk personal service gitu ya, untuk kursus atau kelas khusus. Insya Allah, ada rencana ke sana.

Untuk Pusdinash dan HS+P, apa jaminan kompetensi penyelenggaranya?

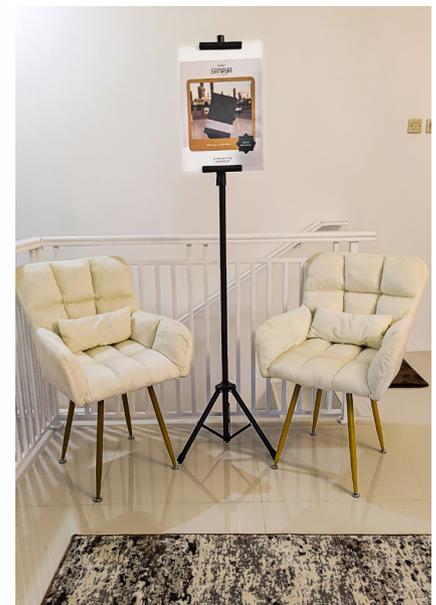
Kami punya standardisasi yang jelas. Para pengajar itu sudah lulus LIPIA (Lembaga Ilmu pengetahuan Islam dan Arab), atau Ma'had (lembaga) dari Madinah atau dari Yaman untuk ilmu agamanya. Untuk pengajar ilmu umumnya semua kebanyakan berpengalaman, juga minimal sudah tersertifikasi sebagai guru. Jadi memang kami sudah berkomitmen,

kami buka HS+P dari jenjang SD sampai SMA. Mau muridnya 1-2, kami tetap berjalan sebagaimana sebuah kelas, sebuah sekolah gitu ya. Once kita buka kelas kami benar-benar cari pengajar yang kompeten.

Sejauh ini bagaimana perkembangan HS+P?

Tahun ajaran 2024 2025 ini sekarang ini tahun pertama kami. Tahun ajaran depan ini tahun kedua kami. Alhamdulillah saya cukup bersyukur ya, cukup merasa puas dengan yang berjalan setahun ini. Untuk tahun kedua, kita berusaha lebih baik lagi. Murid kami ada yang tinggal di Papua, Malang, Bali, dan bahkan di Malaysia.

Bisa begitu ya dengan sistem online?



Ya bisa dong hehehe. Begitu juga dengan para guru. Guru kimia kami ini orangnya di Thailand sedang ambil S-3 kimia. Guru IPA kami, dia S-2 lulusan Osaka Jepang gitu. Jadi kami juga memilih guru itu agak tinggi ya standardnya. Selanjutnya jika memungkinkan kita juga berencana membuat ma'had aliy (perguruan tinggi).

Kalau alumni Pusdinash bagaimana?

Ini satu contoh saja ya yang sudah selesai di level 8 di bahasa Arab itu selevel SMA dia sudah selesai. Waktu ujian, dia kita kasih pilihan tema untuk menulis, dia presentasikan semua dalam bahasa Arab dan nanti yang mendengarkan itu

● WAWANCARA

guru-guru bahasa Arab kami, jadi ada pertanyaan dalam bahasa Arab. Kami berharap itu bisa menjadi bekal bagi dia untuk misalnya dia meneruskan kuliah di Saudi atau di Qatar atau negara lain yang berbahasa Arab atau mungkin dia akan bekerja satu hari di perusahaan yang kerja sama dengan negara negara berbahasa Arab itu bisa sebagai modal bagi dia. Si anak itu masya Allah ya, dia juga

ekspor dan juga e-commerce (perdagangan online). Karena itu produknya kami pilih yang premium agar layak mewakili nama Indonesia di luar negeri. Itu semua produk Indonesia atau sudah diolah di Indonesia. Motto Samaya Living itu Muslim Daily Needs, apa yang dibutuhkan seorang muslim sehari-hari. Alquran jelas ya, sajadah, mukena, sarung, gitu kan? Mukenanya juga mau

pariwisata. Terakhir ayah sampai duduk sebagai GSA (General Sales Agent) Saudi Airline. Ada juga bisnis travel sampai ke Australia. Saya sempat tinggal di sana dan ikut belajar, benar-benar mengurus sendiri, termasuk mulai memberangkatkan jamaah umrah. Kan memang Saudi ketat lah ya aturan-aturan seperti itu ya. Jadi saya sudah cukup terbiasalah dengan itu. Setelah itu saya vakum. Tapi, pada akhir 2022 ada beberapa teman dan suami saya mengajak mengembangkan Fatuha untuk cabang Jakarta. Di Surabaya sudah ada, di Makassar juga, masa di Jakarta Capital City nggak ada? Jadi, ayo Ummu Aiman, di Jakarta. Oke. Ya sudah bismillah.

Fatuha itu seperti Patuha nama gunung di Bandung?

Ya mirip apalagi saya juga orang Bandung. Tapi, fatuha itu dari kata fath, kemenangan. Motto Fatuha itu "Menjemput Panggilan-Nya, Menggapai Ridho-Nya." Yang diutamakan adalah kenyamanan jamaah berbekal ilmu syar'i. Jadi sesuai sunnah Inshaallah, gitu ya. Suami saya Ustad Zulkarnain itu arahan syar'i nya dari beliau. Mengantarkan jamaah melihat Ka'bah mengantarkan jamaah melihat Masjid Nabawi itu sudah masya Allah. Buat saya itu satu profit yang luar biasa. Tapi, terus terang, di bidang travel ini subhanallah risikonya juga tinggi ya. Kalau kita reschedule tiket atau qodarullah ada visa problem tuh seperti kemarin (haji furoda gagal berangkat), itu kan tinggi risikonya. Kan ada istilah orang-orang travel tuh jantungnya harus seputuh.

Jadi, bagaimana dengan haji furoda yang gagal berangkat itu?

Qodarullah (sudah ketentuan Allah), kami ada 300 lebih yang siap haji furoda tapi gagal berangkat. Kita tidak mungkin membebani jamaah. Tapi Fatuha Jakarta tugasnya mempersiapkan perlengkapan jamaah, ada sekitar 18 produk per orang jamaah haji, masih bisa masuk Arab Saudi. Alhamdulillah. Untuk haji furoda yang jelas pemerintah Saudi sedang merapikan karena banyak hal yang dinamis penyelenggaraannya, penanganannya. Yang paling difokuskan sebenarnya yang ilegal. Tapi kejadiannya, semua jalur penerbitan visa tertutup sehingga banyak jamaah furoda gagal berangkat. ●



dia sudah selesai juga 30 juz menghafal Quran, tahfiz. Khusus program tahfiz, ada bapak-bapak ada yang dokter, ada ibu-ibu rumah tangga juga, ada anak SD SMP SMA semua ada Alhamdulillah. Nah kebetulan si anak kecil yang selesai itu dia mengejar di mushola dekat rumahnya. Sekarang di homeschooling itu kami ingin perkuat. Inshaallah kuat dalam ilmu umum, ilmu diniyah juga. Komplit aqidah, fiqih, semua ada, shirah, tajwid juga ada. Nah ada juga life skill. Life skill itu menanamkan wirausaha.

Ibu sudah menjadi contoh dengan bisnis Samaya Living?

Samaya Living itu sebenarnya tanda cinta untuk Indonesia. Tujuan utamanya

yang traveling atau untuk di rumah? Sajadah juga untuk traveling atau di rumah? Daily needs buku agama kita kan harus terus belajar dan menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, jadi saya sediakan juga. Termasuk buku-buku cerita anak maupun buku untuk muslim dewasa. Tumbler juga ada ya, kan semua orang perlu minum. Terus notebook, bolpoint, parfum juga, kita muslim juga juga mesti wangi.

Kalau Fatuha Tour and Travel?

Subhanallah, dari saya kecil saya sudah denger tuh urusan travel. Yang tiket, yang hotel dan segala macam pemahaman dari ayah. Kebetulan ayah saya itu dari dulu memang dari dunia travel dan

PUSAT STUDI ISLAM AL QURAN DAN AS SUNNAH

BELAJAR YUK !

29 APRIL -
24 AGUSTUS 2025
DZULQA'DAH 1446 H -
SAFAR 1447 H

ONLINE CLASS

WIB- JAKARTA TIME

Tajwid Tahsin Kelas Formester P

Sudah bisa membaca dengan baik dan benar, namun masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Lancer membaca, kecapaian jazy, kosa kata, tajwid, memantapkan dan menghidupkan makhorul Hur mendo dan sebagainya.

Tahsin Tahfiz Anak

Agar Menghafal (Sudah bisa baca?) Book 010

330.000/bulan

Sabtu & Ahad : 08:00 - 08:00 (Akhwat Level Talaqqi - Uszh Asma')
Sabtu & Ahad : 20:00 - 22:00 (Ikhwah Level Talaqqi - Ust. Mubarak)
Senin & Rabu : 16:00 - 18:00 (Banin Level Tamhidi - Ust. Ukkasyah)
Sabtu & Ahad : 16:00 - Maghrib (Banat Level Tamhidi - Uszh. Azzah)

BAHASA ARAB PERCAKAPAN

KITAB AL 'ARABIYYAH BAYNA YADAIK

MEMBANTU PEKERJA & PELAJAR DALAM BELAJAR

4 BULAN - 11500
UJIAN KEAKSIAN LISAN DAN TULISAN & SERTIFIKAT

350.000/bulan

Selasa & Ahad : 20:00-21:30/Sabtu & Ahad: pagi
Level 1A - Ustadz Ahmad Yakin
Senin & Rabu: 16:30-18:00
Level 1B - Ustadz Beri Betrik
Sabtu & Ahad : 08:00 - 09:30
Level 2A - Ustadz Dzulfathoni

Sampai dengan level 4B
Placement Test bagi peserta baru.

SENIORS SCHOOL

60 tahun keatas

400.000/bulan

Rabu & Kamis : 09:00 - 11:45 (Level 1)
Rabu & Kamis : 09:00 - 11:45 (Level 8)

Dibimbing oleh:
Ustadz Hudzaifah: Aqidah, Fiqih, & Adab
Ustadzah Ummu Ayman: Tajwid

Pendaftaran terbuka hingga kuota terpenuhi

Program Belajar 4 bulan untuk anak, remaja, dan dewasa Formester 9:
Selasa, 29 April 2025
Ahad, 24 Agustus 2025

- Pembelajaran terstruktur
- Level pemula - lanjutan
- Ujian & e-sertifikat
- Semi Privat, maks 10 peserta
- Al 'Arabiyyah Bayna Yadaik
- Pengajar berpengalaman;
- Alumni Lipia, hafizh Al Quran

Terdapat Juga Program :

- Tahfiz 30 Juz
- Khatam 20 hari
- Matematika SD, SMP, SMA
- Bahasa Inggris
- Privat Tajwid, Bahasa Arab Qawaid dan Hiwar, Islamic Studies (Bhs. Indonesia/ Bhs. Inggris)

Lembaga Pendidikan Berbasis Online untuk Ummat di mana pun berada

PUSDINASH - Jakarta
www.pusdinash.com
ig & fb : @pusdinash
+62 811 1719 101
+62 811 1719 102



Tingkat SD, SMP, SMA

HomeSchooling+ Pusdinash

Dibimbing oleh para pengajar yang kompeten dan berpengalaman

Keunggulan :

- ✔ Program menghafal Al Quran 30 juz
- ✔ Efisien waktu, tenaga dan biaya, mempelajari ilmu syar'i dan ilmu umum
- ✔ Pengembangan life skill
- ✔ Peminatan IPA dan IPS
- ✔ Kegiatan offline terjadwal

Pendaftaran

- Hubungi Admin Pusdinash
 - Form Pendaftaran di Website
- PUSAT STUDI ISLAM AL QURAN & AS SUNNAH
www.pusdinash.com/homeschooling

Informasi

- ☎ 0811 1000 6610
- 📧 @homeschooling.pusdinash
- 📧 homeschooling@pusdinash.com

UBAH SETIAP KILOMETER JADI PELUANG BELAJAR

Golden Rama Tours & Travel, salah satu pionir perjalanan wisata di Indonesia, menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui peluncuran kampanye MILES (Membangun Inspirasi Lewat Setiap Perjalanan) yang diusung dalam inisiatif World Marathon Charity Initiative.

Berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (Y CAB), Golden Rama tidak hanya mengantarkan pelari Indonesia menjelajahi destinasi marathon kelas dunia, tetapi juga menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari misi sosial: berlari untuk masa depan yang lebih baik.

Bertempat di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta, acara penyerahan donasi digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pelari dan pelanggan Golden Rama dalam program World Marathon Series 2025. Donasi sebesar lebih dari Rp 100 juta diserahkan Golden Rama kepada Y CAB Foundation, sebagai tahap awal dukungan terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari

keluarga prasejahtera melalui program pemberdayaan Y CAB.

Beyond Travel: Komitmen terhadap Pendidikan

President Director Golden Rama Tours & Travel, Madu Sudono, menjelaskan, makna perjalanan di era modern telah berevolusi.

“Selama lebih dari 53 tahun, Golden Rama hadir bukan hanya untuk mengantarkan pelanggan ke destinasi impian, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata. Kami percaya bahwa keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan dengan kontribusi terhadap masyarakat, dan pendidikan adalah akar dari perubahan yang berkelanjutan. Kami memilih Y CAB sebagai mitra strategis karena visinya



yang sejalan: membekali generasi muda dengan akses dan pendampingan untuk masa depan yang lebih baik,” kata Madu Sudono.

Dalam acara ini, Golden Rama memperkenalkan MILES (Membangun Inspirasi Lewat Setiap Perjalanan) sebagai bagian dari inisiatif Langkah Baik, payung program keberlanjutan perusahaan yang dibangun di atas tiga pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, dan kebudayaan.

“MILES bukan sekadar inisiatif donasi untuk pendidikan. Program ini adalah refleksi dari nilai-nilai yang kami pegang, yakni kepedulian, kolaborasi, dan kontribusi berkelanjutan. Karena bagi kami, keberlanjutan bukanlah pelengkap bisnis, melainkan

dan VIBE Golden Rama, Lucky Albertinus, menjelaskan, keterlibatan Golden Rama dalam World Marathon Majors merupakan perwujudan dari tren sport tourism yang kini berkembang menjadi gaya hidup bermakna.

“Generasi masa kini mencari pengalaman yang berkesan dan berdampak. Melalui World Marathon Charity Initiative, kami menggabungkan tiga nilai utama, eksplorasi destinasi, semangat olahraga, dan kontribusi sosial. Ini bukan hanya tentang berwisata, tapi tentang berlari untuk perubahan,” kata Lucky.

la mengatakan banyak marathon internasional kini mengintegrasikan kegiatan amal dalam event mereka.

dan organisasi sosial.

“Kami percaya bahwa perubahan sosial bukan hanya tanggung jawab lembaga nonprofit, tapi perlu partisipasi kolektif dari berbagai pihak. Kemitraan dengan Golden Rama menunjukkan bahwa semangat berlari bisa membawa dampak nyata bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera,” kata Lusman.

Donasi yang diberikan akan digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak muda yang memiliki semangat belajar tinggi, namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Setiap langkah para pelari adalah simbol harapan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, terlepas dari latar belakang mereka.



Selama lebih dari 53 tahun, Golden Rama hadir bukan hanya untuk mengantarkan pelanggan ke destinasi impian, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata.

kan jantung utama brand kami,” tambah Madu Sudono.

Lebih lanjut, Madu Sudono memberikan apresiasi atas semangat para pelari yang tergabung dalam program ini.

“Partisipasi mereka bukan hanya tentang pencapaian personal, tetapi juga menjadi simbol solidaritas sosial. Bersama, kita berlari bukan sekadar untuk melewati garis finis, melainkan untuk membuka jalan bagi anak-anak bangsa agar memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Inilah esensi dari perjalanan yang bermakna,” ujarnya.

Dari Sport Tourism Menuju Aksi Sosial Berdampak

Memperkuat semangat tersebut, General Manager Hotel Package



“Golden Rama hadir sebagai jembatan bagi masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam gerakan global ini. Sport tourism kami yakini sebagai sarana strategis untuk mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ungkap Lucky.

Kolaborasi Membuka Jalan Masa Depan

Head of Program Management Department YCAB Foundation, Lusman Yunarto, menyambut baik kolaborasi dengan Golden Rama sebagai perwujudan sinergi antara sektor swasta

Travel with Purpose: Visi Jangka Panjang Golden Rama

Golden Rama meyakini bahwa perjalanan lebih dari sekadar destinasi. Melalui Langkah Baik, perjalanan menjadi sarana refleksi, koneksi, dan kontribusi nyata bagi dunia.

“Kami ingin menjadi mitra perjalanan hidup pelanggan, di mana setiap kilometer menyimpan harapan dan setiap langkah memberi dampak. ‘Run for a Better Future’ bukan sekadar slogan, melainkan semangat yang kami bawa dalam setiap inisiatif kami,” tutup Lucky. ●



RELASI MEGAWATI-PRABOWO MENUNGGU PDIP GABUNG ISTANA

Relasi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya kian erat.

Prabowo bertemu Megawati, yang juga Presiden kelima RI, sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Prabowo menyalami Megawati yang duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden 1993-1996 Try Sutrisno. Megawati kini menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan Try merupakan wakilnya. Oleh karena itu, keduanya mengenakan baju putih dengan emblem BPIP di bagian lengan kiri.

Tak hanya menyalami, Prabowo pun sedikit membungkukkan badannya. Setelahnya, Prabowo mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada sembari mempersilakan keduanya duduk.

Perbincangan ringan ini menjadi pembuka pertemuan kembali Prabowo

dan Megawati. Pada 7 April lalu, Ketua Umum Partai Gerindra dan PDIP itu sempat bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Hal ini menjadi pencair kebekuan komunikasi setelah persaingan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertemuan juga sempat memunculkan rumor PDIP akan bergabung menjadi bagian dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Namun, hingga kini, PDIP memilih mendukung pemerintah sembari tetap menjadi partner kritis di parlemen.

Setelah bertemu Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Megawati kemudian menerima Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Teuku Umar. Sejumlah spekulasi pun muncul dari interaksi yang intens itu.

Dasco mengatakan, dirinya dan Pra-



setyo Hadi bertemu dengan Megawati karena diutus oleh Prabowo untuk menyampaikan pesan konfidensial yang tak bisa diungkapkan ke publik. Dia mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.

“Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.

Di sisi lain, dia pun belum menegaskan terkait kemungkinan PDIP yang berpotensi masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, pertanyaan itu kerap timbul setiap ada pertemuan antara Partai Gerindra dan PDIP.

“Kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas pembahasan soal itu,” kata Dasco.

Sebelumnya, Dasco juga menyebut pertemuan Prabowo dengan Megawati pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila membuat suasana bangsa menjadi adem.

“Kan adem suasananya, ya suasana yang bagus menurut saya,” kata Dasco.

Dia menjelaskan, acara tersebut dis-

elenggarakan BPIP. Namun, ada keputusan presiden yang meminta agar acara itu dirayakan bersama.

“Sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan,” katanya.

Di sisi lain, Dasco juga meminta agar pertemuan Prabowo dan Megawati itu tidak dikait-kaitkan dengan koalisi politik. Menurut dia, belum ada pembicaraan apa pun soal potensi PDIP untuk berga-

bung dengan kabinet.

“Saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi begitu,” katanya.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan simbol bahwa seluruh pihak ingin membangun bangsa Indonesia.

“Kita harapkan itu juga tidak hanya



sekadar simbol, tapi betul-betul mari kita bersama-sama membangun bangsa, saling menghormati,” kata Ganjar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu, 7 Juni 2025.

Ia menilai, pertemuan antara dua tokoh itu tidak akan menjadi yang terakhir. Sebab, masih besar kemungkinan Megawati kembali bertemu dengan Prabowo.



Namun, Ganjar belum bisa memastikan waktu pertemuan antara Megawati dan Prabowo selanjutnya. Mengingat, saat ini dua tokoh itu masih sibuk dengan urusannya masing-masing.

“Mungkin. Karena apa namanya, nasi gorengnya belum dimakan gitu. Nanti kalau nasi gorengnya sudah dimakan berarti akan ada pertemuan. Kan satu berharap dimasak nasi goreng, satu sudah menyiapkan bumbunya untuk dimasak kan. Cuman momentumnya saja, karena kedua beliau masih sibuk,”

kata dia.

Ketika ditanya soal sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, Ganjar mengatakan, partainya selalu punya sikap, yaitu setia pada konstitusi. Namun, pihaknya akan selalu akan mendukung langkah baik yang dilakukan pemerintah.

“Kita positif saja kan, kasih kesempatan pemerintah ini memimpin. Baik pasti kita dukung, kurang pasti kita koreksi,

gitu kan. Maka kita, kalau lah kemudian ada statement keras, itulah rasa cinta kita pada bangsa ini dan pada pemerintah ini,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pertemuan Sufmi Dasco Ahmad dengan Megawati adalah bagian dari upaya silaturahmi yang harus dihargai.

Menurut Bahlil, silaturahmi merupakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar sesama dan sangat di-

anjurkan di seluruh agama.

“Kalau kita melihat dari makna Idu-ladha, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ‘kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi. Jadi, pertemuan Megawati dan Dasco enggak ada yang salah,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat, 6 Juni 2025.

Meski demikian, Bahlil enggan mengomentari lebih spesifik terkait dengan dua tokoh partai tersebut.

Keseimbangan Politik

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai pertemuan Sufmi Dasco Ahmad dan Megawati menunjukkan pemerintah hendak menjaga keseimbangan politik dengan semua kalangan.

Hal serupa juga telah dilakukan lebih dahulu, misalnya Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjaga relasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dahulu misalnya Istana terlihat lebih condong ke Solo kedekatan politik. Akan tetapi, belakangan dengan Teuku Umar juga terlihat terbangun keakraban, termasuk keakraban dengan Cikeas,” ucapnya.

Adi meyakini kemesraan yang terjalin antara Prabowo dan Megawati akan membawa dinamika pada peta politik di Tanah Air.

Terkait dengan pembahasan dalam pertemuan itu, dia memandang pembicaraan berkuat pada dua hal, yakni terkait dengan kebangsaan dan politik.

“Pertama urusan kebangsaan, menyamakan persepsi, merajut kerja sama politik, dan lain sebagainya. Kedua, mungkin juga bicara politik mutakhir, seperti bagaimana atasi pengangguran, kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan mungkin juga berbicara dinamika DPR, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Analisis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai arah peta politik PDIP masih akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di luar kabinet usai pertemuan Sufmi Dasco Ahmad dan Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, pertemuan tersebut tak ubahnya upaya Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus kepada Megawati.

"Menurut saya masih sama saja, (PDIP) mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet," kata Hendsat, sapaan akrabnya.

Dia memandang, bentuk dukungan yang diberikan PDIP kepada Prabowo berbeda. Sama halnya dengan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada PDIP dalam bentuk berbeda.

Dia pun menilai PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.

"PDI Perjuangan beberapa kali menyampaikan mendukung program Pak Prabowo," ucapnya.

Prabowo memberikan dukungan dengan tidak mengambil 'kenikmatan' yang dimiliki oleh PDIP, seperti mengambil atau mengurangi jabatan yang sudah dimiliki oleh PDIP sekalipun mampu.

Dia mencontohkan, kursi Ketua DPR yang diduduki oleh Puan Maharani tidak diutak-atik dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3).

"Padahal kan dengan kekuatan 80 persen di parlemen bukan hal yang sulit buat Pak Prabowo dan Gerindra mengganti Undang-Undang MD3, sehingga Mbak Puan tidak lagi menjadi Ketua DPR. Ada kader-kader PDI Perjuangan yang tetap mendapat jabatan duta besar misalnya," tuturnya.

Menurut dia, sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut, tak ubahnya seperti yang pernah terjadi ketika era pemerintahan SBY.

"Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY," kata dia.

Sementara itu, peneliti senior Citra Institute, Efriza, berpendapat, sosok Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting di balik pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di peringatan Hari Pancasila.

Dia menyebutkan Dasco ditengarai amat berperan penting sebagai penyampai pesan dan perekat hubungan antara Prabowo dan Megawati.

"Jadi, Dasco ditengarai yang mey-

akinkan Megawati bahwa kehadirannya amat penting bagi simbol persatuan di negeri ini sebagai bagian dari perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila," kata Efriza.

Dia menjelaskan, Dasco adalah tokoh yang amat penting bagi Presiden Prabowo, selain untuk kepentingan Gerindra, juga untuk mengawal kebijakan di DPR dan membina hubungan maupun

terlihat nyaman saat ada Gibran. Padahal, selama ini PDIP dan keluarga Jokowi digambarkan terjadi konflik politik.

"Kenyamanan Megawati ini disinyalir ada komunikasi yang menyejukkan disampaikan Dasco sehingga Megawati bisa enjoy," katanya.

Menurutnya, Dasco adalah tokoh utama yang berperan penting mewujudkan keinginan Prabowo.



menyampaikan pesan terhadap tokoh-tokoh penting, utamanya Megawati.

Efriza meyakini, meski hubungan Prabowo dan Megawati harmonis dan bersahabat, tetapi sikap keteguhan pendirian Megawati atas satu hal yang sulit digoyahkan.

"Namun, tentu saja pertemuan Dasco itu bukan sekadar penghubung, penyampai pesan, tetapi tokoh yang amat dihargai pendapatnya, sehingga Megawati dapat nyaman dan terlihat senang hati datang di acara peringatan hari lahir Pancasila," jelasnya.

Hal itu tercermin saat Megawati juga

"Rasanya Dasco ini bukan saja pandai berkomunikasi, tetapi dia cerdas dalam membangun kekompakan antara presiden dengan para mantan presiden," kata Efriza.

Dia meyakini jika tanpa Dasco, keinginan dan ide Prabowo tidak akan terealisasi dengan mulus.

"Contoh untuk meyakinkan Megawati bertemu Prabowo dan datang ke acara penting hari lahir Pancasila. Termasuk menjaga keharmonisan Prabowo dan Jokowi setelah Pemilu 2019 ini semua diyakini ada peran penting Dasco," kata Efriza. ●



NEGARA HADIR UNTUK LANSIA

Kementerian Sosial menegaskan negara akan selalu hadir untuk para warganya yang sudah lanjut usia atau lansia. Dengan berbasis data tunggal, intervensi yang diberikan akan tepat sasaran.

“Lansia bukan beban bangsa. Kami ingin lansia menua dengan bahagia, bukan air mata. Kami ingin mereka tersenyum, bukan tersingkirkan,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2025 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu, 31 Mei 2025.

Gus Ipul menegaskan, negara yang besar adalah negara yang menghormati mereka yang berusia lanjut. Perhatian negara kepada lansia tergambar nyata dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Kemensos. Di antaranya PKH menjangkau lebih dari 5 juta lansia, program BPNT menjangkau 8 juta lebih lansia, ATENSI lansia yang telah disalurkan kepada 156.042 lansia, serta beberapa program lainnya.

“Tentunya program-program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, sesuai Inpres 4/2025, semua bantuan sosial mengacu pada DTSEN untuk memastikan program dapat terukur dan terarah. Program-program yang menasar lanjut usia pun akan terus ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.

“Tentu sesuai arahan Presiden,

kami terus tingkatkan program-program untuk lansia, terutama yang memerlukan bantuan dan dukungan, seperti lansia yang kurang mampu, lansia terlantar,” katanya.

Dalam HLUN 2025 tersebut, sebanyak 1.300 lansia mengikuti operasi katarak gratis yang digelar Kemensos di 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Salah satu titik pelaksanaan ope-

rasi katarak gratis di RSD Dr Soebandi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dikunjungi langsung oleh Gus Ipul.

“Hari ini berbahagia bisa melaksanakan HLUN di Jember, salah satu kegiatan operasi katarak, lebih dari 1.300 pasien secara nasional mendapatkan manfaat (operasi katarak),” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan Kemensos akan terus memberikan layanan-layanan kepada lansia yang membutuhkan bantuan seperti operasi katarak, melalui kolaborasi dan sinergi yang apik dengan berbagai Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah maupun swasta.

“Mereka (lansia) rata-rata puas dan nyaman mengikuti proses operasi katarak,” ujarnya.

Kegiatan operasi katarak di RSD Dr Soebandi, Kabupaten Jember, berlangsung dari 27 Mei Sampai 2 Juni dengan beberapa tahapan proses, mulai asesmen, screening, pelaksanaan operasi, dan kon-



trol pasca operasi.

Jumlah calon pasien katarak yang terdaftar khusus di Jember adalah 397 orang. Setelah melalui proses screening, peserta yang berhasil lolos ke meja operasi 272 orang. Operasi dilakukan selama dua hari, pada 31 Mei sebanyak 111 pasien dan 1 Juni sebanyak 161 pasien.

Acara puncak peringatan HLUN 2025 di Alun-Alun Jember diikuti dengan suka cita oleh sekira 4.000 lansia.

"Terima kasih sudah disambut meriah di Jember. Matur nuwun Pak Bupati, kita bisa kerja sama untuk selenggarakan Hari Lanjut Usia Nasional 2025, mudah-mudahan lansia makin bahagia Indonesia sejahtera," ujar Gus Ipul.

Di atas panggung, Gus Ipul tampak semangat mengikuti senam didampingi sang istri Fatma Saifullah Yusuf, Bupati Jember Muhammad Fawait, dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto, serta jajaran Kemensos dan Pemkab Jember.

Di tengah keseruan senam, Gus Ipul menyampaikan pesan bahwa peringatan HLUN bukan hanya bermakna bagi lansia, tapi juga menunjukkan kerja negara untuk lansia.

"Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orang tua kita," ujar Gus Ipul.

Dari DTSN menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta jiwa. Artinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat. Sejak 2021, misalnya, jumlah lansia mencapai 12 persen dari total populasi penduduk. Angka tersebut diprediksi akan bertambah hingga 20 persen pada 2045.

Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah lansia terbanyak hingga mencapai lebih dari 6 juta orang. Lansia Kabupaten Jember mencapai lebih dari 415 ribu jiwa lansia.

"Artinya warga Jember ini harapan hidupnya tinggi. Usianya panjang panjang. Itulah sebabnya HLUN 2025 kami pusatkan di Jember karena dari sini suara lansia menggema paling kuat seantero Indonesia," kata Gus Ipul.

Selain fokus pada kuantitas lansia yang terus meningkat, Kementerian

Sosial berupaya meningkatkan kualitas.

"Pertanyaan kita bukan soal jumlah, tapi apakah lansia sudah sejahtera dan bahagia. Mari kita buktikan ke depan. Kemensos akan terus bekerja. Kami akan bergerak dari data ke tindakan dari kebijakan ke pelukan," urai Gus Ipul.

Peringatan HLUN 2025 di Jem-

rak, layanan hak sipil, rumah sejahtera terpadu, TPPSE dan kewirausahaan lansia, serta permakanaan lansia dengan total nilai Rp21.394.687.000.

Suasana bahagia dan penuh kehangatan juga menyelimuti Alun-Alun Jember saat Gus Ipul membacakan puisi berjudul "Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera".

Puisi yang dibacakan Gus Ipul bu-



ber menjadi wujud nyata kehadiran negara. Lewat rangkaian aksi sosial langsung, pemerintah menegaskan kebahagiaan lansia bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tapi merupakan bagian dari cita-cita kolektif menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial.

Bantuan sembako dan nutrisi, aksesibilitas, sarana kamar, operasi kata-

kan sekadar rangkaian kata, melainkan penghormatan tulus atas jasa para lansia yang telah menjadi tiang penyangga keluarga dan bangsa. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebahagiaan lansia sebagai ukuran kesejahteraan bangsa.

"Karena jika lansia tersenyum, berarti negeri ini sedang baik-baik saja," kata Gus Ipul. ●

Berikut puisi yang dibacakan Gus Ipul:

Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera

Di tangan renta tersimpan cerita,

Tentang kerja keras tanpa pamrih demi keluarga.

Tentang malam-malam tanpa tidur, demi anak bisa sekolah,

Tentang doa yang terus hidup, meski tubuh mulai lelah.

Kini, izinkan kami memanjakan mereka guna menikmati senja,

Dengan cinta, bukan luka.

Dengan pelukan, bukan kesepian.

Dengan hormat, bukan pengabaian.

Mari kita jaga mereka sebagaimana dulu mereka menjaga kita.

Karena bahagia mereka adalah ukuran kemanusiaan kita.

Karena jika lansia tersenyum, berarti negeri ini sedang baik-baik saja.

Lansia bahagia, Indonesia sejahtera.

HAPUS DISKRIMINASI REKRUTMEN TENAGA KERJA

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menghapus batasan usia sebagai syarat dalam proses rekrutmen kerja. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja.

"SE ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terkait prinsip non diskriminatif agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara objektif dan adil," kata Menaker, Yassierli, di Kantor Kemnaker, 28 Mei 2025.

Yassierli mengatakan, dunia kerja harus menjadi ruang yang adil, inklusif, tanpa diskriminasi, dan mampu mem-

berikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dia tak menampik dinamika praktik rekrutmen saat ini memiliki beberapa proses yang cukup diskriminatif, di antaranya adalah pembatasan usia, persyaratan berpenampilan menarik, warna kulit, suku, dan lainnya.

"Poin utama dari SE ini adalah (melarang) diskriminasi atas dasar apa pun dalam rekrutmen tenaga kerja," tegasnya.

Namun, terkait pembatasan usia, ia mengatakan ada persyaratan lain yang bisa menjadi pengecualian. Pertama, untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.

Selain itu, Menaker juga mengatakan

larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

"Harus tanpa diskriminasi dan sesuai dengan kompetensi pekerja," tegas Yassierli.

Melalui SE ini pula, Menaker berharap pemerintah daerah dan dunia usaha dapat mendorong proses rekrutmen yang menjunjung nilai kesetaraan.

"Menjadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki praktik rekrutmen yang lebih transparan, adil, dan berbasis kompetensi. Sehingga dunia kerja Indonesia menjadi inklusif dan semakin kompetitif," ujar dia.

Tak berselang lama, Yassierli mengatakan ada pertimbangan untuk membuat aturan yang lebih tinggi daripada Surat Edaran terkait larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja.

"Memang, banyak pertanyaan terkait seefektif apa (kekuatan) SE? Surat Edaran merupakan bentuk komitmen dari pemerintah bahwa kami peduli," ujar Menaker.

Menurutnya, untuk membuat SE men-



jadi aturan yang lebih tinggi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kolaborasi lintas kementerian.

"Tentu untuk keluar dengan regulasi yang lebih tinggi itu perlu waktu dan kami sedang menyiapkan itu. Ini membutuhkan harmonisasi di lintas kementerian. Jadi itu sedang kita siapkan," kata dia.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, mengeklaim pemerintah sebenarnya ingin menerbitkan aturan yang derajatnya lebih kuat terkait larangan diskriminasi ini.

Namun, ia menyebut jika menerbitkan peraturan menteri, maka pemerintah harus melakukan harmonisasi dengan regulasi lain terlebih dahulu.

"Kita enggak mau lama-lama. Kita mau cepat, ya kan. Makanya SE dulu kita keluarkan, kemudian baru peraturan menteri," kata Immanuel kepada wartawan Johannes Hutabarat, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menjelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan karena tingginya angka pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang, serta angka kemiskinan sebesar 24 juta orang.

Karena kondisi yang mendesak membuat kementerian menyiapkan surat edaran ini cuma tiga hari. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemerintah akan membuat aturan yang lebih tinggi derajatnya, seperti peraturan menteri.

"Semakin cepat, prinsipnya semakin bagus," kata Immanuel.

Mengenai sektor penyerapan tenaga kerja usia lanjut, Noel menyebut, semua sektor siap. Ia menekankan pentingnya tidak membatasi sektor untuk menghindari kesan parsial.

Noel juga menyatakan, pekerja usia lanjut dapat dipersiapkan dengan mengikuti pelatihan di pusat-pusat pelatihan kerja. "Misalnya mereka mau cari kerjaan yang lain, kita bisa masukkan mereka di BLK, misalnya re-skilling," ujarnya.

Aturan Harus Jelas

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengeklaim pihaknya bersedia mematuhi aturan yang diterbitkan pemerintah selama ada panduan yang tepat.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah sosialisasi yang masif dan dialog teknis yang terbuka agar pelaku usaha dapat memahami secara tepat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata Shinta.

Namun, Shinta menekankan, pembatasan usia untuk perekrutan ini masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Ia meminta pemerintah memberikan batasan-batasan yang jelas terkait usia kerja ini.

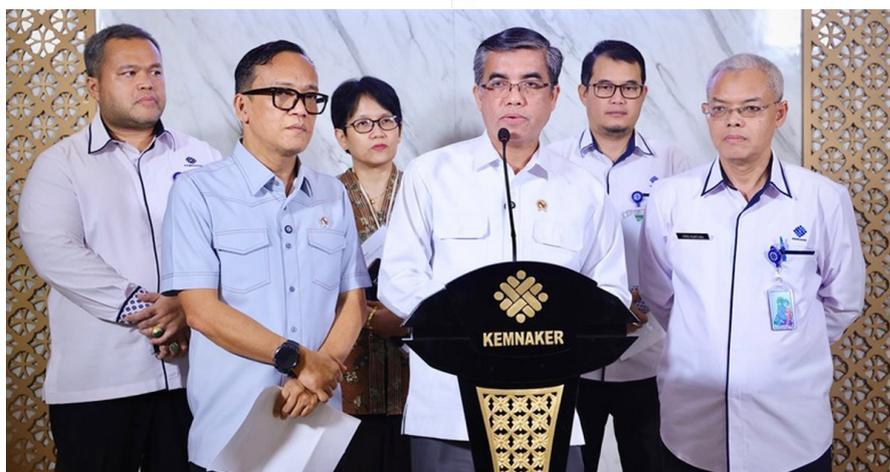
"Dunia usaha berharap pedoman pelaksanaannya dapat dirumuskan secara jelas untuk meminimalkan potensi

dan beban kerja dari suatu posisi tertentu," ujar Shinta.

Pakar isu perburuhan dan Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre (TURC), Andriko Otang, menilai, surat edaran ini tak cukup kuat menghilangkan diskriminasi usia dalam perekrutan tenaga kerja di dunia industri.

"Karena surat edaran itu secara sudut pandang tata negara, dia sifatnya adalah imbauan saja yang boleh dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh subjek hukum," kata Andriko.

Menurut Andriko, produk regulasi set-



misinterpretasi di lapangan," katanya.

Shinta juga mengeklaim syarat usia di dunia industri masih berlaku bukan bagian dari praktik diskriminasi.

"Syarat usia bukan digunakan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai mekanisme penyaringan awal, terutama dalam konteks jumlah pelamar yang sangat besar dan keterbatasan sumber daya rekrutmen di banyak perusahaan. Penyesuaian usia juga sering kali terkait langsung dengan karakteristik teknis

tingkat surat edaran ini hanya akan efektif diakomodasi selama substansinya sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Dia mencontohkan sektor-sektor tertentu, seperti makanan dan minuman cenderung mencantumkan kriteria, seperti usia di bawah 30 tahun atau penampilan. Maka, larangan diskriminasi yang hanya berupa surat edaran belum tentu dipatuhi sektor tersebut.

"Jadi, praktik implementasinya akan

• INFO NASIONAL

sangat bergantung sekali dengan karakteristik industrinya dan kepentingan dunia usahanya itu sendiri," tegas Andriko.

Andriko juga menilai terbitnya surat edaran ini sebenarnya cara pemerintah untuk menghadapi gelombang PHK di sejumlah sektor industri. "Kekhawatiran pemerintah adalah tenaga kerja yang PHK rentang 30-40 tahun atau 45 tahun ini enggak lagi terserap dalam pasar kerja," kata Andriko.

Apindo mencatat jumlah PHK mencapai 73.992 pekerja sejak 1 Januari

dibandingkan tentang usia 30-45 tahun," jelasnya.

"Karena mereka dianggap produktivitasnya sudah lebih menurun, sudah berkeluarga, beban finansialnya jadi lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu jadi faktor-faktor pertimbangan," tambah Andriko.

Andriko menambahkan, pemerintah harus mempersiapkan sejumlah hal agar pekerja usia lanjut ini bisa terserap di pasar tenaga kerja.

Pertama, pemerintah harus mem-

BLK yang tersedia sampai semester I 2024 mencapai 6.365 lembaga.

Ketiga, kesesuaian materi pengajaran pelatihan keterampilan dengan kebutuhan industri.

"Catatan dari teman-teman yang pernah mencoba untuk akses pasar kerja ini bercerita bahwa kerap kali pelatihan yang mereka dapatkan itu enggak cocok dengan kebutuhan industrinya," kata Andriko.

Awasi Ketat

Anggota Komisi IX DPR, Ravindra Air-langga, meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang masih menjalankan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

"Kami menyambut positif surat Edaran ini, khususnya terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang tak lagi mencantumkan usia. Hal ini tentu dapat memperluas akses pekerjaan, terutama bagi yang memiliki kompetensi sesuai," kata Ravindra, Rabu, 4 Juni 2025.

Menurut Ravindra, tidak mencantumkan usia dalam surat lamaran kerja sudah diterapkan di beberapa negara.

"Di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, calon pelamar kerja juga untuk tidak diwajibkan menuliskan usia dalam riwayat hidup mereka apabila mereka khawatir akan terdampak age discrimination," ujarnya.

Dia menilai, edaran tersebut merupakan langkah maju menuju proses rekrutmen yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan kompetensi.

Ravindra menegaskan, usia dan penampilan tidak semestinya menjadi tolok ukur kemampuan seseorang dalam bekerja.

"Usia bukan satu-satunya indikator produktivitas dan penampilan juga bukan tolok ukur kompetensi. Kita harus mengedepankan keadilan dalam akses kerja, terutama di sektor padat karya," ucapnya.

Ravindra menuturkan, masih banyak perusahaan yang mencantumkan batasan usia maksimal atau syarat fisik tertentu dalam proses seleksi. Hal ini menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat yang masih produktif dan membutuhkan pekerjaan, terutama pada industri padat karya.



sampai 10 Maret 2025. Gelombang PHK ini dinilai bakal berdampak besar bagi tenaga kerja yang mulai memasuki usia lanjut.

Para pekerja dari kelompok usia 30-40 tahun bakal lebih sulit diserap di pasar tenaga kerja, karena umumnya muncul penilaian miring terhadap kemampuan produktivitas mereka, meski mereka dinilai berpengalaman.

"Preferensi dunia usaha yang saat ini mulai bergeser untuk lebih melihat tenaga kerja usia muda untuk direkrut

benahi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang masih mengecualikan kelompok orang yang tak punya pekerjaan akibat mengundurkan diri dan mereka yang kehilangan pekerjaan karena kontraknya sudah habis. Pasalnya, jika kelompok ini dikecualikan, maka mereka tidak bisa mengakses pelatihan keterampilan balai-balai latihan kerja.

Kedua, jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang didirikan pemerintah masih kurang. Data Kemnaker menyebutkan

"Persyaratan seperti usia maksimal atau penampilan fisik dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang produktif dan membutuhkan pekerjaan, terutama bagi mereka yang terdampak PHK, lulusan non-formal, atau pekerja dengan pengalaman kerja panjang," ungkap Ravindra.

"Adanya persyaratan penampilan fisik menarik atau good looking dalam proses rekrutmen, saya kira tidak perlu dijadikan standar," sambungnya.

Ravindra menegaskan, pengawasan harus menjadi langkah lanjutan dari penerbitan surat edaran tersebut.

"Mendorong agar surat edaran ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat bagi perusahaan yang masih melakukan praktik diskriminatif," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, menyambut baik terbitnya edaran tersebut dan menilai kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

"Surat edaran ini merupakan angin segar bagi jutaan pencari kerja yang selama ini mengalami diskriminasi berbasis usia, jenis kelamin, disabilitas, hingga status perkawinan. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan prinsip kesetaraan di dunia kerja," ujar Alifudin.

Namun, Alifudin menekankan surat edaran saja tidak cukup kuat secara hukum untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar. Ia menyoroti pentingnya regulasi lanjutan yang memuat sanksi tegas bagi perusahaan atau institusi yang terbukti melakukan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen.

"Tanpa adanya mekanisme pen-

awasan dan sanksi yang jelas, surat edaran ini berisiko hanya menjadi seruan moral tanpa daya paksa. Pemerintah perlu segera menyusun aturan turunan dalam bentuk peraturan menteri atau revisi UU Ketenagakerjaan yang secara eksplisit melarang diskriminasi disertai sanksi administratif maupun pidana," tegasnya.

Alifudin juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melibatkan pengawas ketenagakerjaan secara aktif serta membuka kanal pengaduan publik

siawi. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. Tidak boleh ada lagi diskriminasi yang membatasi masa depan seseorang hanya karena faktor-faktor non kompetensi," kata Alifudin.

Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menilai surat edaran Menaker tidak cukup kuat menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, regulasi itu tidak akan berdampak. Pasalnya, pemerintah tidak memberi



yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif dan memastikan implementasi SE berjalan di lapangan, bukan hanya berhenti di atas kertas.

"Kita ingin dunia kerja Indonesia tidak hanya menjadi tempat yang produktif, tapi juga tempat yang manusiawi."

sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

"Oleh karena itu, kami berpendapat harus dikeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja," kata Said.

Nantinya, Permenaker itu mengatur larangan persyaratan tertentu yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dalam proses rekrutmen karyawan. Kalaupun ada industri yang membutuhkan syarat batas usia, menurut Said, hal itu perlu dengan persyaratan tertentu. Misalnya, memberi tahu dan meminta izin hingga persetujuan dari Menaker.

Ihwal larangan persyaratan usia, Said berpendapat syarat usia maksimal 25 tahun, sebagaimana sering diterapkan perusahaan, bisa mengorbankan generasi produktif. Ia juga mengatakan hal itu bisa merugikan negara karena menurunkan produktivitas nasional. Sementara, praktik itu masih tetap bisa dilakukan perusahaan karena tidak ada sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

"Surat Edaran sudah ada tapi hanya akan menjadi macan kertas," kata dia. •



PEMDA BOLEH RAPAT LAGI DI HOTEL

Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.

Tito menekankan, pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok

peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah karena pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya, sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

“Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” ujar Tito.

Tito juga menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memi-

berian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

“Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

Dia menambahkan, pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

“Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” tegas Tito.

Dia pun mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

Sebelumnya, pengusaha industri perhotelan meminta pemerintah membantu membangkitkan geliat bisnis mereka. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat, Hariyadi Sukamdani, mengeluhkan redupnya industri perhotelan yang makin terasa, ditandai dengan merosotnya okupansi hotel selama libur Lebaran 2025.

Bisnis hotel telah terpukul akibat kebijakan pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kini, industri perhotelan makin lemah karena daya beli masyarakat yang turun.

“Simpel saja kok, kami cuma minta pemerintah itu eksekusi belanjanya. Kan mau potong 50 persen, ya sudah enggak apa-apa, tapi dieksekusi,” kata Hariyadi.



makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” kata Mendagri.

Mantan Kapolri ini menyampaikan,

liki PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

Selain itu, ada juga Aceh yang hanya memiliki PAD sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan PAD sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

Pemekaran wilayah melalui pem-

Dia meminta pemerintah merealisasikan anggaran, seperti rapat, program sosialisasi, atau kegiatan lain di hotel. Hariyadi menyebutkan, saat ini, hotel kehilangan pangsa pasar dari sektor pemerintahan.

"Pada kelimpungan, pasar pemerintahnya hilang. Kami minta kuartal kedua dieksekusi belanjanya," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, mengatakan reservasi hotel oleh pemerintah untuk rencana kegiatan sepanjang tahun ini masih sangat minim. Dia menyebutkan, biasanya, di awal kuartal pertama, pemerintah telah memesan hotel untuk kegiatan-kegiatan setahun ke depan.

"Biasanya di awal kuartal pertama sudah melakukan reservasi, tinggal implementasi setelah anggarannya cair. Sekarang justru reservasinya kelihatannya hampir tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengatakan, 70 persen pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Jakarta berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tingkat okupansinya menurun.

"Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan."



yawan," kata dia.

Sutrisno mengatakan para pelaku bisnis hotel memperkirakan akan mengurangi karyawan 10-30 persen. Sebanyak 90 persen pelaku usaha juga mempertimbangkan mengurangi 90 persen pekerja harian. Kemudian, sebanyak 36,7 persen lainnya mengaku akan mengurangi jumlah staf.

Dia mengungkapkan pemangkasan tenaga kerja dilakukan karena tingkat hunian jeblok, sedangkan biaya operasional meningkat dan membebani keberlangsungan bisnis mereka. PHRI



Jakarta mencatat sebanyak 96,7 persen bos hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Berdasarkan survei yang dilakukan PHRI Jakarta, penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintahan yang mencapai 66,7 persen. Menurut Sutrisno, penurunan tingkat hunian dari segmen pemerintahan itu seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan, rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. Namun, dia meng-

ingatkan, parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.

"Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah," kata Khozin, Sabtu, 7 Juni 2025.

Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya," kata dia.

Dia menilai, surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.

"Harus ada pedoman baru agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur," kata dia.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan kajian secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hal yang dihasilkan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik.

"Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan," katanya. •

KOPERASI DESA TIDAK MATIKAN BUMDES

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

“Presiden Prabowo memastikan jika kehadiran Kopdes Merah Putih ini tidak akan mematikan BUMDes, tapi bisa seiring sejalan dan saling menguatkan,” kata Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, di Kabupaten Kaur, Bengkulu, Sabtu, 7 Juni 2025.

Presiden Prabowo menjadikan desa sebagai salah satu hal yang diperhatikan kemajuannya, sebagaimana dimuat

dalam Asta Cita keenam, yakni Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Yandri juga memaparkan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih berperan dalam mengendalikan harga bahan baku dan sembako serta memutus mata rantai tengkulak yang menyusahkan rakyat.

Pinjaman bunga tinggi dari rentenir pun bakal terputus dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Hal itu karena salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Desa Merah Putih adalah simpan pinjam.

Lebih lanjut, terdapat tujuh unit bisnis yang diwajibkan ada dalam ekosistem pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yaitu kantor koperasi, kios perdagangan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik.

Yandri juga menyebut Koperasi Merah Putih sebagai paket komplit mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pasalnya, koperasi ini bisa menjadi supplier bahan baku yang digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dalam pemenuhan beras, sayur, daging, telur, maupun lainnya.

“Koperasi ini bisa jadi penyuplai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Cabbanya, ayamnya, bisa diambilkan dari koperasi jika nanti sudah terbentuk dan berjalan. Kalau dikelola dengan baik insya Allah melalui koperasi ini akan mendapatkan untung yang besar. Semua uang akan beredar di desa bisa menyejahterakan rakyat di desa dan keluarga,” ujarnya.

Yandri pun meyakini kehadiran Koperasi Merah Putih dalam konteks ekonomi berarti menyederhanakan atau mengurangi jumlah pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi suatu produk atau layanan. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya,



dan meningkatkan kualitas.

“Petani kita itu rata-rata korban terlalu panjangnya rentang kendali distribusi, sehingga tengkulak yang untung. Kadang-kadang panen padi rugi, panen cabai rugi. Maka dengan Kopdes ini akan memotong rantai panjang tadi,” terangnya.

Kondisi perekonomian yang stabil, berkeadilan, dan merata merupakan salah satu tujuan pokok kebijakan ekonomi Koperasi Merah Putih. Strategi penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah stabilisasi harga bahan pangan di tingkat desa.

Namun, untuk menciptakan harga pangan yang stabil bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya, mengendalikan harga pangan di desa dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan Koperasi Merah Putih, di samping melakukan pemantauan harga secara rutin, dan bekerja sama dengan pedagang serta masyarakat desa.

Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai implementasi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 amat penting dilakukan lantaran menjadi harapan dan garda terdepan dalam memangkas dominasi tengkulak dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Bank Pemerintah akan memberi pinjaman dengan bunga kecil tanpa harus jadi anggota.

“Maka jangan sampai rentenir atau pihak yang terlalu banyak ruang untuk melakukan eksploitasi kepada anak bangsa melalui bunga yang besar, bunga harian, yang sifatnya sesungguhnya tidak menolong,” tegas Yandri.

Yandri juga berharap pembentukan Koperasi Merah Putih tidak kongkalikong. “Tidak boleh pendirian koperasi hanya kongkalikong, atau dibuat-buat atau hanya ditunjuk,” tegasnya.

Menurut dia, untuk memastikan proses pembentukan koperasi tidak menyalahi aturan, maka musyawarah desa dan musyawarah kelurahan khusus harus dilakukan.

“Kalau ada proses pendirian koperasi cacat secara administrasi akan dievaluasi,” ujarnya.

Pada saat pelaksanaan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan khusus, maka dibuat berita acara, dan pesertanya terdokumentasi dengan jelas.

“Khawatirnya adalah akan ada gugatan ke pengadilan atau pengadilan tata usaha negara. Ini penting untuk diantisipasi,” kata politisi PAN itu.

Yandri berharap, sejak awal pembentukan Koperasi Merah Putih harus tertib secara administrasi. Apalagi ini men-

pengurusan akta koperasi juga dapat bersumber dari biaya tidak terduga (BTT) di kabupaten dan kota. Sumber lainnya juga bisa dari pemerintah provinsi melalui dana program tanggung jawab sosial perusahaan, sama seperti dilakukan di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.



yangkut bisnis, sehingga semua orang mau terlibat.

“Kalau pembentukannya fair, tidak ada masalah,” kata Menteri.

Selain itu, Yandri mengungkapkan, sumber dana untuk pengurusan akta notaris Koperasi Merah Putih dapat diambil dari dana desa sebesar Rp2,5 juta.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengurus akta notaris. Tidak akan ada juga dana yang keluar dari dana pribadi,” ujarnya.

Selain dari pos dana desa, untuk biaya

“Jadi kalau bapak dan ibu kepala desa atau lurah mau mengurus akta notaris biayanya bisa dari BTT, dari dana desa, atau CSR (Corporate Social Responsibility),” kata dia.

Hanya saja, ia mengingatkan kepala desa atau lurah untuk tidak mengambil biaya pengurusan akta tersebut langsung dari tiga sumber, yakni dana desa, BTT, dan program CSR perusahaan.

“Hanya satu saja sumber dananya. Misalnya sudah diambil dari dana desa, keluar lagi dari BTT. Itu tidak boleh, te-

• INFO NASIONAL

muan nanti. Karena itu, harus dipastikan bahwa sumber pembiayaan hanya satu," katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Luthfy Latief, juga mengingatkan pembayaran biaya akta notaris pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat diambil dari dana desa.

"Apabila pemerintah daerah tidak membiayai akta notaris pendirian Koperdes Merah Putih, maka itu dapat digunakan dari tiga persen (dana desa)," kata Luthfy.

Luthfy mencontohkan, apabila suatu

mal digunakan untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Majukan Usaha Rakyat

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan Presiden Prabowo Subianto menggagas pendirian Koperasi Desa Merah Putih antara lain untuk memajukan usaha dari rakyat.

"Bapak Presiden ingin usaha rakyat yang maju, bukan lagi pengusaha besar yang ada di desa. Jadi, maunya Bapak Presiden adalah koperasi ini dari desa,

uhan kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.

Sebagaimana BUMDes, Koperasi Merah Putih juga mengutamakan pengembangan potensi-potensi setiap wilayah. Dengan demikian, produk satu desa dengan lainnya tidak akan sama.

Dia mencontohkan, Maluku Utara dengan kekayaan sumber daya alamnya, mulai dari rempah, nikel, hingga hasil laut harus memanfaatkan sumber daya itu secara maksimal untuk dipasarkan hingga dalam skala besar.

Dia meminta Koperasi Merah Putih harus untung karena akan didistribusi-



desa mendapatkan dana desa sebesar Rp1 miliar, pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp30 juta untuk operasional pemerintah. Dari total dana Rp30 juta itu, pemerintah desa bisa menggunakan sebanyak Rp2,5 juta untuk biaya pembentukan badan hukum di notaris.

Luthfy juga menekankan, Kementerian Desa PDT tidak akan membebani desa-desa dengan adanya beragam program pembangunan desa.

"Yakinlah, Kementerian Desa tidak pernah berpikiran sedikit pun untuk membebani teman-teman desa. Kami berikhtiar bagaimana dana desa maksi-

oleh desa, untuk desa," kata Ariza saat menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sofifi, Maluku Utara, Rabu, 4 Juni 2025.

Ariza menyampaikan, sejak pembentukan Koperasi Merah Putih mulai digagas, target menjadikan desa sebagai ruang untuk mencapai kesejahteraan semakin mudah terwujud. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, namun juga produsen serta pelaku usaha, baik dalam pemenu-

kan kepada anggota koperasi dan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat desa secara luas.

Keuntungan koperasijuga akan bermanfaat bagi unit usaha simpan pinjam. Untuk itu, maka perlu suku bunga simpanan yang menarik dan kompetitif dibandingkan lembaga keuangan lain, sehingga simpanan menjadi lebih menguntungkan.

"Jadi namanya Koperasi kalau mau panjang, itu ya harus untung. Kalau untung, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau koperasinya untung, maka usaha simpan pinjam akan lebih banyak yang menyimpan dari

pada yang meminjam. Selama ini yang kita dengar, lebih banyak yang pinjam," jelasnya.

Ariza mengaku optimistis, melalui pengelolaan yang baik dan profesional, Kopdes Merah Putih akan mampu memperkuat ekonomi desa dan menjadi pilar pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya program-program Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Apalagi, kepengurusan Koperasi Merah Putih juga terdapat dewan pengawas yang selalu mengawasi seluruh program koperasi.

Ia menekankan kepada seluruh pengurus Koperasi Merah Putih untuk menjalankan tugas sebagaimana Rasulullah SAW berdagang, yang selalu jujur dengan menggunakan prinsip Al-Amin.

Ariza juga meminta para pengurus koperasi untuk selalu bertanggung jawab, disiplin dan menepati janji agar koperasi yang dijalankan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi seluruh masyarakat.

Kementerian Desa PDT juga akan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi seluruh pengurus, baik itu di tingkat desa maupun ke tingkat nasional.

"Nanti tentu ada bimbingan, ada modul, ada panduan, ada pelatihan, bisa berjenjang, ada pelatihan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, tingkat desa dan seterusnya," tambahnya.

Mentari Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memproyeksikan Koperasi Merah Putih bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp50 triliun dalam setahun dengan menggantikan peran tengkulak dalam penyerapan gabah petani. Sehingga, akan ada Rp263 triliun yang bisa dinikmati langsung oleh petani dan konsumen.

Dia menyampaikan, pihaknya sempat melakukan penghitungan mengenai hal tersebut.

"Kalau ini terjadi artinya apa? Middleman-nya katakanlah ada untung Rp313 triliun di tengah. Kalau koperasinya katakanlah sebagai nanti middleman, itu untung Rp50 triliun, artinya ada Rp263 triliun yang dinikmati konsumen dan produsen," kata Amran.

Menurutnya, ketimpangan antara

penghasilan petani dan tengkulak sangat besar. Sebab, petani hanya memperoleh Rp1-1,5 juta per bulan, sementara tengkulak bisa meraup hingga melebihi angka tersebut.

Ia mencontohkan, dari selisih harga gabah Rp2.000 per kilogram, potensi keuntungan perantara dari total produksi

produsen ke koperasi, koperasi ke konsumen," jelas Mentan.

Dia mengkalim, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan jelas melalui berbagai kebijakan, seperti penambahan pupuk subsidi, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kg,



padi nasional bisa mencapai Rp42 triliun hanya sampai Mei 2025.

Amran juga menyoroti selama ini petani hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan per orang dari usaha tani. Padahal, jumlah petani padi Indonesia diperkirakan mencapai 100 juta orang.

"Kami pernah hitung, harga di tingkat petani dengan konsumen, antara petani dengan konsumen itu mendapatkan Rp313 triliun satu tahun. Nah, inilah nanti kita bangun koperasi. Koperasi adalah memotong rantai pasok. Nantinya dari

perbaikan irigasi, dan pendampingan intensif agar petani tidak berjalan sendiri.

Solusi untuk memangkas rantai distribusi adalah memperkuat Koperasi Merah Putih yang akan memangkas tahapan distribusi dari delapan menjadi hanya tiga tahap.

"Itu nanti posisinya (tengkulak) digantikan dan kalau itu Insya Allah terealisasi semua, sudah sempurna, ini kan baru kita berjalan. Tentu produsen kesejahteraannya meningkat, yaitu petani, kemudian konsumennya juga daya belinya naik," tegasnya. ●



TAMBANG NIKEL ANCAM RAJA AMPAT

Isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel kembali menguat dan memicu beragam perdebatan serta kecaman dari masyarakat luas.

Tak cukup hanya mengeksploitasi wilayah Sulawesi dan Maluku, kini pertambangan nikel juga mulai mengusik kelestarian alam di wilayah Papua. Bahkan, kawasan ekowisata kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, menjadi salah titik pertambangan yang masif saat ini.

Sejak kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, hilirisasi produk tambang nikel di Indonesia terus didorong peningkatan nilai tambahnya. Industrialisasi nikel menjadi sangat masif bertumbuh di sebagian wilayah Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kini, wilayah Papua pun yang sangat kaya memiliki cadangan deposit nikel tak luput dari target eksploitasi itu.

Masifnya pertambangan nikel di se-

jumlah wilayah di Indonesia telah menimbulkan beragam dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Kawasan pertambangan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti bahwa hilirisasi berisiko besar pada kelestarian lingkungan. Selain merusak ekologi, juga menimbulkan konflik agraria yang cenderung merugikan masyarakat setempat.

Berdasarkan data sebaran mineral dan batubara Kementerian ESDM, cadangan nikel nasional mencapai 55 juta metrik ton atau setara 42 persen total cadangan global. Estimasi cadangan ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen nikel terbesar secara global.

Produksi nikel terus meningkat dari 1,6 juta metrik ton pada 2022 menjadi 2,2 juta metrik ton pada 2024. Tren ini diprediksi akan terus tumbuh hingga 2028. Salah satu faktor berkembangnya produksi nikel nasional diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Jaringan kampanye global, Green-

peace, menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau Raja Ampat, seperti Gag, Kawe, dan Manuran. Ketiga pulau ini berkategori kecil dan seharusnya tidak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Eksplorasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas setempat. Sejumlah dokumentasi pun menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, yang berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat, Papua Barat.

Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan Manyafun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100 ribu.

Perairan Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies coral dunia dan punya lebih dari 2.500 spesies ikan. Daratannya memiliki 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung. UNESCO juga

telah menetapkan kawasan Raja Ampat sebagai global geopark.

Setop Sementara

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemilik konsesi atau wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nikel di Pulau Gag kawasan Raja Ampat merupakan anak perusahaan BUMN, PT Antam Tbk. IUP produksinya keluar pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018.

Bahlil mengatakan tambang ini sudah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebelum mereka beroperasi. PT Gag dahulunya merupakan IUP dengan izin konsesi berbentuk kontrak karya (KK) sekitar 1997 dan 1998. Kala itu, KK PT Gag dimiliki oleh perusahaan asing.

"Kemudian perusahaan asing pergi dan diambil alih oleh negara, lalu diserahkan kepada PT Antam," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis, 5 Juni 2025.

Selain Pulau Gag, Bahlil menyebut ada empat IUP lain di Raja Ampat. Namun, perusahaan yang beroperasi saat ini hanya PT Gag Nikel.

Bahlil pun akhirnya menghentikan sementara operasional PT Gag menambang nikel di kawasan Raja Ampat. Larangan ini berlaku sejak Bahlil mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers. PT Gag tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan produksi sampai hasil peninjauan verifikasi dari tim ESDM selesai.

"Mulai sejak saya berbicara, bukan seterusnya. Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya," ujarnya.

Bahlil menyebut pihaknya akan segera menyampaikan temuan verifikasi apapun hasilnya. Tidak hanya menghentikan IUP, Bahlil juga berencana mengunjungi Pulau Gag di Raja Ampat untuk mengetahui kondisi lapangan.

Rencana ini akan dilakukan Bahlil di sela-sela jadwal kunjungannya ke area Sorong dan wilayah kerja migas Kepala Burung, Papua Barat. Kunjungan ini juga dilakukan untuk meluruskan beberapa gambar yang diunggah di media massa dan media sosial terkait Raja Ampat.

"Saya perhatikan gambar di media itu

Pulau Piaynemo yang memang untuk pariwisata Raja Ampat. Padahal jarak Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu sekitar 30-40 kilometer," ucapnya.

Bahlil juga membenarkan, kawasan Raja Ampat merupakan wilayah pariwisata yang harus dilindungi.

"Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau untuk pariwisata

intahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses



tapi juga ada pulau yang memang ada pertambangan," katanya.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT GAG Nikel, Arya Arditya, buka suara terkait penghentian izin sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

"PT Gag Nikel menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara kegiatan operasional kami di Pulau Gag, Raja Ampat, hingga proses verifikasi lapangan selesai," kata Arya dalam keterangannya, Kamis, 5 Juni 2025.

Arya menyebut perusahaan memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemer-

konfirmasi kepada Kementerian ESDM," ujarnya.

Dia menyampaikan Gag Nikel juga beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.

"Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang," ucapnya.

Melanggar Regulasi

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan sebanyak

• INFO NASIONAL

empat perusahaan nikel di Raja Ampat melanggar aturan lingkungan. Pemerintah telah menghentikan tiga dari empat aktivitas tambang perusahaan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, KLH telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat pada 26–31 Mei 2025.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting,” ujar Hanif melalui keterangan tertulis.

Empat perusahaan tambang nikel menjadi objek pengawasan, yaitu PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Hanif mengatakan, seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

PT ASP, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.

Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030,53 hektare. Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hanif mengatakan, KLH saat ini

tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut.

Dia menegaskan, prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.

“Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” ujarnya.

Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.

Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.

Sementara itu, Menteri Kehutanan,

Raja Juli Antoni, memberikan arahan tegas untuk tidak

menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di Raja Ampat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons atas kekhawatiran ter-

hadap potensi degradasi lingkungan di kawasan berkonservasi tinggi, seperti Raja Ampat.

“Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat,” ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Triaji Kusumah, di Jakarta, Jumat, 6 Juni 2025.

Hingga saat ini, Kemenhut mencatat terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, masing-masing pada 2020 dan 2022.

Ade mengatakan, keduanya didasarkan pada perizinan di sektor pertambangan, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku saat itu.

Menurutnya, Raja Ampat merupakan ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi. Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan memprioritaskan perlindungan kawasan berkonservasi tinggi.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.

“Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” katanya.

Potensi Tersembunyi

Pariwisata harus menjadi pijakan utama dalam pengembangan kawasan Raja Ampat. Kesejahteraan masyarakat lokal dinilai lebih baik dengan membangun sektor tersebut. Pertambangan nikel harus berhenti karena dapat menghilangkan berbagai potensi pariwisata pulau-pulau kecil yang belum dikembangkan di Raja Ampat.

Pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menjelaskan, pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial karena banyak potensi di Raja Ampat yang belum dikembangkan. Hal ini untuk menanggapi pernyataan pemerintah yang menyebut kawasan



pertambangan nikel berada jauh dari kawasan pariwisata dan Geopark Raja Ampat.

Padahal, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada zona administrasi resmi. Raja Ampat lebih luas dari sekadar kawasan Geopark Raja Ampat atau wilayah Piaynemo yang sering masuk dalam promosi dan iklan pariwisata.

Ia menyebutkan, banyak pulau lain di luar kawasan inti pariwisata Raja Ampat yang punya potensi besar. Pulau Kawei yang kini dieksplorasi, contohnya, memiliki potensi terumbu karang yang indah sehingga dapat dikembangkan menjadi wisata penyelaman bawah air.

"Jangan hanya melihat Raja Ampat sebagai zona pariwisata yang dipetakan dalam promosi resmi saja. Ada banyak pulau yang belum diketahui potensi besarnya. Ini perlu dijaga. Bila pertambangan berlanjut, potensi tersebut tidak akan pernah diketahui dan akan hilang," ucapnya.

Potensi Raja Ampat sebagai wisata bahari harus terus dikembangkan. Taufan menjelaskan, potensi yang dimiliki menjadi modal besar Raja Ampat untuk jadi kawasan pariwisata kelas dunia.

"Raja Ampat punya semua potensi untuk menjadi pusat keunggulan pariwisata dunia. Ini mengapa perlu ada moratorium pertambangan untuk menjaganya," ujar Taufan.

Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sorong, Malamoi Torianus Kalami, menjelaskan, masyarakat lokal di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat, banyak yang bekerja sebagai petani ataupun nelayan. Sejak pariwisata menggeliat, masyarakat mulai terjun ke sektor tersebut.

Kekayaan keanekaragaman hayati di Raja Ampat begitu besar. Di daratan ini terdapat 874 spesies tumbuhan, 9 di antaranya spesies endemik dan ada 6 spesies yang dilindungi. Ada pula 114 spesies binatang melata, dengan 5 di antaranya hanya bisa ditemukan di Raja Ampat.

Selanjutnya, ada 274 spesies burung, dengan 6 spesies endemik dan 8 spesies adalah hewan yang dilindungi. Ada pula 47 spesies mamalia, dengan 1 spesies endemik dan 3 spesies dilindungi.

Kekayaan bawah lautnya juga besar. Di kawasan Raja Ampat terdapat 540 jenis terumbu karang atau sekitar 75 persen dari jenis terumbu karang dunia.

Pertambangan nikel hanya akan bertahan 10-20 tahun, tetapi pariwisata bisa menghidupi warga dalam waktu yang lebih panjang.

Jika pertambangan dilanjutkan, meski di luar kawasan pariwisata, ruang hidup warga akan terputus. Ia pun menegaskan, pulau-pulau tersebut punya manfaat bagi warga, khususnya di sektor

tidak tahu," tuturnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjelaskan, kekuatan masa depan Raja Ampat berada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, sehingga perlu dijaga sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional, Widiyanti menjelaskan, pihaknya mendorong Raja Ampat untuk menjadi kawasan ekonomi khusus yang fokus pada pariwisata yang



perikanan.

Tori juga menyebutkan, status geopark yang diterima wilayah Raja Ampat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pun kini menjadi tidak berarti. Hal ini karena aktivitas pertambangan masih diizinkan berjalan.

"Pulau kecil itu berbeda dengan pulau besar. Bila sudah rusak, sulit untuk merevitalisasinya karena pada dasarnya luas lahan terbatas. Bila sudah dikeruk, tanah yang ada di atas dibuang ke mana, kita

berkualitas. Pengembangannya pun harus berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

"Pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem," ujarnya. ●

SEJARAH

Gunawan Effendi

History is written by the victors, sejarah ditulis oleh para pemenang. Bahkan ungkapan terkenal itu pun dapat menjadi kontroversi. Apakah yang pertama mengucapkannya adalah PM Inggris di masa Perang Dunia II, Winston Churchill, yang boleh dibilang berada di pihak pemenang, atau Hermann Göring, politisi Nazi Jerman yang menjadi musuh Churchill sekiranya tidak dapat disebut berada di kelompok pecundang.

Nah, dalam film *The Report* (2019) terungkap Göring tercatat telah menyuarakan sentimen ini di pengadilan penjahat perang di Nuremberg. Dalam bahasa Jerman aslinya, Göring dilaporkan telah mengatakan, "Der Sieger wird immer der Richter und der Besiegte stets der Angeklagte sein," yang kurang lebih diterjemahkan menjadi kutipan yang diucapkan dalam film tadi: "Pemenang akan selalu menjadi hakim, dan yang kalah akan menjadi terdakwa."

Jadi, sebagaimana ungkapan sejarah ditulis oleh para pemenang dapat menjadi kontroversi, penulisan ulang sejarah Indonesia sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Republik Indonesia, pun demikian. Tambahan pula HUT itu pun dapat mengundang kontroversi.

HUT Proklamasi atau HUT Kemerdekaan RI? Pada jejak sejarah, pernah terjadi Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan RI. Maka saat belum ada pengakuan dari Belanda boleh jadi akan lebih netral menyebut HUT Proklamasi. Toh kita sudah terbiasa menyebut HUT Kemerdekaan RI sebelum ada pengakuan resmi dari Belanda. Pada konteks inilah sejarah ditulis oleh para pemenang memang pas dengan ungkapan HUT Kemerdekaan RI sebelum Belanda mengakuinya secara resmi.

Pengakuan ini baru terjadi pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta.

Selanjutnya, pada 14 Juni 2023, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mewakili pemerintah Belanda secara

resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mark Rutte menegaskannya saat menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Partai GroenLinks, terkait pengakuan terhadap kemerdekaan RI. Selama hampir 80 tahun, Belanda hanya mengakui bahwa kedaulatan negara Indonesia diperoleh pada 27 Desember 1949, pada saat dilakukan penandatanganan pengakuan kedaulatan di Belanda.

Kini kontroversi juga muncul dalam penulisan ulang 10 jilid buku *Sejarah Indonesia*. Misalnya, dalam penulisan kali ini tak ada istilah Orde Lama. Tapi, frasa Orde Baru masih ada.

Di depan Wakil Rakyat yang duduk di Komisi X DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan alasan mengapa Orde Lama menghilang dari penulisan ulang

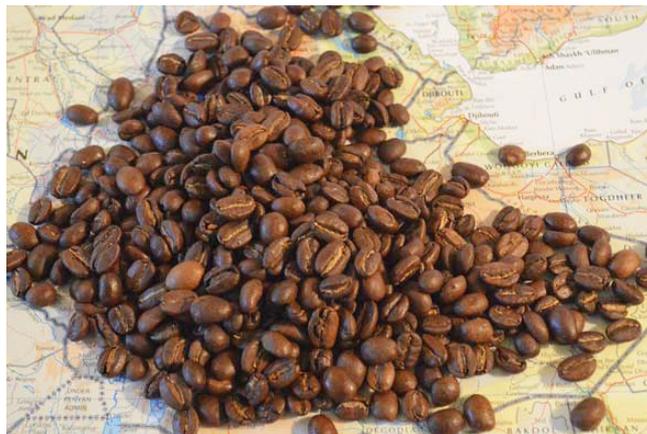
sejarah kali ini. Menurut dia, pemerintahan sebelum Orde Baru itu tidak pernah menyebut pemerintahannya sebagai Orde Lama. Sedangkan pemerintah berikutnya memang menyebut Orde Baru sebagai istilah resmi pemerintahannya.

Kontroversi lain pun tetap terbuka. Simak saja daftar judul 10 jilid buku sejarah yang sedang digarap tim sejarawan yang direncanakan

rampung pada Agustus 2025: 1. *Sejarah Awal Nusantara* | 2. *Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina* | 3. *Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah* | 4. *Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi* | 5. *Respons Terhadap Penjajahan* | 6. *Pergerakan Kebangsaan* | 7. *Perang Kemerdekaan Indonesia* | 8. *Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi* | 9. *Orde Baru (1967-1998)* | 10. *Era Reformasi (1999-2024)*

Mungkin kebijakan pemerintah menguji publik penulisan ulang sejarah ini pada Juni 2025, sebelum peluncuran resmi, memang yang terbaik untuk kali ini. Siapa tahu akan lebih terungkap sejarah masuknya tanaman semisal padi, kelapa, maupun pinang. Pada sisa Abad XXI, ketiganya berpotensi menjadi primadona agribisnis

Lagi pula uji publik ini sah-sah saja jika dilakukan sambil mengopi. Terlebih sejarah masuknya kopi pertama kali di Nusantara pun dapat menjadi kontroversi. Apakah dibawa oleh rombongan dari Eropa atau dari Timur Tengah, beriringan dengan meluasnya praktik sufi, tasawwuf, yang pas dengan fungsi kopi sebagai tonikum penyegar maupun pencegah kantuk? ●





KELAPA, KOPI, DAN PINANG JUGA

Hari Raya Idul Adha, tahun ini jatuh pada Jumat, 6 juni 2025, identik dengan pengolahan hewan kurban yang kerap memerlukan santan dari kelapa. Namun, yang terakhir ini sudah langka sejak menjelang Idul Fitri, dua bulan sebelumnya. Bersama kopi dan pinang, kelapa menjadi komoditas primadona untuk menyemarakkan ekonomi dalam negeri.

Meski terjadi kelangkaan di dalam negeri, niat menggelontorkan ekspor kelapa malah kian menyala. Salah satunya, datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang bersama jajaran kementeriannya sedang naik daun dengan keberhasilan menghasilkan stok beras terbanyak selama hampir 60 tahun terakhir.

Untuk kelapa, Andi Amran menegaskan ingin meningkatkan ekspor kelapa hingga tiga kali lipat, meskipun harga komoditas tersebut di pasar lokal masih mahal. Bukan sekadar

petani, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah tetapi juga produk olahan bernilai tinggi. "Intinya adalah kita hilirisasi agar kita mendapatkan nilai tambah sektor pertanian," ujar Mentan.

Ia menyebut hilirisasi akan dilakukan bersama BUMN pangan agar proses akselerasi berjalan cepat, sistematis. Lebih dari itu, hilirisasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani di berbagai daerah penghasil kelapa.

Mengenai ekspor kelapa yang dianggap berlebihan, Amran menilai

spor kelapa. Hal itu menyebabkan stok kelapa di dalam negeri minim hingga harga jadi naik.

Tren kenaikan ekspor itu sudah terdata sejak awal tahun ini. Sedangkan pada Maret 2025, masih kata Sarpono, angka ekspor kelapa per Maret 2025 mencapai 39,5 ribu ton dengan nilai US\$ 14,9 juta atau setara Rp 242,87 miliar (kurs Rp 16.300). Tiga negara tujuan ekspor terbesar selama Januari-Maret 2025 antara lain ada China, Vietnam, dan Thailand.

"Kenapa harga kelapa naik? Ternyata memang ada ekspor kelapa



dalam bentuk ekspor kelapa bulat sebagaimana kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita akan melakukan hilirisasi sektor pertanian. Kita prioritas bahan bakunya yang sudah tersedia. Seperti kelapa. Kelapa ekspor kita ada 2 juta ton. Itu nilainya kurang lebih Rp20 triliun. Ini kita hilirisasi. Insyaallah bisa naik dua kali lipat, tiga kali lipat nilainya nanti ke depan. Bisa Rp40 triliun, bisa Rp60 triliun. Hanya kelapa," ujar Andi Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Mei 2025.

Menurut Amran, hilirisasi pertanian menjadi solusi utama untuk memberikan keuntungan maksimal kepada

masyarakat harus memberi kesempatan kepada petani untuk menikmati hasil kerja mereka melalui peningkatan permintaan dari negara-negara seperti China. Ia menilai ekspor kelapa dan peningkatan konsumsi virgin coconut oil (VCO) di pasar internasional merupakan berkah karena negara-negara Eropa tidak bisa menanam kelapa dan Indonesia punya keunggulan komparatif.

Sedangkan Direktur Statistik Distribusi Badan pusat Statistik (BPS) Sarpono mengungkapkan, kenaikan harga kelapa pada April 2025 lalu, selain karena Hari Raya Lebaran, juga terdorong oleh tingginya angka ek-

spor yang cukup tinggi. Tujuan ekspor dari kelapa tersebut diantaranya ada di Tiongkok (China), Vietnam, Thailand," kata Sarpono, Rabu, 28 Mei 2025. Menurut dia, ekspor kelapa ke China meningkat karena adanya tren gaya hidup sehat dengan mengonsumsi air kelapa, santan hingga kelapa parut di sana.

Alih-alih menyetop atau sekadar membatasi ekspor kelapa bulat, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengusulkan kelapa dikenakan Pungutan Ekspor (PE). Hal ini sebagai tindak lanjut kenaikan harga kelapa yang signifikan akibat banyak diekspor. "Ya kita kan minggu ini atau

besok ya rapat jadi kita usulkan ada PE ya, pungutan ekspor kita usulkan," kata Budi ditemui di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis, 8 Mei 2025.

Dukungan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan ekspor kelapa tidak akan disetop meski harga di dalam negeri mahal. Ia mendorong petani untuk menanam lebih banyak lagi agar tidak terjadi kelangkaan dan harga bisa stabil. "Ya baguslah untuk petani, ya. Solusinya tanam yang banyak," kata Zulhas dalam acara World

dampak kelangkaan kelapa paling dirasakan oleh pelaku industri kecil dan menengah ke bawah. Bahkan, sebagian dari mereka sudah terpaksa gulung tikar akibat sulitnya mendapatkan bahan baku. "Jadi, bukan cuma industri besar yang terkena dampaknya. Industri menengah ke bawah bahkan merasakan dampak yang jauh lebih parah lagi, terutama para pelaku UMKM," ujar Rudy yang juga menyampaikan keluhannya kepada Kementerian Perindustrian pada awal April 2025.

Keluhan ini mendapat tanggapan langsung dari Menteri Perindustrian

(Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai pertemuan dengan HIPKI. Dari pertemuan itu terungkap, kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.

"Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama," kata Menperin Agus usai pertemuan dengan HIPKI.

Menperin mengemukakan, kebu-



of Coffee Jakarta 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis, 15 Mei 2025.

Dari sisi pengusaha yang terlibat dalam hilirisasi kelapa, kenaikan harga bahan baku kelapa bulat dan kelangkaannya rupanya berdampak pada kinerjanya pula. Kelangkaan kelapa memaksa industri dalam negeri untuk mengurangi kapasitas produksinya secara signifikan. Saat ini, hanya sekitar 40 hingga 50 persen dari total kapasitas produksi industri kelapa yang masih bisa bertahan.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja menyatakan,



Kita akan melakukan hilirisasi sektor pertanian. Kita prioritas bahan bakunya yang sudah tersedia. Seperti kelapa. Kelapa ekspor kita ada 2 juta ton. Itu nilainya kurang lebih Rp20 triliun.

tuhan konsumsi kelapa untuk rumah tangga dan industri kecil dan menengah (IKM) mencapai dua miliar butir kelapa per tahun. Sedangkan pangsa ekspor produk kelapa pada tahun 2024, yakni sebesar 2 miliar dolar AS atau Rp33,2 triliun (kurs Rp16.619), dan 85 persen merupakan produk olahan kelapa.

Sekarang tinggal bagaimana melihatnya; Apakah kelangkaan kelapa menjadi peluang dan tantangan, atau sekadar pembahasan belaka. Begitu pula dengan komoditas potensial lainnya seperti kopi dan pinang yang akan mengisi halaman-halaman berikutnya. ●

HITAM-HITAM SI BIJI KOPI...

Tanpa banyak promosi, Indonesia selama 5-10 tahun terakhir berada di peringkat lima besar negara pengeksport kopi di pasar global. Jadi, untuk apa kita menjadi tuan rumah World of Coffee 2025 di Jakarta?



Langsung maupun tidak langsung, Presiden Prabowo Subianto pun mempromosikan kopi. Minuman yang dapat berfungsi sebagai penyegar maupun penghilang kantuk itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari Presiden sejak lama. Ingat saja misalnya kopi hambalang, termasuk yang pengembangannya secara organik, tanpa pupuk kimia berbahan baku gas.

Kopi hambalang melekat dengan kawasan tempat kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan ini memiliki bentang perbukitan tropis dan lahan subur dengan ketinggian sekitar 250–500 meter di atas permukaan laut. Cocok pula

bagi pengembangan perkebunan kopi jenis Arabika maupun Robusta yang populer di Indonesia.

Menurut peneliti kopi Kuntoro Boga Andri Ph D yang juga Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Kementerian Pertanian, keunikan kopi Indonesia terletak pada ragam cita rasanya yang mencerminkan karakteristik geografis dan tradisi lokal. Ia mengemukakan, kopi aceh gayo memiliki aroma gula merah, cokelat pekat, dan jeruk citrus. Sementara kopi mandailing menawarkan karamel manis dan rempah.

Sedangkan Java Preanger, sambungnya, menghadirkan rasa jeruk citrus segar. Temanggung dikenal dengan rasa tanah dan karamel. Kintamani dari Bali memadukan cokelat, kacang, dan

lemon. Toraja kaya akan aroma gula merah, cokelat susu dan lembut. Kopi Wamena, Papua yang manis alami dengan keasaman rendah.

“Ragam cita rasa ini menjadikan kopi Indonesia unggul di pasar global. Sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen kopi terkemuka di dunia,” ungkapnya dalam artikel yang terbit pada Januari 2025.

Toh Indonesia tetap mempromosikan kopinya dengan menjadi tuan rumah World of Coffee 2025. Untuk apa? Yang terpenting sebenarnya adalah peningkatan nilai tambah produk kopi. Jadi, bukan hanya sekadar mengeksport biji kopi atau kopi bubuk, melainkan juga merambah bagian hilirnya hingga ke tingkat konsumen akhir: apakah penyajiannya, kombinasi dengan bahan lain, atau bahkan kemasannya. Itulah yang dikenal sebagai hilirisasi.

Bersama dengan kelapa sawit dan belakngan ini kelapa, kopi merupakan tiga besar produk perkebunan yang paling banyak diekspor oleh Indonesia. Perbedaan dengan sawit dan kelapa, pengembangan produksi perkebunan kopi masih lebih banyak berada di tangan petani berskala kecil. Berbeda dengan sawit atau kelapa yang pengembangannya sudah lebih banyak melibatkan korporasi atau perkebunan berskala besar.



• INFO KHUSUS

Lebih dari itu, harga produk kopi pada 2025 menunjukkan kecenderungan kenaikan signifikan. Pada Januari 2025, kantor berita Perancis, Reuters, sudah mengemukakan harga kopi di pasar global naik 1,9 persen dalam sehari. Kenaikan itu sudah lebih dari 15 persen sejak awal tahun. Tercatat bahwa roaster besar seperti Nestlé dan JDE Peet's masih kekurangan pasokan dan harus membeli lebih banyak, sementara spekulasi tetap optimistis. Stok arabika bersertifikat di ICE juga turun drastis hampir 100.000 kantong menjadi sekitar 900.000 kantong, menunjukkan

ton, mendekati rekor tertinggi. Petani Vietnam menahan penjualan dengan harapan harga terus naik, sementara perdagangan dan pengiriman melambat menjelang Tahun Baru Imlek.

Selain itu, kenaikan ini dipicu oleh pasokan yang sangat ketat dan kekhawatiran terhadap prospek panen mendatang. Indonesia, sebagai produsen kopi terbesar kelima di dunia dengan kontribusi 5 persen terhadap produksi global, kemungkinan tidak luput dari gejala ini. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi kopi Indonesia mengalami penurunan

nesia juga menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2023, ekspor kopi turun drastis menjadi 276.335,2 ton dari 433.881,1 ton pada tahun sebelumnya. Meskipun volume menurun, nilai ekspor tetap tinggi, mencapai US\$916,5 juta atau sekitar Rp14,19 triliun, mencerminkan lonjakan harga kopi di pasar internasional akibat terbatasnya pasokan.

Kenaikan harga kopi global memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor. Namun, rendahnya produktivitas hanya 780 kg per hektar, dibandingkan dengan Brasil yang mencapai 7.000 kg per



ketatnya pasokan.

Meski sempat ada harapan bahwa kondisi di Brasil akan membaik karena hujan beberapa bulan terakhir, prakiraan cuaca terbaru menunjukkan curah hujan di bawah rata-rata dan suhu yang meningkat, kembali memicu kekhawatiran.

Robusta juga mengalami kenaikan, naik 2,2 persen ke \$5.734 per metrik

dari 771 ribu ton pada 2022 menjadi 756,1 ribu ton pada 2023.

Penurunan produksi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim yang ekstrem, serangan hama, dan kurangnya peremajaan tanaman. Kondisi ini menjadi sinyal bahaya bagi sektor kopi nasional yang menjadi tulang punggung bagi jutaan petani.

Di sisi lain, volume ekspor kopi Indo-

hektar dan Vietnam dengan 3.500 kg per hektar menjadi tantangan tersendiri. Urgensi perbaikan infrastruktur pertanian dan regenerasi tanaman kopi menjadi semakin nyata.

Sementara itu, konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat. Data USDA mencatat bahwa konsumsi kopi nasional diperkirakan mencapai 4,79 juta kantong pada 2023/2024. Survei Snap-

chat pada September 2023 menunjukkan 79 persen masyarakat Indonesia minum kopi setidaknya sekali sehari, terutama di pagi hari. Mayoritas konsumen menghabiskan antara Rp6.000 hingga Rp20.000 per cangkir, menjadikan kopi bagian penting dari rutinitas harian.

Karena itu pula maka World of Coffee 2025 lebih bermakna untuk promosi kopi Indonesia. Itu terlihat dari kehadiran sekitar 400 merek kopi beserta pelaku industri yang terlibat, mulai dari petani, barista (penyaji), dan roaster (pengolah biji kopi) dari berbagai negara, termasuk India, Timor Leste, Amerika Serikat, dan

Sedangkan Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Daryanto Witarso, mengatakan bahwa dirinya sudah lama berencana membawa pameran kopi dunia ini ke Indonesia. "Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara, sekaligus negara produsen kopi pertama di Asia yang menjadi tuan rumah World of Coffee," kata Daryanto.

Sebelumnya, World of Coffee selalu digelar di negara-negara konsumen kopi, seperti Jepang dan Amerika Serikat. World of Coffee Jakarta 2025 juga diproyeksikan membawa dampak

di Jakarta menjadi tonggak bersejarah bagi industri kopi Indonesia karena bisa membuka peluang besar untuk kolaborasi dengan para pemain global dan dapat memperkuat ekosistem kopi nasional dari hulu hingga ke hilir.

Oleh karena itu, sambungnya, bagi Excelso sebagai jenama kopi premium Indonesia yang telah hadir sejak 1991, penyelenggaraan World of Coffee Jakarta merupakan sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, keberlanjutan khususnya pengembangan kopi lokal.

"Kehadiran World of Coffee 2025 di



Vietnam.

"Posisi Indonesia sebagai salah satu pasar konsumen yang sangat signifikan di Asia, sekaligus sebagai produsen kopi terkemuka menjadikannya lokasi yang ideal untuk ajang global ini," kata Yannis Apostolopoulos, CEO Specialty Coffee Association (SCA) di Jakarta Convention Center, lokasi Word of Coffee 2025, Kamis, 15 Mei 2025.

positif seperti peningkatan ekonomi, promosi kopi Indonesia, dan kolaborasi antar pelaku industri kopi.

Para pelaku industri kopi seperti Direktur Utama Excelso Multirasa, Kevin Christopher Mergonoto menyambut baik penyelenggaraan World of Coffee 2025 Jakarta yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Menurut dia, kehadiran World of Coffee

Jakarta menjadi tonggak bersejarah bagi industri kopi Indonesia dan membuka peluang besar untuk kolaborasi global, pertumbuhan ekonomi kreatif serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Excelso percaya bahwa kopi bukan sekedar minuman, namun menjadi medium untuk mengangkat budaya, membangun koneksi dan menciptakan



pengalaman khas Indonesia yang bisa dibanggakan di kancah global,” ungkap Mergonoto.

Tak hanya itu, kopi juga membuka peluang bagi industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti media sosial dan perdagangan elektronik (e-commerce) Tak mengherankan jika Head of Communications Tokopedia & TikTok Ecommerce, Aditia Grasio Nelwan pun menyambut baik penyelenggaraan World of Coffee 2025. Menurut dia, World of Coffee 2025 di Jakarta dapat membuka peluang sangat besar bagi pertumbuhan industri kopi di Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan dan keunikan kopi Indonesia ke khalayak yang lebih luas.

“Senang sekali kami bisa ikut terlibat dalam acara World of Coffee 2025. Kalau bisa dibilang, Tokopedia itu memiliki sejarah yang cukup erat dengan kopi. Se-

bagai komitmen dan inisiatif kami, akan menghadirkan booth live streaming. Kita juga ada bar takeover yang nantinya akan menyediakan kopi-kopi Indonesia yang bisa dinikmati secara gratis. Kemudian, semua produk kopi di ajang World of Coffee yang sudah dikurasi, bisa dibeli langsung di platform Tokopedia dan TikTok Shop,” ujarnya.

Meski begitu ahli kopi Kuntoro Boga Andri mengingatkan, di samping peluang, kopi Indonesia juga menghadapi tantangan. Teknologi modern yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi, pemasaran global, serta desain kemasan yang menarik, kata dia, menjadi kunci untuk memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar global. Inovasi ini memungkinkan produsen menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan biaya lebih efisien, memastikan kopi Indonesia tetap relevan baik di pasar do-

mestik maupun internasional.

Tren konsumsi kopi siap saji, khususnya di kalangan generasi muda, semakin berkembang, dengan produk inovatif seperti kopi dalam botol atau kaleng yang menggunakan bahan lokal dan fungsional. Namun, tantangan besar di sektor produksi perlu dihadapi, seperti pohon kopi yang menua, produktivitas rendah, dan dampak perubahan iklim.

Untuk menjaga keberlanjutan produksi, langkah seperti peremajaan pohon, adopsi teknologi modern dalam budidaya, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan sangat penting. Adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk menanam varietas kopi yang lebih tahan, menjadi prioritas utama bagi produsen kopi. Selain itu, penurunan luas lahan kopi robusta yang terjadi karena alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian serius agar Indonesia tetap menjadi negara



produsen kopi utama.

Pada saat sama, perubahan iklim global diperkirakan akan mempengaruhi produksi kopi secara signifikan. Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan dapat mengancam pasokan biji kopi arabika, tapi Indonesia memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan dari pergeseran produksi kopi karena letak geografisnya yang strategis dan keanekaragaman varietas kopi yang dimiliki.

Jadi, kata Kuntoro, faktor-faktor penguatan inovasi produk, seperti kopi siap saji dalam kemasan dengan rasa inovatif, dapat membuka peluang ekspor lebih luas. Tren ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar domestik, tetapi juga menjadi potensi baru di pasar internasional. Industri kopi Indonesia juga diproyeksikan akan berkembang pesat berkat meningkatnya konsumsi kopi domestik.

Pada periode 2024/2025, dalam beberapa laporan dari lembaga riset dan pemerhati pasar kopi, konsumsi kopi domestik diperkirakan mencapai 4,8 juta kantong, meningkat dari 4,45 juta kantong pada 2020/2021. Sektor makanan dan minuman, perhotelan, dan kedai kopi yang terus berkembang mendorong pertumbuhan ini, dengan pangsa pasar kedai kopi Indonesia diperkirakan mencapai 2,1 miliar dollar AS (Rp 34 Triliun) dan pertumbuhan tahunan sekitar 10 persen.

Namun, rendahnya konsumsi kopi per kapita di Indonesia, yang hanya 1 kg per tahun, menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan konsumsi kopi domestik, yang dapat didorong oleh perusahaan lokal. Harga kopi global diperkirakan akan terus meningkat akibat penurunan produksi di negara-negara penghasil utama seperti Brasil dan

Vietnam, yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Hal ini memberikan keuntungan bagi produsen kopi Indonesia, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor kopi. Meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan biaya logistik tetap ada, peluang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi terkemuka di dunia sangat besar, terutama dengan mengintegrasikan teknologi dan promosi global yang efektif.

Nah, 2025 mulai memasuki semester II pada Juli 2025. Samar-samar terdengar harga kopi global mulai turun pada awal Juni 2025.

Tapi, semoga kopi Indonesia dan para pelaku usahanya dari hulu ke hilir dapat lebih banyak memetik lebih banyak manfaat sepanjang sisa tahun ini. Hitam-hitam si biji kopi, biar hitam manfaatnya sudah terbukti. • Editor: GE



PINANG PULANG KE TAMPUKNYA

Dari sisi toponimi, banyak tempat menggunakan kata pinang: pertanda tanaman ini melekat erat dengan kehidupan warga setempat. Kini pinang kembali ke tampuknya, peribahasa yang bermakna berada di tempat yang pas sesuai dengan manfaat dan fungsinya.

Nama tempat Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Pangkalpinang, di Bangka Belitung, tambah lagi Pondok Pinang dan Pinang Ranti di Jakarta sudah cukup menjadi bukti bahwa pinang (*Areca catechu*) memiliki fungsi penting dalam kehidupan di nusantara pada masa silam.

Kini pinang memang pulang ke tampuknya. Baik sebagai tanaman (yang ditanam) maupun tumbuhan (katakanlah liar, tanpa campur tangan manusia), sudah sepantasnya pinang menjadi bagian penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harap maklum, Indonesia adalah pemasok pinang terbesar di dunia.

Sekitar setahun lalu, pertengahan Juli 2024, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang kala itu masih menjabat Menteri Perdagangan, mengungkapkan, ekspor pinang Indonesia menduduki peringkat satu di du-

nia. Bukan itu saja, Indonesia juga memasok 35 persen kebutuhan pinang di dunia.

"Pasar pinang terbesar ada di India, Arab Saudi, Bangladesh, dan Vietnam. Pelepasan ekspor ke Arab Saudi dan Bangladesh kali ini kami harap dapat menjadi momentum mendorong perluasan akses pasar bagi produk pinang Indonesia," ujar Zulhas, nama ringkas Zulkifli Hasan saat melepas ekspor 28 kontainer pinang oleh PT Best Star Indonesia.

Ia mengemukakan, akan terus menggelar pelepasan ekspor sebagai bentuk dukungan bagi produk Indonesia yang berhasil menembus pasar mancanegara. "Pelepasan ekspor merupakan hal positif. Kita akan terus gelar ini untuk mendorong semangat ekspor para pelaku usaha," kata Zulkifli Hasan.

Ekspor produk pinang Indonesia periode Januari sampai Mei 2024 tercatat

sebesar 49,1 juta dolar AS. Sedangkan pada 2023 tercatat sebesar 127,39 juta dolar AS dengan negara tujuan ekspor terbesar pinang Indonesia, yaitu Iran (42,11 persen), India (14,82 persen), Tiongkok (10,81 persen), Bangladesh (9,41 persen), dan Malaysia (5,86 persen).

Permintaan dunia untuk pinang sangat menjanjikan. Permintaan impor dunia 2023 mencapai nilai sebesar 358,7 juta dolar AS. Tren impor pinang lima tahunan dunia (2019 sampai 2023) juga tumbuh positif sebesar 39 persen. Negara-negara pengimpor pinang terbesar di dunia, antara lain, India (147,3 juta dolar AS), Iran (55,69 juta dolar AS), Bangladesh (35,30 juta dolar AS), Uni Emirat Arab (34,42 juta dolar AS), dan Vietnam (26,5 juta dolar AS). Pinang tidak hanya untuk konsumsi langsung, tetapi juga untuk industri bernilai tambah seperti biomedis untuk antidepresan, antioksidan, dan lain-lain.

Data dari Badan Karantina Indonesia (Barantin) menunjukkan, sepanjang 2024, pinang menduduki peringkat ketiga dari lima tanaman perkebunan terbanyak diekspor pada tahun lalu. Memang, nilai ekspor pinang pada 2024 masih di bawah kelapa sawit dan kopi. meski begitu angkanya masih melampaui nilai ekspor kelapa dan manggis.

Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean mengemukakan, komoditas terbesar yang tetap mendominasi ekspor Indonesia adalah sawit dan turunannya. Menurut dia,, sepanjang 2024, volume ekspor sawit Indonesia tercatat mencapai 11.735.773 ton, dengan nilai total Rp 209,9 triliun.

“Produk utama yang diekspor adalah CPO (Crude Palm Oil) dan berbagai turunannya. Beberapa negara yang menjadi pasar utama ekspor kelapa sawit Indonesia antara lain China, Jepang, dan Selandia Baru,” ungkap Sahat.

Selain sawit, komoditas unggulan lainnya adalah kopi. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, mencatatkan volume ekspor kopi pada 2024 sebanyak 177.799 ton dengan nilai mencapai Rp 14,41 triliun. Sahat menjelaskan, pasar utama ekspor kopi Indonesia mencakup Amerika Serikat (AS), Egypt, dan Malaysia.

Nah, di posisi ketiga biji pinang muncul tanpa banyak cakap. Pada 2024, volume ekspor biji pinang Indonesia tercatat mencapai 150.100 ton, dengan nilai ekspor sebesar Rp 5,32 triliun. “Negara-negara seperti Iran, India, dan China menjadi tujuan utama ekspor biji pinang Indonesia,” kata Sahat.

Kelapa Indonesia juga mencatatkan angka ekspor yang signifikan dengan volume mencapai 646.310 ton dan nilai ekspor Rp 3,06 triliun pada 2024. Produk kelapa yang diekspor mencakup kelapa segar, kopra, dan santan, yang banyak diminati oleh pasar-pasar internasional.

“Negara tujuan ekspor utama kelapa Indonesia adalah China, Malaysia, dan Thailand. Kelapa Indonesia digunakan dalam berbagai industri, termasuk pangan dan kosmetik,” kata dia.

Di posisi kelima, manggis Indone-

sia, yang dikenal dengan kualitas premium, mencatatkan volume ekspor 59.562 ton dengan nilai Rp 2,02 triliun pada 2024. Pasar utama manggis Indonesia meliputi China, Malaysia, dan United Arab Emirates (UAE), yang terus mengimpor manggis Indonesia karena rasa dan manfaat kesehatan yang tinggi.

Kembali ke pinang di tampuknya,

nian pinang di Jambi ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun provinsi lainnya di Sumatera seperti Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, hingga Aceh, turut menyumbang produksi pinang nasional dan ekspor.

Buah pinang bukan hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi budaya di Indonesia, melainkan memiliki pula



dari sisi sumber pasokan, provinsi Jambi telah dikenal sebagai produsen utama pinang di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan benih Pinang Betara Jambi sebagai varietas unggul nasional yang berorientasi pada ekspor, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi pekebun khususnya di Provinsi Jambi. Lahan terbesar perta-

berbagai manfaat kesehatan yang telah diakui dalam pengobatan tradisional hingga pasar internasional. Buah pinang memiliki khasiat antara lain menjaga kesehatan mulut, menurunkan tekanan darah, mencegah anemia, melancarkan pencernaan, hingga meningkatkan energi. Tak heran jika pinang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, termasuk

• INFO KHUSUS

dalam sistem pengobatan Ayurveda di India dan pengobatan tradisional Tiongkok.

Secara fisik, buah pinang berukuran 3–5 cm, berbentuk lonjong dengan satu biji, dan berwarna hijau hingga jingga saat matang. Tanaman ini banyak tumbuh di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Di Indonesia sendiri, buah pinang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam upacara adat, pengobatan tradisional, hingga konsumsi sehari-hari bersama daun sirih dan kapur.

Buah pinang diketahui mengandung lebih dari 50 senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid yang memiliki berbagai manfaat medis. Di antaranya sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik (pereda nyeri), hingga antialergi. Kandungan

bagi manusia, buah pinang juga dimanfaatkan dalam dunia peternakan, salah satunya untuk mengobati cacing mata pada sapi.

Sebagai salah satu produsen utama pinang dunia, Indonesia memainkan peranan penting di pasar global. Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi pusat produksi utama, den-



Negara-negara seperti Iran, India, dan China menjadi tujuan utama ekspor biji pinang Indonesia.

kan di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, sebagai bagian dari program One Village One CEO (OVOC) yang digagas IPB untuk membangun ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Komoditas pinang menjadi pionir dalam proyek OVOC di Kabupaten Kubu Raya, dengan harapan mendorong desa untuk berperan aktif dalam rantai nilai ekspor. “Pinang ini jadi langkah awal. Selanjutnya, kelapa akan menjadi komoditas utama yang kami dorong masuk ke pasar ekspor. Ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Yulianto, Supervisor Komersial Pelindo Regional 2 Pontianak, di lokasi acara.

Upaya mendorong ekspor juga diperkuat dengan pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Pelabuhan



ini menjadikan pinang efektif untuk meredakan berbagai keluhan, seperti gangguan pencernaan, batuk, pilek, bahkan infeksi cacing dan disentri.

Ekstrak biji pinang dapat membantu menurunkan kadar gula darah berkat kandungan alkaloid seperti pyridine dan piperidine, yang bersifat anti-diabetes. Selain itu, kandungan antioksidan dalam pinang dapat memperlambat penuaan sel, meningkatkan produksi kolagen, dan menjaga kesehatan kulit. Tidak hanya bermanfaat

gan biji pinang sebagai komoditas ekspor unggulan. Pinang tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam bentuk olahan seperti produk herbal dan kosmetik, yang semakin mendapat tempat di pasar internasional.

Perkembangan terakhir. Kalimantan Barat menandai babak baru dalam ekspor komoditas pertanian dengan melepas ekspor perdana pinang dari desa binaan IPB University oada Kamis, 5 Juni 2025. Seremoni pelepasan dilaku-

tersebut dijadwalkan mulai menerima kontainer ekspor pada pertengahan Juni. “Kami siapkan infrastruktur pendukung, mulai dari lahan, alat angkut, hingga fasilitas bongkar muat agar proses ekspor berjalan efisien dan berkelanjutan,” kata Yulianto.

Toh tantangan lain sudah menanti. Bagaimana dengan hilirisasi pinang? Pinang sudah kembali ke tampuknya. Tantangan berikutnya adalah pengembangan industri nya di dalam negeri. • Editor: GE

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



**INFO
PASANG
IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786



iNOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #56 JUNI 2025



SUFMI DASCO AHMAD

**PENYAMBUNG PESAN
PRABOWO-MEGAWATI**